BADAN POM

Laporan Kinerja



2026 • Triwulan II

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Jl. Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa, Kota Batam
Email : bpom_batam@pom.go.id | Telp : (0778) 761543

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Triwulan II Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Batam sekaligus wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang berada di wilayah perbatasan negara, Balai POM di Batam memiliki tantangan yang semakin kompleks dalam mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat serta makanan. Tingginya mobilitas barang dan manusia, karakteristik wilayah kepulauan, serta perkembangan aktivitas perdagangan dan industri menuntut pengawasan yang adaptif, berbasis risiko, serta didukung sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, serta Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Balai POM di Batam memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,68 dengan kategori Istimewa. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat direalisasikan secara optimal melalui pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, penguatan pelayanan publik, pendampingan pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat, penguatan laboratorium, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian,

masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan percepatan agar target kinerja tahunan dapat dicapai secara optimal

Laporan ini diharapkan menjadi media evaluasi, pembelajaran, dan dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Berbagai capaian yang telah diraih akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara berbagai tantangan dan kendala akan menjadi fokus perbaikan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan tata kelola organisasi sehingga manfaat pengawasan obat dan makanan semakin dirasakan oleh masyarakat.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Balai POM di Batam serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan menjadi pendorong peningkatan kinerja Balai POM di Batam pada masa yang akan datang.

Batam, 20 Juli 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Batam

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI BATAM

Ully Mandasari, S.Farm, Apt, M.H.
NIP. 19830311 200912 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR TABEL **6**
DAFTAR GRAFIK/GAMBAR **14**
Highlight **16**
Tim Penyusun Laporan Kinerja Triwulan II TA 2026 ..... **22**
Ringkasan Eksekutif **23**
BAB I
PENDAHULUAN **26**
1.1 LATAR BELAKANG 26
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 27
1.3 STRUKTUR ORGANISASI 29
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 31
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 32
1.6 ISU STRATEGIS 40
BAB II
PERENCANAAN KINERJA **93**
2.1 RENCANA STRATEGIS 93
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2026 100
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 104
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 108
2.5 METODE PENGUKURAN 130
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA **138**
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 138
Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 156
1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 156
2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO 167
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 172
4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar 178
5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 183
6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder .....

188
7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 193
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 198
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 203
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 210
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan..... 214
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.....220
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.... 226
14. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....229
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....235
Sasaran Kegiatan 2.....239
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 239
16. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 239
Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT.....243
17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT..... 243
18. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan..... 248
19. Jumlah Desa Pangan Aman..... 254
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas..... 259
Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu..... 265
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan..... 265
Sasaran Kegiatan 5.....273
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT..... 273
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT..... 273
Sasaran Kegiatan 6
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT..... 277
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar..... 277
Sasaran Kegiatan 7
Layanan Publik UPT yang prima..... 281
24. Indeks Pelayanan Publik UPT.....281
Sasaran Kegiatan 8
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal..... 283
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....283
26. Nilai AKIP UPT BPOM.....285
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM..... 288
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM..... 295
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA.....297
3.3 REALISASI ANGGARAN.....373
1. Realisasi Anggaran Triwulan II TA 2026.....373
2. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan.....375
3. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran..... 385
BAB IV
PENUTUP..... 395
4.1 Isu Strategis dan Permasalahan Utama.....395
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....396
4.3 Kesimpulan.....397
4.4 Saran.....401
L A M P I R A N..... 403
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja 2026.....403
Lampiran 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2026 (Revisi Juni 2026)..... 407
Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2026.....455
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2026..... 466
Lampiran 5 Pengukuran Tingkat Efisiensi per Program/Kegiatan Triwulan II Tahun 2026..... 471

DAFTAR TABEL

Tabel 1
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran.....24
Tabel 1.1
Pemenuhan ABK Balai POM di Batam.....33
Tabel 1.2
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2026..... 39
Tabel 1.3
Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025..... 40
Tabel 1.4
Perbandingan Proporsi Peserta KIE Dengan Proporsi Jumlah Penduduk Masing-masing Kabupaten kota..... 64
Tabel 1.5
Gap Pemenuhan SDM Balai POM di Batam.....68
Tabel 1.6
Hasil Survei Implementasi Berakhlak.....75
Tabel 1.7
Sebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau..... 79
Tabel 1.8
Persentase Sekolah, Desa dan Pasar Yang Sudah Diintervensi tahun 2020-2025.. 80
Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Batam..... 104
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam TA 2026.....108
Tabel 2.3
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Batam (awal)..... 114
Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Batam (Revisi 10 Juni 2026)..... 120
Tabel 2.5
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 121
Tabel 2.6
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.....122
Tabel 2.7
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Jumlah Desa Pangan Aman..... 123
Tabel 2.8
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas..... 124

Tabel 2.9
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Persentase UMKM Yang Didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....125
Tabel 2.10
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT..... 126
Tabel 2.11
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja.....131
Tabel 2.12
Contoh Perhitungan NKO Periodik.....132
Tabel 2.13
Contoh Perhitungan NKO Tahunan..... 133
Tabel 2.14
Besaran Koreksi Capaian NKO..... 134
Tabel 2.15
Predikat Capaian NKO..... 135
Tabel 2.16
Range Perhitungan Tingkat Efisiensi..... 137
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II Tahun 2026..... 144
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2026.....155
Tabel 3.3
Realisasi Dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 156
Tabel 3.4
Realisasi Dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 164
Tabel 3.5
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 166
Tabel 3.6
Realisasi Dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO. 167
Tabel 3.7
Realisasi Dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO. 170
Tabel 3.8
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO..... 171
Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan..... 172
Tabel 3.10
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 175
Tabel 3.11
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 177
Tabel 3.12
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar..... 178
Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar..... 180
Tabel 3.14
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar..... 182
Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 183
Tabel 3.16
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 185
Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder..... 188
Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder..... 190
Tabel 3.19
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder..... 192
Tabel 3.20
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 193
Tabel 3.21
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 196
Tabel 3.22
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 197
Tabel 3.23

Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....198
Tabel 3.24
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....201
Tabel 3.25
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....201
Tabel 3.26
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....203
Tabel 3.27
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....207
Tabel 3.28
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 208
Tabel 3.29
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....210
Tabel 3.30
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....211
Tabel 3.31
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....213
Tabel 3.32
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan..... 214
Tabel 3.33
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan..... 217
Tabel 3.34
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan..... 219
Tabel 3.35
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar..... 220

Tabel 3.36
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar..... 223
Tabel 3.37
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar..... 224
Tabel 3.38
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.....226
Tabel 3.39
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 229
Tabel 3.40
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 233
Tabel 3.41
Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 234
Tabel 3.42
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....235
Tabel 3.43
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....239
Tabel 3.44
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....241
Tabel 3.45
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 242
Tabel 3.46
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT....243
Tabel 3.47
Skor Indeks Efektivitas KIE.....245
Tabel 3.48
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT....245
Tabel 3.49
Matriks Rekomendasi Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan

Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT..... 247
Tabel 3.50
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.....248
Tabel 3.51
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.....251
Tabel 3.52
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.....253
Tabel 3.53
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Jumlah Desa Pangan Aman..... 254
Tabel 3.54
Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman..... 255
Tabel 3.55
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Jumlah Desa Pangan Aman..... 256
Tabel 3.56
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman..... 257
Tabel 3.57
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas..... 259
Tabel 3.58
Tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas..... 260
Tabel 3.59
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas..... 261
Tabel 3.60
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. 263
Tabel 3.61
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan..... 265
Tabel 3.62
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan..... 268
Tabel 3.63
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam.....269
Tabel 3.64
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Kosmetik.....269
Tabel 3.65
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....271

Tabel 3.66
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....272
Tabel 3.67
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....273
Tabel 3.68
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....275
Tabel 3.69
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....276
Tabel 3.70
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar..... 277
Tabel 3.71
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar..... 279
Tabel 3.72
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar..... 280
Tabel 3.73
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT.....281
Tabel 3.74
Kategori NIlai Indeks Pelayanan Publik..... 282
Tabel 3.75
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....283
Tabel 3.76
Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....285
Tabel 3.77
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Nilai AKIP UPT BPOM..... 285
Tabel 3.78
Bobot Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....287
Tabel 3.79
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM..... 288
Tabel 3.80
Kategori Nilai Kinerja Anggaran.....289
Tabel 3.81

Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM..... 294
Tabel 3.82
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM..... 295
Tabel 3.83
Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja..... 296
Tabel 3.84
Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya..... 372
Tabel 3.85
Perbandingan Alokasi Anggaran 2026 DIPA awal dan DIPA pada akhir Triwulan II..... 373
Tabel 3.86
Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Triwulan II Tahun 2026..... 375
Tabel 3.87
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Triwulan II Tahun 2026 per Indikator Kinerja..... 382
Tabel 3.88
Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM di Batam Triwulan II Tahun 2026 Per Sasaran Kegiatan..... 383

DAFTAR GRAFIK/GAMBAR

Gambar 1
Sertifikat Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai POM di Batam..... 17
Gambar 2
Pelaksanaan Kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat Obat Tertentu (OOT) di Kepulauan Riau, 25 Mei 2026..... 18
Gambar 3
Penghargaan UPT BPOM dengan persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat tertinggi ke-2 Balai POM di Batam..... 20
Gambar 4
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Sebagai Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal Tingkat Provinsi - Balai POM di Batam.....21
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Balai POM di Batam..... 29
Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....34
Gambar 1.2
Wilayah kerja Balai POM Batam.....37
Grafik 1.2
Jumlah Sampel Pihak Ketiga Yang Diuji.....55
Grafik 1.3
Jumlah Peserta KIE Langsung Per Kab/Kota.....62
Grafik 1.4
Hasil Survei Terkait Media KIE Yang Menarik Untuk Masyarakat..... 63
Grafik 1.5
Perbandingan Realisasi Anggaran 2021 sd 2025 dan Pagu Efektif TA 2026..... 66
Grafik 1.6
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja Balai POM di Batam.....78
Grafik 1.7
Jumlah Sertifikat Keterangan Ekspor (SKE), Impor (SKI), dan Sertifikat/Hasil Uji Sampel Pihak Ketiga (LHU) yang diterbitkan.....81
Grafik 1.8
PNBP Balai POM di Batam tahun 2020-2025..... 82
Grafik 2.1
Sumber Predikat AKIP.....134

Highlight

Pembangunan Zona Integritas

Balai POM di Batam sebagai bagian dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik secara konsisten terus melakukan penguatan tata kelola organisasi melalui pembangunan Zona Integritas. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Implementasi Zona Integritas dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain penguatan integritas aparatur, perbaikan proses bisnis, peningkatan efektivitas pengawasan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Komitmen tersebut telah membuahkan hasil dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pada Triwulan II Tahun 2026, upaya pembangunan Zona Integritas terus dilanjutkan melalui pembentukan tim kerja yang terintegrasi antara pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Zona Integritas, serta pemenuhan data dukung dan pengisian lembar kerja evaluasi sebagai bagian dari proses penilaian Zona Integritas tahun 2026. Langkah ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.



Gambar 1
Sertifikat Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai POM di Batam

Sebagai upaya berkelanjutan pembangunan Zona Integritas di Balai POM di Batam, pada Triwulan I 2026 Balai POM di Batam telah membentuk tim kerja terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dan Zona Integritas. Pembentukan tim tersebut sesuai dengan panduan pembentukan tim Zona Integritas yang disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.09.01.2.01.26.24 tanggal 9 Januari 2026 perihal Pembentukan Tim Kerja dalam rangka pencapaian tujuan yang integral dengan Pengendalian Intern. Selain itu, pada triwulan I Balai POM di Batam telah mengisi lembar kerja evaluasi dan melengkapi data dukung untuk penilaian Zona Integritas tahun 2026.

Kegiatan Strategis

Balai POM di Batam turut berpartisipasi dalam Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu (OOT) yang diselenggarakan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPOM RI, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, serta Gubernur Kepulauan Riau, bersama unsur pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan OOT, khususnya di kalangan generasi muda.



Gambar 2
Pelaksanaan Kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat Obat Tertentu (OOT) di Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Melalui sinergi lintas sektor, BPOM bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan OOT. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.

Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta secara luring dan daring dari berbagai wilayah Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan OOT secara berkelanjutan.

Inovasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik, Balai POM di Batam terus mengembangkan inovasi yang memberikan dampak nyata terhadap percepatan layanan dan peningkatan kinerja organisasi. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada perbaikan proses internal, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan stakeholder. Pada tahun 2026, dua inovasi unggulan Balai POM di Batam yaitu:

1. SIPANDAN SKI / SKE

   Sigap dan Siap Dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE. Inovasi ini merupakan upaya percepatan layanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) melalui optimalisasi proses pelayanan. Melalui inovasi ini, waktu penyelesaian layanan berhasil dipersingkat dari standar 6 jam menjadi 4,5 jam untuk SKI, dan dari 8 jam menjadi 5 jam untuk SKE. Percepatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi produk yang aman, bermutu, dan sesuai ketentuan
2. PESAN

   Inovasi ini dikembangkan sebagai respons terhadap tingginya potensi kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah perbatasan dengan mobilitas tinggi. Melalui inovasi PESAN, waktu penyelesaian pengujian dipercepat dari 3 hari kerja menjadi 2 hari kerja, sehingga mendukung percepatan proses penegakan hukum. Inovasi ini menunjukkan peran strategis Balai POM di Batam dalam

mendukung perlindungan masyarakat dan penanganan kasus secara lebih efektif.

Penghargaan

Kinerja Balai POM di Batam yang dilaksanakan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan telah memperoleh berbagai penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas capaian yang diraih. Sepanjang tahun 2026, Balai POM di Batam memperoleh penghargaan, salah satunya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat tertinggi ke-2. Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan capaian administratif, tetapi juga menunjukkan efektivitas pengawasan yang berdampak langsung terhadap peningkatan keamanan, mutu, dan kepatuhan produk yang beredar di masyarakat.



Gambar 3
Penghargaan UPT BPOM dengan persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat tertinggi ke-2 Balai POM di Batam

Selain itu, pada triwulan II Balai POM di Batam mendapatkan penghargaan sebagai juara ketiga di bidang pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025 yang diberikan oleh Kepala Badan POM RI. Penghargaan sebagai Juara III Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025 yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menunjukkan

komitmen, konsistensi, dan profesionalisme dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan tata kelola aset negara yang baik serta menjadi bentuk pengakuan atas kinerja yang mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.



Gambar 4
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Sebagai Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal Tingkat Provinsi - Balai POM di Batam

Tim Penyusun Laporan Kinerja Triwulan II TA 2026

Koordinator : Kepala Balai POM di Batam
Ketua : Ratno Nugroho, SE
Sekretaris : Dormina Bethesda Lusiana Hutasoit, S.E.
Anggota : Mahfudziyah Shahifah, S.Farm, Apt
Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.
Ruth Deseyanti Purba, S.Si,Apt
Shinta Putri Wisuda, S.Farm, Apt
Duanda Oktora, S.Farm, Apt
Indah Rosdiana, S.Si
Ana Fitri, S.Si
Rizki Indriyani, S.Farm,Apt
Riki Gusnawan, S.H
Rico Eka Putra, SH
Dian Maria Fitria, STP
Bintang Rumiris Christiyani, S.K.M
Merytasari, S.Farm
Febrina Anjar Laxmi Safitri, S.Si
Refniwita, S.K.M
Fitria, S.Sos, M.Soc.Sc
Muhammad Nurhisyam Kurnadi, S.K.M.
M Harvito Adhitama, A.Md.Ak.
Syukur Ahmad Rizal, S.M
Anisa Wisdatika, S.Farm, Apt

Ringkasan Eksekutif

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam terus berkomitmen mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif dalam rangka melindungi masyarakat serta mendukung iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang berada di wilayah perbatasan, Balai POM di Batam menghadapi tantangan berupa tingginya mobilitas barang dan manusia, perkembangan perdagangan lintas negara, serta karakteristik wilayah kepulauan yang memerlukan strategi pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan secara umum berjalan sesuai rencana. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Balai POM di Batam memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,68 dengan kategori Istimewa, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh optimalisasi pengawasan pre-market dan post-market, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha, penguatan laboratorium, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, evaluasi pelaksanaan kinerja masih menunjukkan adanya beberapa indikator yang memerlukan percepatan penyelesaian pada Semester II Tahun 2026. Berbagai kendala, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, akan menjadi fokus perbaikan melalui penguatan monitoring dan evaluasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan rencana aksi secara lebih efektif.

Balai POM di Batam akan terus memperkuat budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, tata kelola yang akuntabel, serta inovasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan agar seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan masyarakat serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Balai POM di Batam menunjukkan kinerja yang efisien dan akuntabel. Meskipun terdapat penyesuaian pagu anggaran pada awal tahun, pelaksanaan anggaran tetap berjalan dengan baik. Realisasi anggaran hingga Triwulan II mencapai 60,83%, yang menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tingkat efisiensi penggunaan anggaran juga berada pada kategori baik, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 55,05% dari target juga menunjukkan kinerja layanan yang produktif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Rata-rata Capaian Indikator kinerja	%Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi =((1/2)-1)/1	Capaian Efisiensi
1	2	3	4
105.20	103.32	0.02	100% (Efisien)

Tabel 1
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Balai POM di Batam telah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan. Hal ini tergambarkan dari perhitungan tingkat efisiensi anggaran triwulan II, mencapai nilai 0.02, dan termasuk dalam kategori efisien (100%).

Secara keseluruhan, kinerja Balai POM di Batam pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan organisasi yang berkinerja tinggi, adaptif, dan berintegritas, serta mampu merespons tantangan pengawasan secara

efektif. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.

Ke depan, diperlukan penguatan pada indikator yang belum optimal, percepatan pelaksanaan program yang belum terealisasi, serta peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan. Selain itu, penguatan pengawasan berbasis risiko dan peningkatan sinergi dengan stakeholder menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan capaian kinerja serta meningkatkan perlindungan masyarakat di bidang Obat dan Makanan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah berkewajiban menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen yang memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja menjadi salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian sasaran strategis dan pemanfaatan sumber daya yang dikelola, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Wilayah kerja tersebut memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh wilayah kepulauan, berbatasan langsung dengan negara tetangga, serta berada pada jalur perdagangan internasional yang memiliki mobilitas barang dan manusia sangat tinggi. Kondisi tersebut menjadikan Balai POM di Batam memiliki peran yang strategis sekaligus tantangan yang lebih kompleks dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

Selain tingginya arus perdagangan dan distribusi produk, perkembangan perdagangan berbasis digital, peningkatan aktivitas industri dan UMKM, serta kemudahan akses lintas wilayah turut meningkatkan kompleksitas pengawasan. Di sisi lain, karakteristik wilayah kepulauan juga menghadirkan tantangan berupa keterbatasan akses menuju pulau-pulau

terluar, kebutuhan koordinasi lintas instansi yang lebih intensif, serta perlunya strategi pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga penguatan pengawasan pre-market dan post-market, pengujian laboratorium, sertifikasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja Balai POM di Batam Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini menyajikan capaian sasaran strategis, indikator kinerja, realisasi anggaran, analisis faktor pendukung dan penghambat, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan untuk memastikan pencapaian target kinerja pada akhir Tahun 2026.

Dengan demikian, Laporan Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja yang mendukung pengambilan keputusan, peningkatan efektivitas organisasi, serta perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang efektif.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM melalui Deputi yang membidangi pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai POM di Batam mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja yang meliputi Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Wilayah kerja Balai POM di Batam berada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik geografis unik, dengan sebagian besar wilayah berupa lautan serta terdiri atas gugusan pulau-pulau yang tersebar. Posisi

strategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan, investasi, pariwisata, dan lalu lintas barang internasional. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko masuk dan beredarnya obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain sebagai kawasan perdagangan dan jasa, wilayah kerja Balai POM di Batam juga memiliki perkembangan industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor distribusi yang cukup pesat. Perkembangan tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan pelayanan publik di bidang registrasi, sertifikasi, pembinaan, pengawasan, serta komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas Balai POM di Batam tidak hanya berorientasi pada penegakan regulasi, tetapi juga pada pembinaan kepatuhan, penguatan daya saing pelaku usaha, dan perlindungan masyarakat melalui pendekatan pengawasan yang berbasis risiko.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai POM di Batam didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, laboratorium pengujian yang terakreditasi, sarana dan prasarana pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis organisasi. Sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi profesi, media massa, pelaku usaha, dan masyarakat terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pengawasan terpadu guna meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Dengan karakteristik wilayah dan kompleksitas tantangan tersebut, Balai POM di Batam terus mengembangkan tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, dan akuntabel melalui penguatan budaya kinerja, inovasi pelayanan publik, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis Badan POM sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Balai POM di Batam

Berdasarkan Tipologinya Balai POM di Batam merupakan Balai POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh *(sampling)* Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam mempunyai peran strategis sebagai garda terdepan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat dari risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Peran tersebut menjadi semakin penting mengingat karakteristik wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, berada pada jalur perdagangan internasional, serta memiliki mobilitas barang dan manusia yang sangat tinggi.

Sebagai wilayah kepulauan yang didominasi oleh kawasan perairan, pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Batam menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah daratan. Luasnya cakupan wilayah pengawasan, keterpisahan antar pulau, keterbatasan akses transportasi menuju wilayah terluar, serta tingginya aktivitas perdagangan dan distribusi meningkatkan risiko masuk dan beredarnya produk ilegal maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan. Kondisi tersebut menuntut pelaksanaan pengawasan yang adaptif, terintegrasi, berbasis risiko, serta didukung oleh koordinasi lintas sektor yang kuat.

Di sisi lain, perkembangan industri, perdagangan elektronik (e-commerce), pertumbuhan UMKM, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan penggunaan obat yang rasional menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Balai POM di Batam. Oleh karena itu, strategi pengawasan tidak hanya difokuskan pada pengawasan pre-market dan post-market, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui pembinaan, pendampingan, sertifikasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan POM, Balai POM di Batam terus memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui optimalisasi pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian laboratorium, intelijen dan penindakan, pengawasan siber, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, akademisi, media, organisasi profesi, dan masyarakat terus diperkuat sebagai implementasi pendekatan kolaboratif dalam sistem pengawasan obat dan makanan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Balai POM di Batam tidak hanya diukur dari tercapainya target indikator kinerja, tetapi juga dari meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta terwujudnya perlindungan masyarakat melalui tersedianya obat dan makanan yang aman, berkhasiat/manfaat, dan bermutu. Oleh karena itu, seluruh sumber daya organisasi diarahkan untuk menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, inovatif, dan akuntabel guna mendukung pencapaian visi dan sasaran strategis Badan POM.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Balai POM di Batam

Jumlah ASN Balai POM di Batam per 30 Juni 2026 sebanyak 68 pegawai yang terdiri 58 PNS dan 10 PPPK dari jumlah kebutuhan sebanyak 103 pegawai atau dengan persentase pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 66.02%. Berdasarkan jenis jabatan, pemenuhan kebutuhan pegawai Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional / Struktural	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Jabatan Struktural	2	2	0	100%
2	Jabatan Fungsional Ketatausahaan	31	8	-23	25.81%
3	Jabatan Fungsional PFM	68	56	-12	82.35%

4	Jabatan Pelaksana	2	2	0	100%
TOTAL		**103**	**70**	**-35**	**66,02%**

Tabel 1.1
Pemenuhan ABK Balai POM di Batam

Selain ABK di atas, terdapat kebutuhan 1 (satu) pegawai Pejabat Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diakomodir oleh Biro Umum Badan POM, yang saat ini belum dipenuhi di Balai POM di Batam.

Dari 68 pegawai ASN di Balai POM di Batam, didominasi oleh perempuan 49 orang (72,1%), diikuti dengan laki - laki sebanyak 19 orang (27,9%). Adapun jenjang pendidikan pegawai BPOM Batam: dengan Strata 1, sebanyak 44 orang (64,7%), diikuti dengan pendidikan Apoteker (Profesi) sebanyak 15 orang (22,1%), dengan pendidikan D3 sebanyak 5 orang (7,4%), dan paling sedikit pegawai dengan jenjang jabatan Strata 2/Master sebanyak 4 orang (5,9%). Sebagai organisasi yang *scientific based*, pelaksanaan tugas fungsi seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam tahun-tahun ke depan.

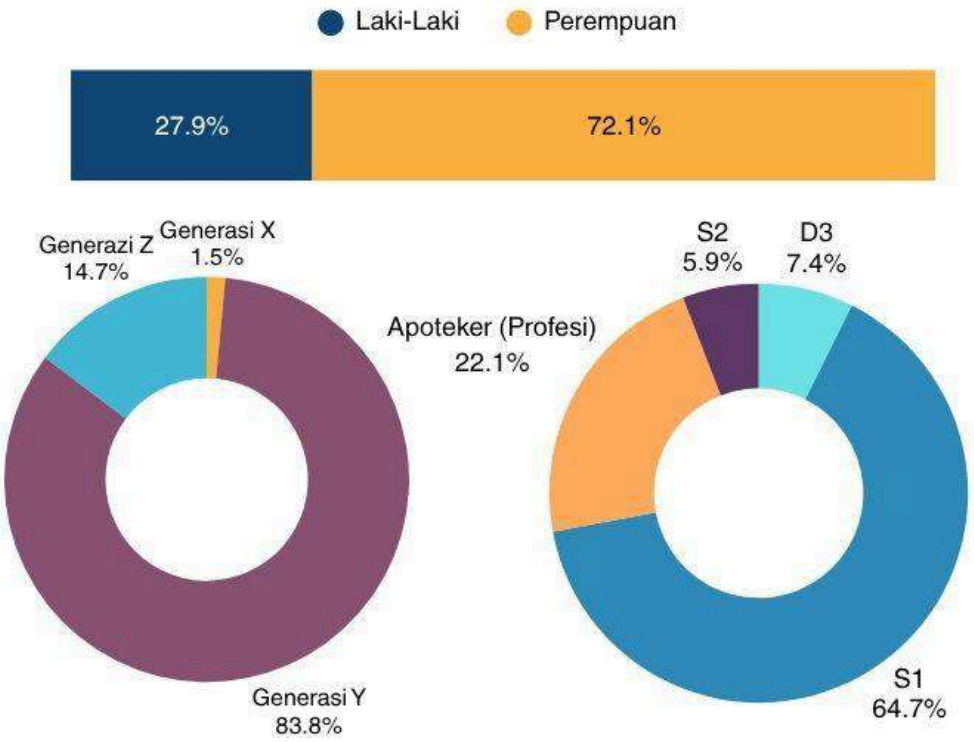

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Selain ASN, Balai POM di Batam memiliki pegawai yang berstatus alih daya /*outsourcing*. Tenaga *outsourcing* sebanyak 22 pegawai yang terdiri dari petugas keamanan sebanyak 6 pegawai, driver sebanyak 3 pegawai, administrasi sebanyak 5 pegawai, resepsionis sebanyak 2 pegawai dan cleaning service sebanyak 6 pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung

Balai POM di Batam memiliki dua gedung kantor, yaitu gedung kantor baru dan gedung kantor lama. Gedung kantor lama berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam dan untuk Gedung kantor baru berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa - Kota Batam. Gedung kantor baru Balai POM di Batam memiliki luas tanah 3.117 m2 dan luas bangunan 4.364 m^2, dan terdiri dari 3 lantai. Status kepemilikan tanah adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan

berkedudukan di Batam sesuai sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor sertifikat 32.02.05.02.4.00022 tanggal 21 Juni 2019.

Gedung kantor lama Balai POM di Batam, saat ini difungsikan sebagai gudang barang bukti dengan luas tanah 3000 m^2 dan luas gedung 200 m^2 yang terdiri atas 1 lantai. Status tanah adalah Hak Pakai sesuai sertifikat tanah Nomor 32.02.05.01.4.00010 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam.

Selain kedua bidang tanah di atas, berdasarkan surat Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor B-3643/A3-A3.4/LH.01.00/11/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pemberitahuan, Balai POM di Batam mendapatkan penambahan lahan seluas 2598.71 m^2 dan pada bulan Mei 2021 telah diterbitkan sertifikat lahan tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Jakarta dengan nomor sertifikat 32.02.05.01.4.00018.

Sumber Listrik dan Air

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 197 KVA dan 4,4 KVA untuk penerangan jalan di gedung kantor. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 275 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Sumber Air Balai POM di Batam berasal dari ABH yaitu Air Batam Hilir dengan rentang jumlah pemakaian 100-200 m . Balai POM di Batam memiliki 3 Reservoir Air untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dan gangguan massal dalam penyediaan air bersih.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Balai POM di Batam didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0778) 761543/761490, faksimile di nomor (0778) 761398, email

di bpom_batam@pom.go.id atau pom.batam@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (bpom.batam), X (@BPOM_Batam), Youtube dan Facebook (BPOM Batam).

Kendaraan

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas sebanyak 11 unit, dengan 2 unit kendaraan roda empat dalam rusak berat, serta 9 unit ke dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 3 unit kendaraan roda empat operasional, 2 unit sepeda motor operasional, 2 unit mobil laboratorium keliling, 1 unit mobil penindakan, dan 1 unit mobil incinerator.

3. Anggaran

Pagu anggaran pada DIPA Balai POM di Batam tahun anggaran 2026 sebesar **Rp16.931.289.000,-.** Pagu yang masuk dalam blokir sebesar Rp173.069.000,- sehingga pagu netto sebesar Rp16.758.220.000,-. Keseluruhan pagu terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp15.576.389.000,- dan PNBP sebesar Rp1.354.900.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 92,00% dari jumlah anggaran dan anggaran PNBP sebesar 8,00% dari jumlah anggaran. Realisasi anggaran sampai 30 Juni 2026 sebesar Rp10.298.553.257,- atau 60,83% dari pagu total, dan 61,45% dari pagu setelah dikurangi blokir. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Balai POM di Batam sebesar Rp1.645.330.000,-. Adapun realisasi PNBP sampai tahun 30 Juni 2026 sebesar Rp905.729.982,-, atau mencapai 55,05% dari target penerimaan, terdiri dari penerimaan jasa sertifikasi sebanyak Rp694.900.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp210.829.982,-.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 1.2
Wilayah kerja Balai POM Batam

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 dan merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 70 Kecamatan, 275 Desa dan 141 Kelurahan dengan jumlah 2.408 pulau di mana 40% belum memiliki nama dan belum berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 km^2, 95% merupakan lautan dan hanya 5% yang merupakan wilayah daratan.

Untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, telah dibangun Loka POM sehingga tidak menjadi wilayah kerja Balai POM di Batam lagi. Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Batam ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi

laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor POM di Batam, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Karimun dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kab.Karimun ditempuh dengan transportasi laut selama ± 2 jam, Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 5 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama ± 1,5 jam.

Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil di mana letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah **Timur** berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat
- Arah **Barat** berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Arah **Utara** berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Arah **Selatan** berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Jumlah Sarana Pengawasan menurut Kabupaten / Kota

Sasaran pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam mencakup berbagai jenis sarana yang tersebar di seluruh wilayah kerja, meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, serta sarana pelayanan kefarmasian dan pelayanan kesehatan. Secara kuantitatif, jumlah sarana yang diawasi mencapai sekitar 3.466 sarana produksi dan 3.811 sarana distribusi.

Untuk wilayah Kepulauan Riau tidak terdapat Industri Farmasi, Fasilitas Bahan Baku Obat, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA), Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan. Sarana Produksi sediaan farmasi

dan pangan olahan yang berada wilayah kerja Balai POM di Batam terdiri dari Unit Transfusi Darah (UTD) sebanyak 6 sarana, Usaha Kecil Obat Tradisional sebanyak 1 sarana, industri kosmetik 5 sarana, industri pangan sebanyak 72 sarana dan Pangan (IRTP) mencapai 3.382 unit.

Sedangkan Untuk Sarana Distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan terdiri dari terdapat 31 sarana Pedagang Besar Farmasi, 345 sarana Apotek, 68 sarana Toko Obat, 6 sarana Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 31 sarana Rumah Sakit (RS), 66 Puskesmas, 170 klinik, 480 sarana Fasilitas Distribusi Obat Tradisional dan obat kuasi, 524 sarana suplemen kesehatan, 221 Fasilitas Distribusi Kosmetik, dan 1869 Fasilitas Distribusi Pangan Olahan.

Sarana Produksi	Jumlah	Persentase
Unit Transfusi Darah	6	0.17
UKOT	1	0.03
Industri Kosmetik	5	0.14
Industri Pangan	72	2.08
IRTP	3.382	97.58
Jumlah	***3.466***	***100.00***

Tabel 1.2
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2026

Selain itu, tidak adanya industri farmasi skala besar memperkuat bahwa sumber risiko utama berasal dari jalur distribusi, termasuk potensi masuknya produk dari luar wilayah maupun luar negeri. Kondisi ini semakin kompleks dengan karakteristik wilayah kepulauan yang menyebabkan sebaran sarana pengawasan tidak merata dan sulit dijangkau secara simultan

Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Persentase
Pedagang Besar Farmasi (PBF)	31	1,88
Apotek	345	13,85

Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Persentase
Toko Obat	68	1.98
Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	6	0.17
Rumah Sakit (RS)	31	0.90
Puskesmas	66	1.92
Klinik	170	4.95
Fasilitas Distribusi Obat Tradisional dan Obat Kuasi	480	13.97
Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	524	15.25
Fasilitas Distribusi Kosmetik	221	6.43
Sarana Peredaran Pangan Olahan	1869	54.41
Jumlah	**3.435**	**100**

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

1.6 ISU STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi secara berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi. Aspek strategis tersebut mencerminkan kondisi internal dan eksternal organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja dan pencapaian visi-misi. Berbagai permasalahan utama yang muncul menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan dan strategi pengembangan organisasi ke depan. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis isu-isu strategis dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada hasil pemetaan lingkungan strategis yang dikategorikan ke dalam kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats).

Kekuatan

KEKUATAN

1) **SDM Balai POM di Batam kompeten, profesional dan kreatif dengan pengalaman teknis serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi**

Salah satu kekuatan Balai POM di Batam terletak pada sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan kreatif. SDM Balai POM di Batam memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman teknis, serta spesialisasi jabatan yang sesuai dengan fungsi dan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Setiap pegawai dibekali dengan keahlian yang relevan, baik dalam bidang pemeriksaan laboratorium, inspeksi sarana produksi dan distribusi, maupun pelayanan publik dan penegakan regulasi.

Pada tahun 2026, Balai POM di Batam diperkuat oleh ASN sebanyak 68 pegawai yang terdiri dari 58 PNS dan 10 PPPK. Dari 68 pegawai Balai POM di Batam, 2 pegawai merupakan struktural yaitu Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Terdapat 56 pegawai berfungsi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang terbagi kedalam fungsi penindakan sebanyak 6 pegawai, fungsi penyuluhan 7 pegawai, fungsi pengujian sebanyak 25 pegawai dan fungsi pemeriksaan 18 pegawai.

Selain fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Batam memiliki pegawai dengan beberapa jabatan fungsional lainnya dan pelaksana untuk yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu:

- Penata Layanan Operasional 1 pegawai yang berfungsi pelaksana kegiatan operasional dan layanan publik, memastikan seluruh proses layanan berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar prosedur. Jabatan ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan operasional.
- Pengelola Layanan Operasional 1 pegawai yang berfungsi mengatur serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan/resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Melakukan kegiatan

pengelola bahan dan penyusunan laporan pengadaan barang atau jasa.

- Penata Laksana Barang 2 pegawai, berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan barang milik instansi, memastikan barang dikelola efisien, tercatat rapi, dan digunakan sesuai ketentuan, serta mendukung proses pelaporan dan koordinasi unit terkait.
- Pranata Komputer 1 pegawai, menjalankan fungsi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Keberadaan Pranata Komputer juga untuk meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini merupakan konsep dan kerangka kerja pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
- Analis Anggaran 1 pegawai, menjalankan peran yang menganalisis anggaran negara, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas belanja, mengendalikan risiko anggaran, serta memberi rekomendasi perbaikan. Selain itu, fungsional ini bertanggung jawab atas pengolahan data transaksi keuangan, rekonsiliasi laporan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi hasil analisis untuk mendukung keputusan kebijakan anggaran. Saat ini analis anggaran juga menjabat sebagai pejabat pengelola anggaran belanja pegawai.
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN 1 pegawai, menjalankan peran dan fungsi analisis menyeluruh terhadap perikatan anggaran, penyelesaian tagihan, dan perintah pembayaran, sambil mengolah data transaksi dan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan instansi serta melakukan monitoring dan evaluasi anggaran. Saat ini analis pengelolaan Keuangan APBN Balai POM di Batam menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyusun laporan keuangan.
- Perencana 1 pegawai, yang memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan program dan anggaran, analisis kebijakan, pengendalian capaian kinerja, serta integrasi perencanaan berbasis

risiko. Peran perencana memperkuat sinkronisasi antara kebutuhan dalam pengawasan dan alokasi sumber daya, serta memastikan program pengawasan selaras dengan target nasional, Rencana Strategis BPOM, dan arah pembangunan kesehatan di daerah. Keberadaan perencana yang kompeten menjadi pengungkit efektivitas program pengawasan, karena mereka memastikan setiap kegiatan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur.

- Arsiparis 2 pegawai, yang menjalankan pengelolaan arsip dari setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Arsiparis mengelola semua dokumen penting, surat, atau laporan sehingga dapat membantu perencanaan dan evaluasi, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Adanya jabatan-jabatan tersebut dengan keahlian dan kompetensi yang berbeda-beda dapat melaksanakan peran-peran yang dibutuhkan organisasi dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat menghasilkan pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta menyeluruh dari tahap perencanaan, pengawasan ke lapangan, laboratorium, pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha, analisis data dan tindak lanjut atas pengawasan serta penyelesaian pelaporan.

Kompetensi tersebut diperkuat dengan sikap profesional dalam pelaksanaan tugas serta kemampuan berinovasi dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks di wilayah Batam yang memiliki karakteristik sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan internasional. Kombinasi antara keahlian teknis, pengalaman lapangan, dan kreativitas kerja menjadikan SDM Balai POM di Batam sebagai aset strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan peningkatan perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

2) **Sistem Manajemen terintegrasi yang telah tersertifikasi dan terakreditasi**

Balai POM di Batam memiliki Sistem Manajemen Terintegrasi yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Sistem ini telah tersertifikasi dan terakreditasi melalui empat standar internasional, yaitu ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Penerapan keempat standar tersebut mencerminkan komitmen Balai POM di Batam terhadap mutu layanan, akurasi hasil pengujian, keselamatan kerja, dan integritas organisasi. Melalui sistem manajemen yang terintegrasi ini, seluruh proses kerja dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas Balai POM di Batam sebagai institusi pengawasan yang unggul dan berstandar internasional.

3) **Balai POM di Batam memiliki kerja sama lintas sektor yang aktif**

Kewenangan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak hanya berada di Balai POM di Batam namun juga terkait dengan mandat dan fungsi instansi lain seperti bea cukai, kepolisian, pemerintah daerah dan kejaksaan. Hal tersebut membuat kerjasama lintas sektor menjadi kekuatan yang strategis untuk melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selama ini banyak kolaborasi yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Batam dengan lintas sektor diantaranya adalah:

1) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau: Koordinasi berkas perkara yang ditangani PPNS; SPDP, P16 terkait penentuan JPU, Tahap 1, P19, P21, Tahap 2. Kolaborasi Balai POM di Batam dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bertujuan untuk memperkuat efektivitas penanganan perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM. Melalui koordinasi yang intensif, kedua institusi memastikan penyampaian dan tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(SPDP) dilakukan tepat waktu, serta penunjukan Jaksa Penuntut Umum melalui penerbitan P-16 dapat berjalan transparan dan terkoordinasi. Kerja sama ini juga mencakup proses penelitian berkas perkara pada Tahap I, penyesuaian berdasarkan petunjuk P-19, hingga kelengkapan formil dan materiil yang ditandai dengan diterbitkannya P-21. Selanjutnya, sinergi diteruskan dalam pelaksanaan Tahap II, yaitu serah terima tersangka dan barang bukti kepada JPU. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara PPNS Balai POM dan Kejaksaan Tinggi Kepri mampu memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur serta mendukung proses penegakan hukum yang lebih efektif dan akuntabel.

2) Badan Narkotika Nasional (BNN): Sinergi mensukseskan program P4GN di lingkungan kerja Balai POM di Batam. Kolaborasi antara Balai POM di Batam dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan komitmen dan dukungan bersama terhadap Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Psikotropika (P4GN) di lingkungan Kantor Balai POM di Batam. Sinergi ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi serta kegiatan edukasi yang sejalan dengan strategi nasional P4GN. Balai POM di Batam memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari narkoba dan meningkatkan kewaspadaan serta integritas staf dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang juga mencakup pengawasan narkotika. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran kedua institusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mendukung tindakan penegakan hukum yang lebih efektif.

3) Sejak tahun 2019, Balai POM di Batam telah menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan (TKPPOM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui forum koordinasi ini, Balai POM di Batam dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Setiap tahunnya, Balai POM di Batam rutin melaksanakan pengawasan dan pembinaan sarana baik produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan

olahan. Pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan tersebut berkontribusi pada meningkatnya efektivitas tindak lanjut, karena temuan pengawasan dapat segera ditangani oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

4) Tim Percepatan Pencegahan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi / Kabupaten/Kota: Kolaborasi lain yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Batam adalah Tim percepatan Pencegahan Stunting. Tim ini berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemeriksaan terpadu ke sarana produksi pangan fortifikasi. Pangan fortifikasi adalah penambahan satu atau lebih nutrisi esensial ke makanan pokok atau produk yang umum dikonsumsi masyarakat untuk mencegah defisiensi gizi. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kandungan gizi tambahan pada produk pangan yang beredar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini juga diperkuat dengan pengujian laboratorium sampel pangan fortifikasi oleh Laboratorium Balai POM di Batam.
5) SAKA POM: Kolaborasi dengan Gerakan Pramuka sejak Tahun 2019. Saat ini Balai POM di Batam sudah memiliki Satuan Karya Gerakan Pramuka yang ada di tingkat Kwarda Kepri, Kwarcab Batam, Karimun dan Natuna. Dalam kegiatan ini, Balai POM di Batam membekali anggota pramuka dengan pengetahuan dasar tentang sediaan farmasi dan pangan olahan, melatih keterampilan pemeriksaan, pengawasan, dan edukasi keamanan pangan dan sediaan farmasi di lingkungan sekitar, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya mengkonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu serta membentuk kader muda yang dapat mendukung program pemerintah di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan hal tersebut pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyebaran edukasi dan informasi dapat dilaksanakan lebih luas sehingga perlindungan bagi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko dapat terus ditingkatkan.

6) Akademisi (Kampus): Batam Tourism Polytechnic (BTP) dalam pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa dalam program pengawasan obat dan makanan. Universitas Batam (UNIBA) terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Universitas Terbuka (UT) terkait Pemberdayaan dan Pengembangan mahasiswa Dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan. STIKES Mitra Bunda terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
7) Media Cetak dan Media Online. Kerjasama Balai POM di Batam dengan media bertujuan untuk memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat. Kegiatan Balai POM di Batam bersama media dapat berupa press release terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyebaran informasi. Dengan kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah melalui banyak pilihan media.
8) Fasilitator Keamanan Pangan Nasional: Fasilitator Keamanan Pangan Nasional BPOM adalah individu (terutama mahasiswa) yang dibekali pengetahuan dan keterampilan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi keamanan pangan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) olahan pangan. Program ini, yang salah satunya melalui inisiatif Sapa Kampus (sebelumnya Pangan Aman Goes to Campus/PAGC), bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk olahan pangan agar aman, bermutu, dan berdaya saing, serta untuk mencetak wirausahawan dan tenaga kerja yang kompeten di bidang keamanan pangan. Melakukan penyuluhan Keamanan Pangan kepada pelaku UMKM.
9) Kepolisian: Kepolisian sebagai Koordinator Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Korwas PPNS mengkoordinasikan dan mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM dalam menegakkan hukum terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi penegakan hukum dan mempercepat

penanganan kasus terkait sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal.

10) Bea Cukai: Koordinasi Lintas Sektor Criminal Justice System (CJS) sebagai bentuk tindak lanjut pemasukan obat ilegal melalui jasa titipan. Ada berbagai tantangan dalam pengawasan pemasukan obat dan makanan di lapangan, baik untuk keperluan personal used maupun non-personal used. Terlebih keduanya termasuk dalam barang-barang yang impornya dilarang atau dibatasi. Barang larangan dan pembatasan (lartas) adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor ke dan dari daerah pabean. Barang lartas diawasi ketat oleh pemerintah dan memerlukan izin khusus untuk perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, seperti industri dalam negeri, melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya, menjaga kesehatan, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Tujuan utama dari kolaborasi lintas sektor ini adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, termasuk obat-obatan terlarang yang seringkali diselundupkan melalui modus operandi jasa titipan.

4) Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

BPOM di Batam telah menjalankan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi lintas fungsi. Dengan penerapan kedua hal tersebut, perencanaan dan evaluasi kinerja dilakukan dengan terukur, inklusif, serta berkelanjutan untuk mendorong perbaikan dan efektivitas organisasi secara terus-menerus. Reformasi Balai POM di Batam tahun 2025 mendapatkan nilai 86,64 (A), sedangkan SAKIP mendapatkan nilai 76,43 (BB). Kedua nilai tersebut mencerminkan Balai POM di Batam mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, melaksanakan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat serta menjalankan kegiatan dengan akuntabilitas dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kekuatan ini dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan pencapaian visi, misi organisasi

serta harapan dari masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data Kinerja sehingga dapat meningkatkan profesionalisme serta kepercayaan publik.

Manfaat bagi masyarakat dengan penerapan reformasi birokrasi adalah mendapatkan layanan publik yang lebih mudah diakses, lebih cepat, dan minim prosedur yang berbelit-belit. Untuk mencapai hal tersebut Balai POM di Batam telah menciptakan dan menjalankan inovasi dalam menyelenggarakan layanan publik. Inovasi-inovasi yang dimaksud adalah Desktop UMKM (Desk Percepatan Pendampingan by Zoom on the PC UMKM), Perpus Online Balai POM di Batam, SIPANDAN SKI/SKE (Sigap dan Siap dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE), Kafe Kita (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Komunitas Disabilitas), Website Sistem Informasi Cek Label Pangan Olahan, PESAN (Percepatan Pengujian Sampel Narkotika) dan Esensi BPOM melalui channel youtube (Edukasi Seru dan Berisi Bersama Balai POM di Batam).

Dalam menjalankan reformasi birokrasi Balai POM di Batam juga membentuk agent of change (AOC) yang berperan mendorong perubahan. Setiap AOC yang ditunjuk menciptakan inovasi masing-masing dan secara terus-menerus menginternalisasi ke dalam organisasi mengenai reformasi birokrasi dan core value ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dengan penerapan reformasi birokrasi yang konsisten pelaksanaan kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif, akuntabel dan terkini.

5) **Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel**

Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui prosedur yang jelas dan terdokumentasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, hingga evaluasi dan pelaporan hasil pengadaan. Mekanisme

ini memastikan proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan, meminimalkan risiko penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan tata kelola pengadaan yang baik, Balai POM di Batam mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan integritas organisasi.

Mulai tahun 2023 Balai POM di Batam telah mengukur kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan indikator Kinerja "Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa". Realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2023 sebesar 93.05, pada tahun 2024 sebesar 95.00, dan dapat dipertahankan dengan nilai yang sama pada tahun 2025. Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%). Indikator ini mendorong terciptanya perencanaan pengadaan yang lebih rinci dan menyeluruh serta terkoordinasi. Pengumuman RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang cepat dan tepat waktu memastikan proses pengadaan dapat dimulai sesuai jadwal, meningkatkan transparansi publik dan sebagai informasi bagi penyedia barang/jasa untuk mempersiapkan sehingga terciptanya persaingan sehat, efisien dan barang/jasa sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%). Indikator ini mendorong penggunaan metode pemilihan penyedia yang kompetitif dan terdigitalisasi. E-Tendering adalah metode standar untuk pengadaan yang membuka persaingan pasar yang luas. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran pada proses lelang, menghindari interaksi tatap muka untuk meminimalisir risiko KKN, serta memastikan proses yang lebih adil dan akuntabel serta transparan.

- Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%). Indikator ini mendorong untuk mempercepat penyerapan anggaran dan penyelesaian pekerjaan, terutama untuk barang dan jasa yang sudah tersedia di katalog elektronik (e-katalog). Metode ini juga mendorong pencatatan pengadaan agar data untuk monitoring dan evaluasi dapat diperoleh.
- Persentase penerapan proses non E- Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot5%). Indikator ini mendorong pencatatan dan pelaporan seluruh metode pengadaan secara elektronik. Ini mencakup metode seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau metode lain di luar e-tendering dan e-purchasing. Tujuannya adalah memastikan bahwa *semua* proses pengadaan melalui semua metode tetap dicatat dalam sistem elektronik (SPSE) sebagai akuntabilitas, audit, dan transparansi data secara menyeluruh.
- Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%). Aspek ini mendorong digitalisasi penuh siklus pengadaan, hingga tahap pengelolaan kontrak. Dengan adanya e-kontrak, semua dokumen kontrak, addendum, dan laporan realisasi terekam secara digital di dalam SPSE. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pekerjaan, memudahkan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan atau auditor, serta memastikan manajemen kontrak yang lebih tertib dan terstruktur.

6) Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mendukung seluruh kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses pengawasan menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan cepat, serta memudahkan koordinasi lintas unit kerja dan instansi terkait. Penggunaan TI juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan, mempercepat pengambilan

keputusan, dan memungkinkan Balai POM di Batam memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat serta pelaku usaha.

Pemanfaatan Teknologi Informasi ini telah menjadi komitmen tidak hanya Balai POM di Batam namun juga Badan POM secara menyeluruh. Pemanfaatan ini mencakup:

- Pemutakhiran dan penggunaan data informasi pada Dashboard BCC. Dashboard BCC berisikan hasil dari pemeriksaan sarana produksi, distribusi, peta rawan kasus, kejadian keracunan dan lainnya. Pemanfaatan ini membantu pembuatan keputusan secara cepat dan akurat berdasarkan data
- penggunaan email corporate, yang mana penggunaan dimaksudkan untuk menjaga keamanan data dan informasi.
- Berita aktual yang dipublikasi melalui subsite. Hal ini bertujuan untuk memastikan UPT selalu memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dengan cepat dan jangkauan luas.
- Sharing folder adalah dimana informasi-informasi teknis dapat diakses oleh petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
- Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer). Memfasilitasi pelaporan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan ke BPOM terkait keracunan pangan atau kejadian luar biasa (KLB) keracunan. Membantu BPOM dalam monitoring, evaluasi, pengambilan keputusan, dan deteksi dini kejadian keracunan
- Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). SIPT aplikasi untuk mencatat dan mengirim data hasil inspeksi, pengujian, temuan pelanggaran, dan laporan post-market.

Hal ini menunjukkan komitmen dan penerapan pengelolaan data dan informasi secara digital telah dilakukan sesuai yang dipersyaratkan meliputi ketersediaan, pemutakhiran, konsistensi, serta pemanfaatan data dan informasi dalam mendukung proses kerja organisasi.

7) BPOM memiliki Kewenangan, regulasi dan otoritas di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai POM di Batam memiliki kewenangan, regulasi, dan otoritas yang jelas di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang menjadi salah satu kekuatan strategis dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan masyarakat. Kewenangan ini mencakup pengujian laboratorium, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan, serta rekomendasi yang berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan. Dukungan regulasi yang memadai dan otoritas yang diakui secara nasional memungkinkan Balai POM di Batam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, konsisten, dan akuntabel. Dengan landasan kewenangan dan regulasi yang kuat, Balai POM di Batam mampu melaksanakan tugasnya dalam memastikan bahwa seluruh sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama yang menjadi landasan hukumnya. Regulasi-regulasi tersebut meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini merupakan landasan umum yang mencakup aspek kesehatan, termasuk di dalamnya mengenai sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, yang memberikan kewenangan pengawasan kepada institusi terkait, dalam hal ini BPOM.
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU ini juga memiliki implikasi terhadap pengawasan obat dan makanan, terutama terkait peredaran dan perdagangan produk di pasar, baik domestik maupun impor.
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengatur secara spesifik mengenai keamanan pangan, termasuk pengawasan mutu dan keamanan pangan olahan
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini adalah regulasi paling krusial yang secara spesifik mengatur tentang pembentukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan POM

sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Perpres ini menjadi dasar hukum operasional Badan POM

8) **Balai POM di Batam memiliki laboratorium terakreditasi dan menjadi satu-satunya laboratorium rujukan pengujian sampel Narkotika di Provinsi Kepulauan Riau**

Balai POM di Batam memiliki laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 yang diperoleh dari Komite Akreditasi Nasional/Badan Standardisasi Nasional (KAN/BSN). Akreditasi ini membuktikan beberapa hal yaitu:

- Laboratorium pengujian Balai POM di Batam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium yang kuat dan handal mencakup manajemen dokumen, penanganan sampel, ketertelusuran pengukuran, validasi metode, hingga evaluasi ketidakpastian pengukuran.
- Pengendalian mutu laboratorium dalam pelaksanaan prosedur pengujian telah dievaluasi oleh lembaga akreditasi yang independen.
- Laboratorium Balai POM di Batam memiliki kompetensi teknis yang diakui secara internasional

  Artinya kompetensi personil, metode pengujian, peralatan, dan proses kerja memenuhi standar global untuk melakukan pengujian dengan benar.
- Hasil dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan
- Karena ISO 17025 berada di bawah kerangka international mutual recognition, sehingga hasil uji/kalibrasi dari lab tersebut dapat diterima di negara lain.

Laboratorium Balai POM di Batam dilengkapi dengan peralatan modern dan dijalankan oleh tenaga teknis yang kompeten, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keunggulan yang dimiliki, laboratorium Balai POM di Batam juga dipercaya untuk melaksanakan pengujian sampel atas permintaan

pihak ketiga (masyarakat, swasta dan instansi pemerintah). Pengujian sampel pihak ketiga termasuk sampel narkotika. Permintaan pengujian sampel narkotika datang dari Polda Kepri, beberapa Polres di Kepri, beberapa polsek di Kepri, BNN dan Komando Daerah Angkatan Laut. Di Provinsi Kepulauan Riau, Laboratorium Balai POM di Batam merupakan satu-satunya laboratorium yang menerima dan memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian sampel narkotika.

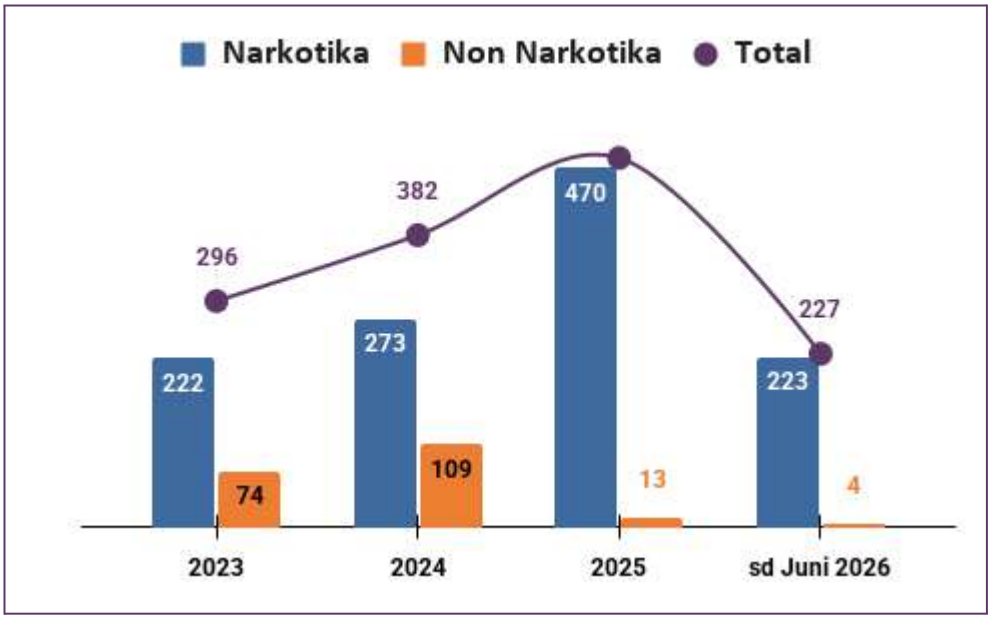

Grafik 1.2
Jumlah Sampel Pihak Ketiga Yang Diuji

Seperti pada tabel diatas, dalam tiga tahun terakhir jumlah sampel pihak ketiga yang diuji terus meningkat, dengan tendensi pada tahun 2026 akan terus meningkat. Peningkatan yang signifikan diutamakan dari pengujian sampel narkotika, yang diuji dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Dalam mendukung penegakan hukum, Balai POM di Batam menciptakan inovasi yaitu Percepatan Pengujian Sampel Narkotika (PESAN) dimana percepatan pengujian yang semula 3 hari kerja menjadi 2 hari kerja. Inovasi ini bertujuan untuk mendukung penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di area provinsi Kepulauan Riau cepat dilakukan.

Dengan kapasitas dan reputasi laboratorium yang terjamin, Balai POM di Batam dapat memastikan kualitas dan keamanan produk yang beredar, sekaligus memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik

terhadap pengawasan Sediaan Farmasi dan Produk Olahan di wilayah kerja.

9) Pelayanan publik yang prima

Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan cepat, tepat, akurat, ramah, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuannya agar masyarakat merasa puas, dihargai, dan mendapatkan haknya secara adil. Indek pelayanan publik Balai POM di Batam masuk dalam kategori pelayanan prima yaitu 4.84. Nilai tersebut didapat dari penilaian pada tahun 2024 terhadap 6 aspek yaitu yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

- Dari aspek kebijakan pelayanan

  Standar Pelayanan (SP) adalah acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas dan komponen standar pelayanan publik yang berlaku. Pelayanan publik yang dilakukan penilaian adalah yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat. Balai POM di Batam telah menyusun Kebijakan Pelayanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam tentang Standar Pelayanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam untuk memberikan kepastian dari Balai POM di Batam berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai POM di Batam telah melibatkan unsur masyarakat, pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa.
- Aspek Profesionalisme SDM

Pada aspek ini Balai POM di Batam sudah mendapatkan nilai maksimal dengan tersedianya dan diimplementasikannya Surat Keputusan Kepala Balai POM di Batam Nomor: B-HK.02.02.3B.07.24.160 Tahun 2024 tentang Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan dan SK Nomor B-HK.02.02.9A.9A4.01.23.196 tentang kriteria, tata cara pada penilaian pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

- Aspek Sarana Prasarana

  Balai POM di Batam telah menyediakan sarana prasarana yang inklusif untuk menjalankan pelayanan publik berupa tersedianya parkir roda dua dan roda empat yang dilakukan pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 serta parkir khusus kelompok rentan yang diberikan marka, adanya petugas parkir, pemantauan melalui CCTV di banyak titik, penitipan jaket/helm dan pelindung (kanopi/atap di parkir). Selain itu Balai POM di Batam tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib berupa kursi tunggu yang sudah ada khusus kelompok rentan dan fasilitas pendingin/sirkulasi udara dan pelengkap seperti mesin antrian, televisi, bahan bacaan, charging. Untuk toilet pengguna layanan yang layak pakai, Balai POM di Batam telah memenuhi kriteria penilaian dengan tersedianya toilet yang dipisah antara pria dan wanita, wastafel, toiletries dan air bersih serta toilet kelompok rentan. Selain itu juga sudah disediakan ruang ramah anak, ruang laktasi dan ruang tenang. Sarana prasarana yang disiapkan adalah komitmen Balai POM di Batam untuk memberikan pelayanan publik kepada siapapun.

- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

  Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Balai POM di Batam merupakan sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional (SIPPN). Sistem informasi Balai POM di Batam dapat diakses dengan mudah pada

sippn.menpan.go.id dan *batam.pom.go.id* yang menyediakan informasi terkait pelayanan. Inovasi dan digitalisasi layanan yang diberikan membuktikan layanan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan saat ini. Dimana digitalisasi layanan sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat layanan sampai ke masyarakat.

- Aspek Konsultasi dan Pengaduan

  Balai POM di Batam telah menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan yang berkualitas baik secara offline meliputi kotak saran/pengaduan, tatap muka, surat non elektronik, maupun secara elektronik melalui SMS/telepon/Aplikasi Percakapan dan SP4N LAPOR sebagai media pengaduan yang harus digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah.

- Aspek Inovasi

  Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Balai POM di Batam memiliki beberapa inovasi yang berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu;

  1. Desktop UMKM (Desk Percepatan Pendampingan by Zoom on the PC UMKM)
  2. Perpus Online Balai POM di Batam
  3. SIPANDAN SKI/SKE (Sigap dan Siap dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE)
  4. Kafe Kita (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Komunitas Disabilitas)
  5. Website Sistem Informasi Cek Label Pangan Olahan
  6. PESAN (Percepatan Pengujian Sampel Narkotika)
  7. QR Code BPOM Batam

Upaya dan keberhasilan Balai POM di Batam menyelenggarakan layanan publik memberikan masyarakat akses cepat, transparan, dan akuntabel terhadap layanan perizinan, pengaduan, serta informasi sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga meningkatkan perlindungan kesehatan, partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap Balai POM di Batam. Dengan demikian Balai

POM di Batam mampu memberikan layanan yang efektif dan efisien sekaligus mendukung tercapainya visi organisasi dalam melindungi kesehatan masyarakat.

10) BPOM Batam memiliki pengelolaan limbah yang sesuai standar

Balai POM di Batam memiliki kekuatan dalam pengelolaan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Penerapan prosedur pengelolaan limbah yang baik menjamin keselamatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat kepatuhan organisasi terhadap regulasi. Dengan pengelolaan limbah yang standar dan terkontrol, Balai POM di Batam menunjukkan komitmen terhadap praktik kerja yang bertanggung jawab, profesional, dan berkelanjutan.

Balai POM di Batam menghasilkan limbah laboratorium dari hasil pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan oleh laboratorium Balai POM di Batam. Limbah laboratorium dapat berupa limbah zat kimia yang pada umumnya bersifat toksik maupun limbah bahan biologi yang dapat membahayakan kesehatan pegawai, lingkungan serta masyarakat di sekitar laboratorium sehingga masing-masing limbah harus ditangani dengan cara yang benar sesuai dengan sifat masing-masing limbah. Dalam penanganan limbah, Balai POM di Batam memiliki instruksi kerja (IK) yang merupakan bagian dari penerapan ISO 17025:2017. Sesuai dengan sifat-sifatnya, beberapa limbah dapat langsung dibuang dengan proses yang dapat dilakukan di masing-masing laboratorium dan ada yang pemusnahannya melalui penyedia agar tidak merusak lingkungan. Dalam IK yang dimaksud, berdasarkan jenis limbah telah diatur terkait tata cara penyimpanan, penanganan serta waktu penyimpanan dan pemusnahan limbah. Pemusnahan limbah dilakukan setiap 3 bulan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki izin resmi dari yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

11) Sarana Prasarana yang Memadai

Balai POM di Batam memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Fasilitas ini mencakup kantor operasional dan laboratorium sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap memungkinkan Balai POM di Batam melaksanakan inspeksi, pengujian, dan layanan publik dengan optimal, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan kerja pegawai. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang baik, Balai POM di Batam mampu meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Balai POM di Batam memiliki bangunan permanen untuk melaksanakan kegiatan perkantoran dan laboratorium serta layanan publik. Untuk melaksanakan pengujian sampel, Balai POM di Batam memiliki laboratorium kimia dan laboratorium mikrobiologi dengan peralatan sesuai standar untuk pengujian sampel obat, suplemen kesehatan, kosmetik, obat kuasi, obat tradisional dan pangan olahan. Selain itu, Balai POM di Batam memiliki laboratorium biosafety level-2 (BSL-2) untuk menguji sampel untuk mendeteksi DNA porcine. Pengujian DNA menggunakan teknik *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk mencocokkan keberadaan DNA porcine dalam sampel produk makanan atau kemasan yang dicurigai, sebagai bagian dari fungsi pengawasan keamanan pangan dan produk yang beredar di masyarakat.

Prasarana bangunan yang dimiliki Balai POM di Batam juga sangat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif termasuk responsif gender. Balai POM di Batam melengkapi prasarana terpisah antara umum, disabilitas dan perempuan seperti tempat parkir, tempat duduk di ruang tunggu dan toilet. Selain itu, Balai POM di Batam melengkapi bangunan dengan ruang tenang, ruang ramah anak dan ruang laktasi yang memadai.

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 19700 VA serta 13200 VA untuk penerangan di gedung. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman/gangguan listrik PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 275 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 unit dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 5 unit kendaraan operasional, 2 unit mobil laboratorium keliling, 1 unit mobil penindakan, dan 1 unit mobil incinerator. Selain kendaraan roda empat Balai POM di Batam juga memiliki 2 unit kendaraan roda dua dengan kondisi baik. Kendaraan ini digunakan untuk mendukung kegiatan lapangan seperti inspeksi, audit, dan penindakan di berbagai wilayah.

12) **Pengurangan TimeLine Pengujian Yang Bertujuan Agar Tindak Lanjut Hasil Uji TMS Lebih Cepat Oleh Pusat**

Pengurangan timeline pengujian diterapkan untuk sampel obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik. Pengurangan timeline semula 30 hari kerja menjadi 25 hari kerja. Hal ini bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut hasil uji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Badan POM. Kondisi ini memungkinkan penanganan produk berisiko dapat segera dilakukan. Dengan pengurangan waktu pengujian yang efektif, Balai POM di Batam mendukung percepatan pengawasan dan meningkatkan perlindungan masyarakat.

KELEMAHAN

Dengan tujuan melakukan peningkatan Kinerja dan penguatan organisasi untuk mencapai visi dan misi Balai POM di Batam, maka sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Dengan mengetahui kelemahan, maka pengambilan keputusan dan perumusan strategi dapat dilakukan lebih akurat dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. Dengan mengetahui kelemahan, upaya-upaya perbaikan juga dapat dilakukan secara efektif.

1) **KIE belum menyeluruh di wilayah pengawasan Balai POM di Batam**

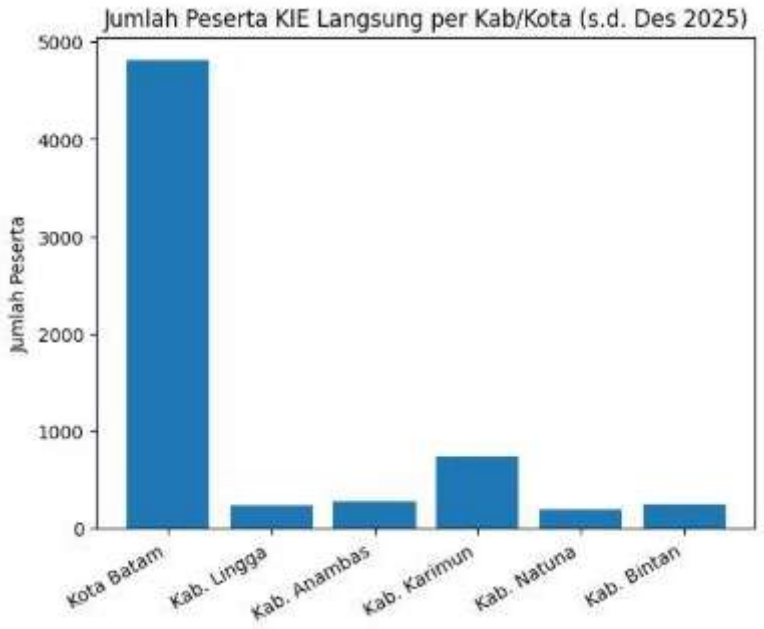

Grafik 1.3
Jumlah Peserta KIE Langsung Per Kab/Kota

Grafik di atas menunjukkan jumlah peserta KIE secara langsung yang dilaksanakan Balai POM di Batam pada periode tahun 2020 sampai dengan Desember 2025. Terlihat bahwa jumlah peserta tertinggi berada di Kota Batam sebanyak 4.809 orang, Kabupaten Karimun menempati posisi kedua dengan 736 peserta, diikuti Kabupaten Anambas sebanyak 271 peserta, Kabupaten Bintan sebanyak 246 peserta, Kabupaten Lingga sebanyak 233 peserta, dan jumlah peserta terendah berada di Kabupaten Natuna yaitu 198 peserta.

Distribusi peserta KIE antar kabupaten/kota masih belum merata, dengan dominasi yang sangat tinggi di Kota Batam dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan intervensi KIE di wilayah kepulauan guna mencapai pemerataan edukasi keamanan pangan di seluruh wilayah kerja Balai POM di Batam.

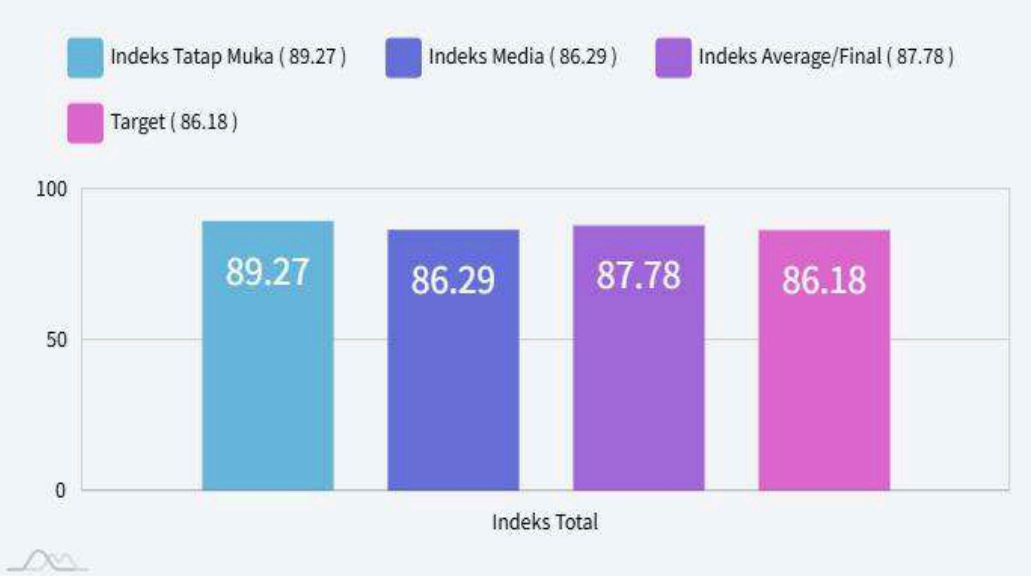

Grafik 1.4
Hasil Survei Terkait Media KIE Yang Menarik Untuk Masyarakat

Berdasarkan hasil Survei KIE Tahun 2025, pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Balai POM di Batam menunjukkan kinerja yang efektif baik melalui metode tatap muka maupun melalui media. Indeks KIE tatap muka memperoleh nilai 89,27, sedangkan indeks KIE melalui media memperoleh nilai 86,29. Nilai rata-rata indeks akhir (final) sebesar 87,78, melampaui target yang ditetapkan yaitu 86,18.

Pada KIE tatap muka, aspek dengan nilai tertinggi adalah narasumber/petugas sebesar 91,68, diikuti konten/informasi sebesar 90,85, manfaat sebesar 88,14, serta pemahaman audiens sebesar 86,40.

Sementara itu, pada KIE melalui media, aspek sumber informasi memperoleh nilai 91,16, konten/informasi sebesar 90,94, manfaat sebesar 82,21, serta pemahaman audiens sebesar 80,84.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa KIE yang dilaksanakan Balai POM di Batam telah berjalan efektif dan mampu memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Meskipun demikian, metode tatap muka masih memberikan tingkat pemahaman dan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan KIE melalui media, sehingga peningkatan

cakupan KIE langsung tetap menjadi strategi penting untuk memastikan pesan keamanan obat dan makanan dapat diterima secara optimal oleh masyarakat di seluruh wilayah pengawasan.

Perbandingan Proporsi Peserta KIE dengan Proporsi Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta KIE 2020–Des 2025	Proporsi Peserta KIE (%)	Jumlah Penduduk	Proporsi Penduduk (%)
Kota Batam	4.809	74,66	1.297.000	65,71
Kabupaten Lingga	233	3,62	103.000	5,22
Kabupaten Anambas	271	4,21	50.400	2,55
Kabupaten Karimun	736	11,42	266.000	13,48
Kabupaten Natuna	198	3,07	86.800	4,40
Kabupaten Bintan	246	3,82	170.500	8,64
Jumlah	6.493	100,00	1.973.700	100,00

Tabel 1.4
Perbandingan Proporsi Peserta KIE Dengan Proporsi Jumlah Penduduk Masing-masing Kabupaten kota

Melihat keterbatasan yang dimiliki, Balai POM di Batam terus berupaya melakukan komunikasi, edukasi dan informasi kepada seluruh masyarakat dengan berbagai macam media yang jangkauannya luas seperti media sosial, media cetak, SMS/WA blast, media luar ruang (baliho, videotron dll) dan media elektronik.

2) Anggaran Yang Sangat Terbatas Untuk Pelaksanaan Tupoksi

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah anggaran yang sangat terbatas untuk pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi). Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengujian laboratorium, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan program pelayanan publik dan KIE. Kondisi ini menuntut Balai POM di Batam untuk melakukan prioritas kegiatan secara ketat dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga ada kebutuhan strategis untuk mencari solusi tambahan, efisiensi, dan dukungan pendanaan agar pelaksanaan tupoksi dapat berjalan lebih optimal. Akibat dari kekurangan anggaran ini adalah pengawasan yang tidak merata di seluruh cakupan wilayah kerja Balai POM di Batam

seperti kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan diadakan setiap tahun dengan lokus yang berbeda-beda. Lokus kegiatan ini adalah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang masih masuk dalam target/lokus, dikarenakan setiap Loka POM belum memiliki target kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada tahun 2025, direncanakan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Lingga, yang harus diubah menjadi pendampingan lembaga yang belum didampingi sebelumnya di dalam Kota Batam. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas di kabupaten Lingga sebesar Rp2.868.517.000,-, namun anggaran yang tersedia untuk tahun 2025 sebesar Rp189.286.000,-. Untuk mensiasati kekurangan alokasi anggaran, beberapa tahapan kegiatan dilaksanakan secara daring (sebelumnya dilaksanakan *onsite).*

Sedangkan untuk tahun 2026, Balai POM di Batam dan Badan POM (pusat) menetapkan lokus di Kabupaten Lingga dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp2.226.969.000,- sedangkan untuk alokasi anggaran 2026 untuk pendampingan ketiga lembaga ini hanya sebesar Rp144.233.000,-. Dengan alokasi anggaran yang diberikan untuk tahun 2026 yang sangat kurang dibandingkan kebutuhan sehingga sulit untuk melaksanakan kegiatan diluar kota Batam. Kondisi ini akan menyebabkan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat yang merata sulit untuk dilaksanakan.

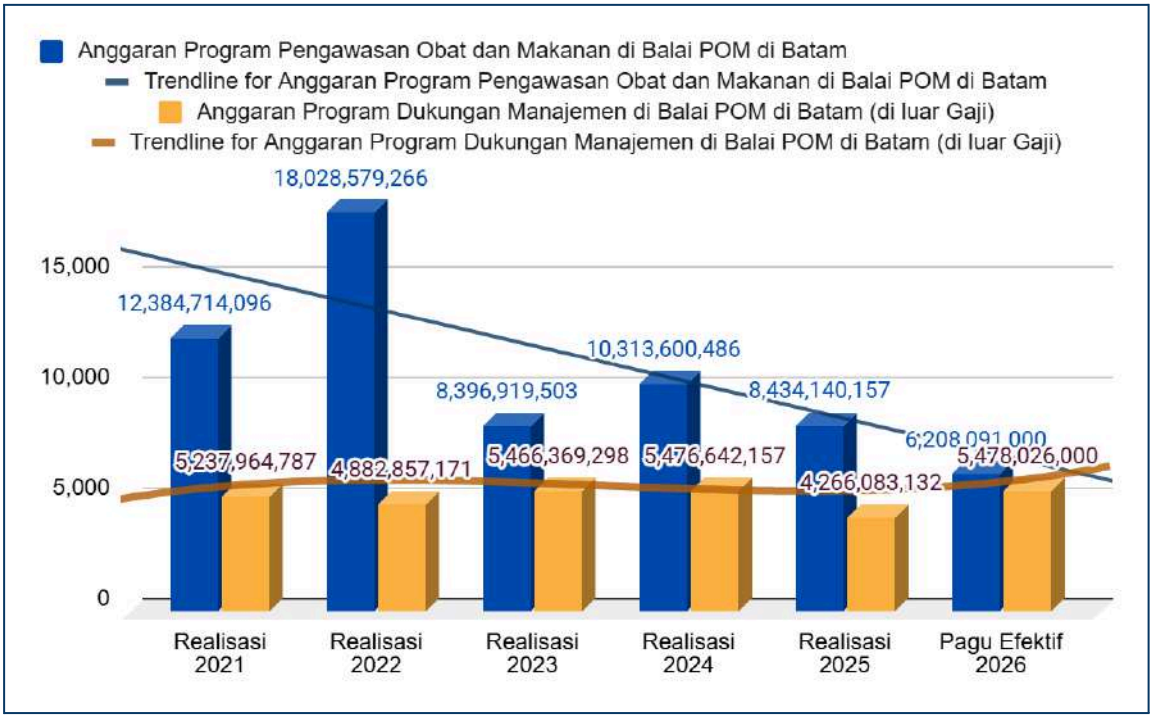

Grafik 1.5
Perbandingan Realisasi Anggaran 2021 sd 2025 dan Pagu Efektif TA 2026

Pada Grafik 1.5 dibandingkan realisasi anggaran sejak Tahun 2021 sampai 2025 dan besaran pagu efektif TA 2026. Dari *trendline* dapat dilihat kecenderungan anggaran untuk program pengawasan obat dan makanan di Balai POM di Batam cenderung menurun, sementara anggaran program dukungan manajemen cenderung stabil, dengan penurunan pada tahun 2025. Hal ini berbanding terbalik kebutuhan kecenderungan meningkatnya kebutuhan atas pengawasan atas peredaran obat dan dan makanan

3) Jumlah SDM Yang Masing Kurang Dibandingkan Dengan Kebutuhan

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang telah diperhitungkan melalui analisis beban kerja (ABK). Kekurangan ini berdampak pada beban kerja yang tinggi, keterbatasan kapasitas dalam menjalankan pengawasan, laboratorium, pelayanan publik, dan program-program strategis lainnya. Kondisi ini menuntut organisasi untuk melakukan prioritas tugas dan pengembangan kapasitas SDM.

Berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) pada aplikasi SIREN SDM (SIASN), Balai POM di Batam membutuhkan pegawai sejumlah 101 pegawai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan jumlah pegawai saat ini sejumlah 68 pegawai maka pemenuhan SDM hanya mencapai 66,02% dengan GAP Jabatan sebesar 35 meliputi:

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Batam	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Batam	1	1	0	100%
3	Analis Anggaran Ahli Madya	0	0	0	100%
4	Analis Anggaran Ahli Muda	1	0	1	0%
5	Analis Anggaran Ahli Pertama	1	1	0	100%
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1	0%
7	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	1	50%
8	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1	0%
9	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1	0%
10	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0	100%
11	Arsiparis Mahir	1	0	1	0%
12	Arsiparis Penyelia	1	0	1	0%
13	Arsiparis Terampil	2	1	1	50%
14	Penata Laksana Barang Terampil	3	2	1	67%
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	6	4	2	67%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	29	18	11	62%
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	33	33	0	88%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	-1	100%
19	Perencana Ahli Madya	1	0	1	0%
20	Perencana Ahli Muda	2	1	1	50%
21	Perencana Ahli Pertama	2	0	2	0%
22	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1	0%
23	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	1	0%
24	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1	0%
25	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	1	1	50%
26	Pranata Komputer Mahir	1	0	1	0%

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
27	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1	0%
28	Pranata Komputer Terampil	2	0	2	0%
29	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1	0%
30	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1	0%
31	Penata Layanan Operasional	0	1	-1	100%
32	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1	100%
Jumlah		**101**	**68**	**35**	**66,02%**

Tabel 1.5
Gap Pemenuhan SDM Balai POM di Batam

Tidak terpenuhinya jumlah SDM dengan jabatan fungsional tertentu tersebut menyebabkan ada beberapa perangkapan jabatan antara lain Jabatan Fungsional Pemeriksa Farmasi dan Makanan (PFM) yang rangkap tugas melaksanakan tugas jabatan fungsional keuangan Analis Pengelolaan Keuangan APBN (PPK), PFM rangkap tugas melaksanakan tugas kearsipan, Penata Laksana Barang Terampil merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, Penata Laksana Barang Terampil merangkap sebagai pejabat pengadaaan, serta pelaksanaan tugas setingkat di atas keahliannya sehingga memberikan beban tambahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang menyebabkan mengurangi kapasitas dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan yang diemban.

4) **Masih terjadi kekurangan sarana prasarana Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3, Alat Pengolah Data dan Alat laboratorium**

Salah satu kelemahan atau kendala Balai POM di Batam adalah masih terjadinya kekurangan sarana dan prasarana yaitu Alat Pengolah Data (APD), peralatan laboratorium, perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta fasilitas pendukung lainnya. Kekurangan ini dapat membatasi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, pengujian laboratorium, pengolahan data, dan kegiatan operasional sehari-hari. Kondisi ini menuntut upaya penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana-prasarana secara berkelanjutan agar seluruh tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal dan aman.

Untuk alat pengolah data saat ini berfokus pada pemenuhan dan peremajaan personal komputer ataupun laptop. Personal computer/laptop saat ini merupakan kebutuhan utama untuk melaksanakan pekerjaan. Penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah menjadi bagian integral dari operasional untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik serta fungsi pengawasan. Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Badan POM, yang berarti hampir semua proses administrasi dan pelayanan dilakukan secara digital. PC adalah perangkat utama yang digunakan pegawai untuk mengakses dan mengoperasikan sistem-sistem tersebut. Pengolahan Data dan Analisis memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk pekerjaan teknis di laboratorium juga membutuhkan PC untuk menjalankan perangkat lunak alat laboratorium. Saat ini Balai POM di Batam memiliki memiliki P.C unit dalam kondisi baik sebanyak 106 unit dengan masa antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun. PC yang dimiliki mayoritas dengan masa pakai lebih dari 5 tahun sebanyak 66 unit sebanyak 62.26%. PC dengan masa pakai yang cukup lama mulai banyak mengalami kendala seperti lama memproses sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.

Untuk pemenuhan peralatan laboratorium berdasarkan penilaian pempuk standar peralatan laboratorium kimia dan mikrobiologi. Masih terdapat gap antara standar yang ditetapkan dengan alat laboratorium yang ada saat ini. Pemenuhan standar peralatan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat laboratorium adalah tulang punggung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan karena berfungsi sebagai basis ilmiah untuk memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan produk melalui pengujian yang akurat. Peran ini sangat strategis untuk mendukung pengambilan keputusan, seperti penarikan produk, dan memastikan sediaan farmasi dan pangan olahan beredar di pasar sesuai standar yang berlaku. Untuk dapat memenuhi standar peralatan dibutuhkan dukungan anggaran pengadaan, anggaran

pemeliharaan, renovasi Gedung untuk jaringan listrik dan dukungan lainnya seperti kalibrasi.

Sarana dan prasarana yang saat ini masih perlu dilengkapi untuk mendukung tercapainya tujuan Balai POM di Batam adalah peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Urgensi pemenuhan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam sangat tinggi, terutama karena sifat pekerjaannya yang melibatkan risiko spesifik, seperti paparan bahan kimia berbahaya di laboratorium. Pemenuhan K3 Balai POM di Batam didasari oleh aspek hukum dan kebutuhan operasional untuk menjamin perlindungan pegawai serta efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5) **Balai POM di Batam masih menghadapi kesenjangan kompetensi manajerial dan sosiokultural, ketidakmerataan kompetensi pegawai, serta belum tersedianya framework pelatihan dan dokumentasi karir yang terpadu bagi seluruh SDM.**

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah terjadinya kesenjangan kompetensi pegawai, baik pada aspek teknis, manajerial, maupun sosiokultural. Berdasarkan data dari SIASN Badan POM terkait penilaian standar kompetensi menilai kompetensi ASN meliputi kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural, pegawai Balai POM di Batam yang masuk dalam kategori optimal sebesar 36.07%. Sedangkan 45.9% masuk kategori cukup optimal dan 18.03% masuk dalam kategori kurang optimal.

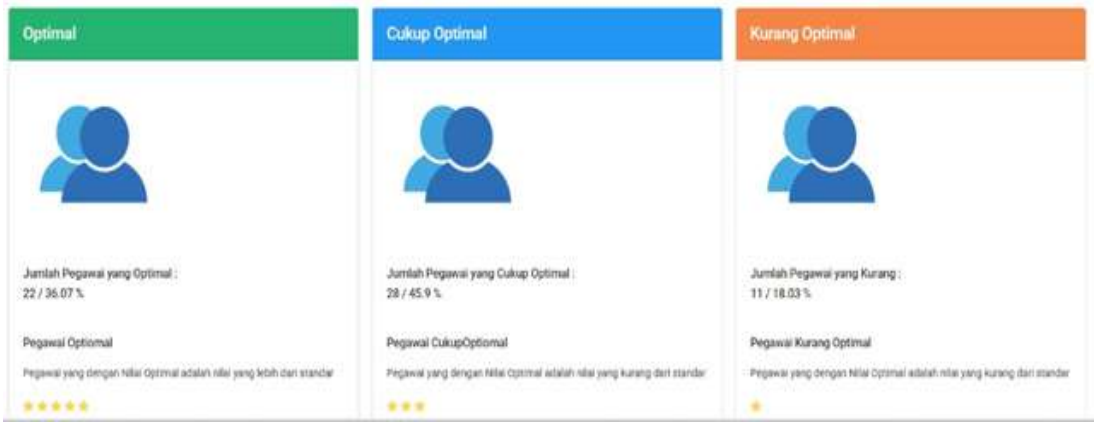

Gambar 1.3
Hasil Penilaian kompetensi ASN meliputi kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural

Kesenjangan ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, pengujian laboratorium, manajemen internal, serta interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kondisi ini menuntut adanya program pengembangan kapasitas yang terencana, pelatihan berkelanjutan dan pembinaan kompetensi lintas fungsi, agar seluruh pegawai mampu menjalankan tupoksi secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Namun saat ini, Balai POM di Batam belum memiliki peta pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Saat ini, perencanaan pelatihan belum sepenuhnya terstruktur dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan teknis, manajerial, maupun sosiokultural pegawai. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kebutuhan organisasi, sehingga efektivitas pelaksanaan tupoksi dapat terpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pelatihan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pegawai serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

6) **Pengadaan mendesak, belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan**

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah sering terjadinya pengadaan mendesak akibat kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat mengganggu efisiensi, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Pengadaan mendesak berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta risiko administrasi yang meningkat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kebutuhan yang lebih baik dan sistematis untuk meminimalkan pengadaan mendesak dan menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Selain itu kelemahan Balai POM di Batam adalah terbatasnya pemahaman pegawai terhadap peraturan dan prosedur keuangan, baik

dalam pengelolaan anggaran, maupun pertanggungjawaban keuangan. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan proses, dan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengelolaan keuangan, sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan.

7) Belum adanya jenjang karir untuk beberapa jabatan

Beberapa jabatan fungsional yang belum memiliki jenjang karir diantaranya adalah pranata komputer hanya sampai jenjang ahli pertama, penata laksana barang hanya sampai terampil, Analis Anggaran hanya sampai muda, dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN hanya sampai Ahli muda. Kondisi ini berdampak pada motivasi pegawai dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia secara sistematis. Kurangnya jalur karir yang terstruktur membuat pegawai kurang memiliki panduan mengenai kesempatan promosi, pengembangan kompetensi, dan target kinerja jangka panjang. Akibatnya, potensi pengembangan profesional pegawai menjadi kurang optimal, dan retensi pegawai yang kompeten dapat terganggu. Diperlukan penyusunan jenjang karir yang jelas dan terintegrasi dengan program pengembangan SDM agar pegawai dapat tumbuh secara profesional dan organisasi mendapatkan manfaat maksimal dari kompetensi yang ada.

8) Perlu peningkatan dalam pemanfaatan sistem IT

Balai POM di Batam masih menghadapi kelemahan terkait pemanfaatan sistem informasi dan teknologi (IT) secara optimal. Sistem IT yang tersedia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pengawasan, pengujian laboratorium, pelaporan, dan pelayanan publik. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan proses kerja menjadi kurang efisien, data kurang akurat, dan layanan kepada masyarakat tidak sepenuhnya responsif. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pegawai dalam pemanfaatan sistem IT, pengembangan

infrastruktur digital, serta integrasi sistem agar mendukung efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

9) Eselonisasi perlu ditingkatkan

Struktur eselon yang saat ini kepala Balai berada pada tingkat Eselon III, sementara sebagian besar pemangku kepentingan dan instansi mitra memiliki pejabat pada tingkat Eselon II. Perbedaan tingkat ini dapat membatasi pengaruh Balai POM di Batam dalam pengambilan keputusan strategis, koordinasi lintas instansi, dan negosiasi program, serta berpotensi mengurangi efektivitas komunikasi dengan pihak eksternal. Keterbatasan eselon ini juga mempengaruhi kapasitas organisasi dalam mengoptimalkan peran dan kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan peningkatan eselonisasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Balai POM di Batam, sehingga mendukung akuntabilitas, koordinasi lintas sektor, dan efektivitas pelaksanaan program secara optimal.

10) Penerapan SMK3 dan SMAP perlu ditingkatkan

Balai POM di Batam menghadapi kelemahan terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum sepenuhnya optimal di lingkungan kerja dan laboratorium. Kekurangan ini dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan pegawai, keamanan laboratorium, dan kelancaran operasional harian. Kurangnya implementasi prosedur K3 juga dapat berdampak pada kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penerapan prosedur K3 melalui pelatihan, pemantauan rutin, dan evaluasi berkelanjutan, agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai standar.

Balai POM di Batam saat ini berada pada tahap awal penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sehingga implementasinya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi integritas organisasi, transparansi proses kerja, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan SMAP melalui sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta

pembinaan internal yang berkelanjutan agar integritas dan kepercayaan publik terhadap organisasi dapat terus meningkat.

11) **Pengukuran kinerja yang digunakan belum efektif dan membutuhkan perbaikan**.

Pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya mencerminkan kegiatan internal yang mendukung kompetensi pegawai, seperti pelatihan. Saat ini, waktu yang digunakan pegawai untuk mengikuti pelatihan internal tidak diperhitungkan dalam sistem clock in/clock out. Akibatnya, timeline pengujian sampel terpotong, sehingga indikator kinerja yang mengukur penyelesaian pengujian tepat waktu menurun, meskipun pelatihan tersebut meningkatkan kompetensi teknis dan profesional pegawai. Kelemahan ini menunjukkan perlunya penyesuaian metode pengukuran kinerja agar lebih akurat, inklusif, dan mencerminkan kontribusi pegawai secara keseluruhan, termasuk waktu yang digunakan untuk pengembangan kompetensi. Dengan penyesuaian ini, evaluasi kinerja akan lebih adil, relevan, dan mendukung peningkatan kualitas SDM serta efektivitas operasional Balai POM di Batam.

12) **Belum optimalnya Kerjasama lintas sektor terkait kegiatan KIE**

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha. Keterbatasan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta organisasi masyarakat menyebabkan cakupan dan efektivitas pesan KIE belum merata di seluruh wilayah pengawasan. Padahal, kegiatan KIE yang sinergis lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi dan forum koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan KIE menjadi lebih terarah, komprehensif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

13) **Masih kurangnya inovasi yang dirasakan langsung masyarakat**

Masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan inovasi yang memberikan manfaat nyata secara langsung kepada masyarakat.

Sebagian program dan kegiatan belum sepenuhnya dirancang untuk menghadirkan dampak positif yang dapat segera dirasakan oleh publik, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pengawasan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan inovasi yang lebih aplikatif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaan Balai POM dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan berkelanjutan

14) Lokasi kantor yang jauh dari pusat kota

Salah satu kelemahan Balai POM di Batam adalah lokasi kantor yang jauh dari pusat kota yaitu sejauh 25 km, sehingga dapat mempengaruhi akses masyarakat, mobilitas pegawai, serta koordinasi dengan instansi terkait. Terkait lokasi kantor ini telah menjadi masukan pada survei SKM, dimana responden memberi masukan agar Balai POM di Batam membuka pelayanan di Batam centre (gedung sumatera). Jarak ini dapat menjadi hambatan dalam pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Diperlukan strategi adaptif dalam layanan publik, penggunaan teknologi komunikasi, serta penyesuaian operasional, agar kendala lokasi tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM.

15) Pemahaman dan implementasi nilai Berakhlak perlu ditingkatkan

Balai POM di Batam masih menghadapi kelemahan terkait pemahaman dan implementasi nilai Berakhlak di lingkungan kerja. Hasil survei implementasi berakhlak tahun 2025 Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan	Akuntabel	Kompeten	Harmonis	Loyal	Adaptif	Kolaboratif	Implementation Index 2025
87,30%	81,70%	71,80%	42,30%	43,70%	56,30%	77,50%	65,80%
Sehat	Sehat	Cukup Sehat	Tidak Sehat	Tidak Sehat	Cukup Sehat	Sehat	Cukup Sehat

Tabel 1.6
Hasil Survei Implementasi Berakhlak
Sumber: Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: OT.01.03.2.07.25.366 Tanggal 9 Juli 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 7 nilai berakhlak terdapat 3 nilai masuk kategori sehat, 2 nilai cukup sehat dan 2 nilai tidak sehat. Dan untuk implementation index nilai Balai POM di Batam sebesar 65.80% dengan kategori cukup sehat. Rendahnya implementasi ini dapat mempengaruhi budaya organisasi, etika kerja, interaksi internal, dan pelayanan publik. Hal ini menuntut adanya pendampingan, sosialisasi, dan monitoring nilai Berakhlak secara berkelanjutan, sehingga budaya kerja profesional, etis, dan berintegritas dapat terinternalisasi dalam seluruh aktivitas organisasi.

PELUANG

Peluang (*Opportunities*) menggambarkan kondisi, kecenderungan, atau faktor eksternal di lingkungan organisasi yang dapat memberikan keuntungan atau dukungan apabila dimanfaatkan secara tepat. Peluang dapat berasal dari berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, potensi kerja sama lintas sektor, maupun dukungan sumber daya di lingkungan eksternal organisasi.

Dengan mengenali peluang, organisasi dapat menyusun strategi yang proaktif dan adaptif, memanfaatkan momentum yang ada untuk memperkuat posisi, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih optimal. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi oleh Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1) **Digitalisasi/Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi Balai POM di Batam untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan (SF & PO). Melalui digitalisasi, proses pengumpulan data, pelaporan, dan analisis hasil pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pelaporan daring, database berbasis cloud, dan analitik data juga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan lintas sektor.

2) Penguatan Pengawasan Lintas Batas

Letak geografis Kota Batam yang strategis, berdekatan dengan negara lain, memberikan peluang bagi Balai POM di Batam untuk menguatkan pengawasan lintas batas terhadap peredaran obat dan makanan impor maupun ekspor. Penguatan sinergi dengan instansi seperti Bea Cukai, Karantina, dan Kepolisian membuka ruang kerja sama dalam pengawasan produk lintas negara, sekaligus memperkuat posisi Balai POM di Batam dalam perlindungan masyarakat dari produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan.

3) Tingginya Ekspektasi Masyarakat dan Stakeholder

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap mutu pelayanan publik menjadi peluang bagi Balai POM di Batam untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi pengawasan. Tuntutan terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel mendorong organisasi untuk terus beradaptasi dan memperbaiki sistem manajemen kinerja serta pelayanan publik secara berkelanjutan.

4) Kepercayaan dan Kebutuhan terhadap Pelayanan Publik Balai POM di Batam

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Balai POM di Batam terus meningkat, seiring dengan kebutuhan akan jaminan mutu dan keamanan sediaan farmasi serta pangan olahan. Kondisi ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat reputasi institusi dan memperluas layanan publik, termasuk peningkatan kapasitas laboratorium, pelayanan pengujian pihak ketiga, serta pembinaan pelaku usaha lokal agar lebih patuh terhadap regulasi.

5) Updating ISO 45001:2027

Perkembangan standar internasional ISO 45001:2027 yang menambahkan klausul tentang kesehatan mental, Work From Home (WFH), dan Work From Anywhere (WFA) membuka peluang bagi Balai POM di Batam untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai. Pembaruan ini mendorong organisasi untuk mendefinisikan ulang ruang lingkup tanggung jawab terhadap pegawai,

memperkuat budaya keselamatan kerja yang komprehensif, serta mendorong penerapan sistem manajemen yang lebih adaptif.

6) Pertumbuhan Industri di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pertumbuhan pesat industri, terutama pada sektor sediaan farmasi dan pangan olahan, memberikan peluang bagi Balai POM di Batam untuk memperluas peran pengawasan dan pembinaan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat kolaborasi dalam pengawasan mutu produk, serta berkontribusi dalam peningkatan daya saing industri nasional.



Grafik 1.6
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja Balai POM di Batam

7) Kerja Sama dan Kolaborasi Lintas Sektor

Tingginya potensi kolaborasi antara Balai POM di Batam dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi dan dunia usaha menjadi peluang penting untuk memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan KIE, sekaligus menciptakan sinergi dalam perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

8) Dukungan Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Semakin meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Batam. Kesadaran masyarakat untuk melapor atau menolak produk yang tidak memenuhi ketentuan membantu memperkuat fungsi pengawasan berbasis komunitas. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan model pengawasan partisipatif.

9) Lokasi Kantor yang Strategis yakni Kota Batam

Keberadaan kantor Balai POM di Kota Batam, yang merupakan wilayah dengan populasi terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi keunggulan geografis. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
Karimun	266.000	12,02
Bintan	170.500	7,70
Natuna	86.800	3,92
Lingga	103.000	4,65
Kepulauan Anambas	50.400	2,28
Kota Batam	1.297.000	58,59
Kota Tanjung Pinang	240.000	10,84
Kepulauan Riau	**2.213.700**	**100,00**

Sumber : *https://kepri.bps.go.id/*
Keterangan : *Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020*

Tabel 1.7
Sebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

Lokasi ini memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, pelaku usaha, serta instansi lain dalam kegiatan pengawasan, pelayanan, dan edukasi. Posisi strategis ini menjadi peluang untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat pengawasan di daerah dengan aktivitas ekonomi tertinggi di provinsi ini.

10) Peningkatan Pemberdayaan Sekolah, Desa, dan Pasar untuk Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif, Balai POM di Batam terus berupaya memperluas jangkauan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti sekolah, desa, dan pasar, serta telah menjadi bagian dari perencanaan strategis sejak tahun 2020.

Sampai dengan tahun 2025, jumlah lokasi yang telah diintervensi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sekolah yang telah diintervensi bertambah menjadi **91 sekolah** atau **3,01%** dari total sekolah yang ada. Desa yang telah mendapatkan intervensi menjadi **34 desa** atau **8,12%**, sedangkan pasar yang telah diintervensi menjadi **6 pasar** atau **8,57%** dari total pasar yang ada di wilayah pengawasan Balai POM di Batam.

Jumlah Sekolah, desa dan pasar yang sudah diintervensi oleh Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

Kategori	Jumlah yang ada	Jumlah yang Sudah Diintervensi (2020–2025)	Persentase
Sekolah	3.018	91	3,01 %
Desa	419	34	8,12 %
Pasar	70	6	8,57 %

Tabel 1.8
Persentase Sekolah, Desa dan Pasar Yang Sudah Diintervensi tahun 2020-2025

Meskipun mengalami peningkatan, cakupan intervensi masih relatif kecil dibandingkan jumlah keseluruhan sasaran. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan program serta penambahan sumber daya agar kegiatan edukasi keamanan obat dan makanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

11) Peluang Pengembangan KIE karena Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Produk Ilegal Masih Rendah

Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai bahaya penggunaan dan konsumsi produk ilegal membuka peluang bagi Balai POM di Batam untuk memperluas cakupan dan inovasi program KIE. Dengan strategi komunikasi yang tepat dan melibatkan berbagai pihak, kegiatan KIE dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memastikan keamanan produk yang dikonsumsi.

12) Peningkatan Pendapatan PNBP melalui Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Layanan Sertifikasi

Balai POM di Batam memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi layanan pengujian sampel pihak ketiga dan layanan sertifikasi. Layanan surat keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) serta pengujian sampel pihak ketiga meningkat setiap tahunnya seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

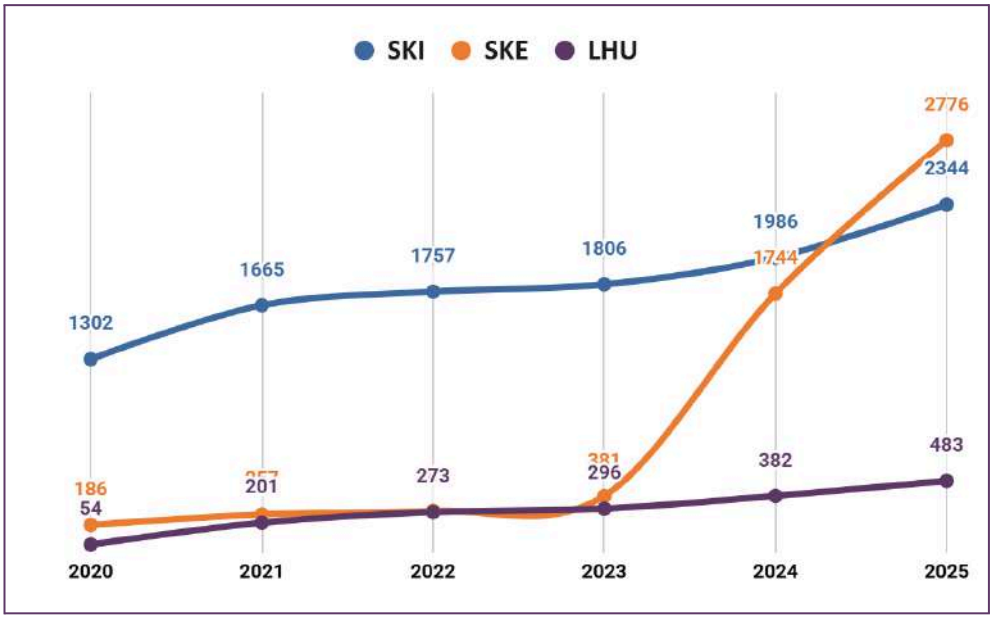

Grafik 1.7
Jumlah Sertifikat Keterangan Ekspor (SKE), Impor (SKI), dan Sertifikat/Hasil Uji Sampel Pihak Ketiga (LHU) yang diterbitkan

Permintaan yang meningkat dari pelaku industri, instansi pemerintah dan swasta terhadap pelayanan Balai POM di Batam yang andal dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas layanan, meningkatkan

efisiensi, serta memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara dan pengembangan organisasi. Dengan seiring meningkatnya jumlah SKI, SKE dan pengujian sampel pihak ketiga, kontribusi Balai POM di Batam terhadap PNBP juga terus meningkat. PNBP fungsional Balai POM di Batam untuk tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

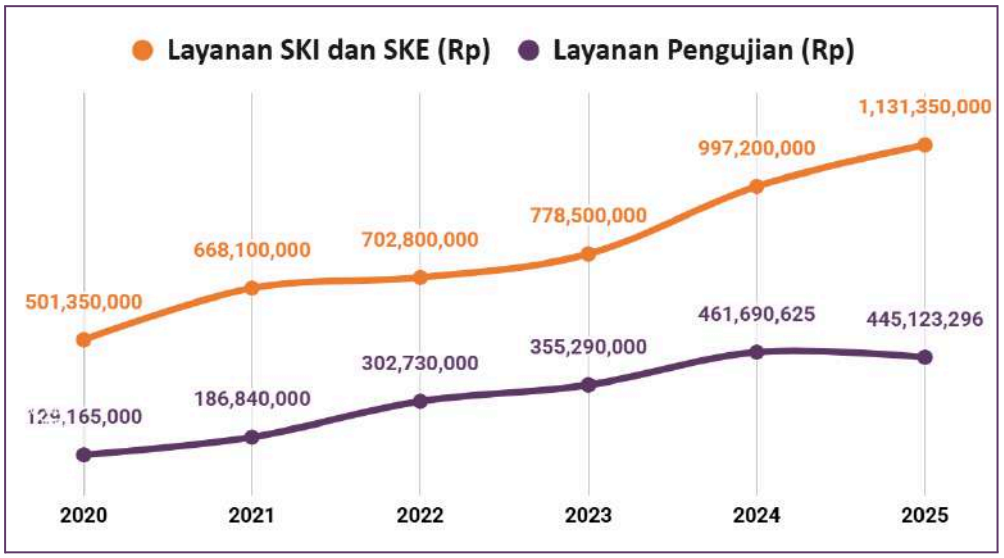

Grafik 1.8
PNBP Balai POM di Batam tahun 2020-2025

ANCAMAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Batam tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan kinerja organisasi. Ancaman merupakan faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis, baik yang berasal dari dinamika lingkungan global, perkembangan industri, kebijakan lintas sektor, maupun perubahan perilaku masyarakat. Identifikasi terhadap ancaman ini menjadi penting agar organisasi mampu menyusun strategi mitigasi yang tepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

1) **Wilayah kepulauan yang luas dengan banyaknya pintu masuk ilegal yang meningkatkan kerawanan peredaran obat dan makanan ilegal**

   Letak geografis Batam yang strategis dan berdekatan langsung dengan negara tetangga menjadikannya salah satu wilayah dengan banyak jalur masuk resmi maupun tidak resmi. Kondisi ini membuka peluang

terjadinya penyelundupan produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, baik melalui pelabuhan, jalur laut kecil, maupun peredaran lintas batas. Banyaknya pintu masuk yang tidak terawasi secara optimal menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat, karena produk yang beredar tidak melalui proses pengawasan mutu dan keamanan sesuai ketentuan. Situasi ini menuntut penguatan kerja sama lintas sektor, terutama dengan aparat penegak hukum, bea cukai, dan otoritas pelabuhan, agar pengawasan lintas batas dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Wilayah kerja Balai POM di Batam mencakup area yang luas dan terdiri dari berbagai pulau. Keterbatasan sarana transportasi laut dan darat maupun jarak tempuh yang cukup lama dapat menyulitkan dalam melakukan pengawasan sampai daerah-daerah terjauh. Hal ini menjadi ancaman terhadap pemerataan jangkauan pengawasan dan pelayanan publik. Diperlukan strategi pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk menjangkau wilayah kepulauan secara efektif.

2) Potensi Terjadinya KKN/Fraud yang Dipengaruhi Pihak Luar

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, terdapat potensi intervensi eksternal yang dapat memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau fraud, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap integritas dan citra Balai POM di Batam sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, peningkatan budaya integritas, serta pengawasan internal yang ketat agar potensi fraud dapat diminimalkan.

3) Adanya Upaya dari Pihak Eksternal dalam Menghalangi Proses Penyidikan

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Batam tidak jarang menghadapi upaya penghalangan penyidikan dari pihak eksternal.

Tekanan ini dapat berupa intimidasi, intervensi atau manipulasi informasi yang bertujuan melemahkan proses hukum. Ancaman tersebut berpotensi menghambat proses penegakan keadilan, menurunkan moral petugas, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap ketegasan lembaga. Untuk mengantisipasinya, diperlukan sinergi yang lebih kuat dengan aparat penegak hukum, serta perlindungan hukum bagi petugas dalam menjalankan fungsi penyidikan.

4) **Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara Daring (Online) Peningkatan risiko dan kerawanan peredaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal melalui berbagai macam modus termasuk online**

Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab semakin kreatif dalam menyamarkan dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan, baik melalui kemasan, pelabelan, penggunaan bahan tidak sesuai standar maupun cara memperjual belikan barang tersebut. Modus ini membuat deteksi produk ilegal semakin sulit, terutama jika tidak didukung oleh teknologi pengawasan yang mutakhir. Ancaman ini menuntut peningkatan kapasitas deteksi dini, peningkatan pengawasan baik online maupun langsung, pengujian laboratorium yang andal dan kerja sama dengan instansi penegak hukum agar peredaran produk ilegal dan berbahaya dapat diminimalisir secara efektif.

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan model perdagangan secara online yang dapat mempermudah konsumen maupun penjual. Hal tersebut sangat positif untuk pembangunan ekonomi. Namun perdagangan secara online juga menimbulkan risiko penjualan barang-barang termasuk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak sesuai standar dapat diperdagangkan secara luas. Perdagangan secara daring sulit diawasi secara konvensional. Penjualan produk ilegal melalui e-commerce, media sosial, dan platform digital menjadi tantangan besar karena transaksi bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara. Kondisi ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan konsumen dan efektivitas pengawasan, sebab banyak produk tidak terdaftar dan tidak diketahui asal-usulnya. Oleh

karena itu, Balai POM di Batam perlu meningkatkan pengawasan siber dan memperkuat kolaborasi dengan platform digital serta aparat penegak hukum dalam penindakan pelanggaran daring.

Banyaknya produk ilegal yang diperdagangkan dapat disebabkan oleh masih tingginya permintaan masyarakat terhadap produk-produk tersebut, sering kali tanpa memperhatikan keamanan dan mutu. Fenomena ini menciptakan tekanan pasar terhadap produk legal dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Balai POM di Batam perlu memperkuat edukasi publik dan KIE, sekaligus memperluas pengawasan di pasar tradisional dan online untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan tidak terkendali sehingga memicu hal-hal yang merugikan masyarakat seperti penyalahgunaan obat. Kasus penyalahgunaan obat keras, psikotropika, dan obat tertentu menjadi ancaman terhadap ketertiban, kesehatan masyarakat serta masa depan bangsa. Penyalahgunaan ini juga sering terjadi akibat pengawasan distribusi masih perlu ditingkatkan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan tanpa resep dokter. Untuk mengatasinya, Balai POM di Batam perlu memperkuat pengawasan distribusi obat, melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan, serta berkoordinasi dengan instansi kesehatan dan aparat hukum.

5) **Regulasi yang belum menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha termasuk UMKM yang melakukan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan**

Regulasi saat ini masih menunjukkan keterbatasan dalam memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini berpotensi menurunkan kepatuhan pelaku usaha, meningkatkan risiko peredaran produk yang membahayakan kesehatan masyarakat, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengawasan Balai POM di Batam.

Kondisi seperti itu juga terjadi terhadap pelaku usaha skala kecil dan menengah (UMKM) yang melakukan kejahatan di bidang sediaan

farmasi dan pangan olahan. Masih lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM, sering kali dengan alasan pembinaan atau stabilitas ekonomi, dapat menimbulkan moral hazard dan menurunkan efek jera. Hal ini menjadi ancaman terhadap kepatuhan regulasi dan keadilan bagi pelaku usaha patuh. Diperlukan penegakan hukum yang proporsional namun tegas, disertai pendekatan edukatif agar pembinaan dan kepatuhan dapat berjalan beriringan

Ancaman ini menuntut peninjauan ulang dan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan pendekatan edukatif dan pembinaan agar pelaku usaha memahami konsekuensi pelanggaran, sehingga tercipta budaya kepatuhan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kredibilitas lembaga dan keselamatan masyarakat.

6) **Terbatasnya Penyedia Uji Profisiensi Sampel pada Ruang Lingkup Akreditasi KAN**

Keterbatasan jumlah penyedia uji profisiensi dalam ruang lingkup akreditasi KAN berdampak pada kesulitan laboratorium dalam menjaga konsistensi mutu hasil uji. Untuk penyedia yang ada saat ini hanya ada untuk sampel pangan olahan. Sedangkan untuk sampel Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik sangat sulit untuk mencari yang berada di dalam negeri. Kondisi ini dapat menurunkan kredibilitas hasil pengujian yang menjadi dasar pengambilan keputusan pengawasan. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu menjalin kerja sama antar laboratorium dan lembaga uji profisiensi, serta mendorong pengembangan penyedia uji profisiensi baru di tingkat nasional.

7) **Masih terdapat keterbatasan dan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan**

Kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang melibatkan lintas negara seringkali melampaui kewenangan administratif Balai POM di Batam, sehingga memerlukan sinergi kuat dengan instansi penegak hukum. Keterbatasan kewenangan ini menjadi ancaman terhadap efektivitas penindakan dan penegakan hukum,

terutama di wilayah perbatasan seperti Batam. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dengan aparat kepolisian, Bea Cukai, dan Kejaksaan menjadi sangat penting untuk memastikan tindakan hukum berjalan optimal.

Selain keterbatasan kewenangan terkait menindaklanjuti kejahatan lintas negara, Balai POM di Batam juga mengalami tumpang tindih kewenangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait. Kondisi ini dapat menjadi ancaman karena dapat menimbulkan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam rantai pengawasan. Perbedaan pemahaman antar instansi mengenai standar keamanan, mekanisme distribusi, serta tanggung jawab pengawasan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program dan berpotensi menimbulkan celah pengawasan terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi.

Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga dapat memunculkan risiko terjadinya duplikasi kegiatan, keterlambatan pengambilan keputusan, dan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan kejelasan regulasi, pembagian peran yang tegas antar instansi, serta penguatan kolaborasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan pangan pada program MBG. Tanpa hal tersebut, tumpang tindih kewenangan dapat menjadi hambatan strategis dalam memastikan keamanan dan mutu makanan bergizi yang diterima masyarakat.

8) Lama Waktu Pengiriman Sampel Regional

Balai POM di Batam menghadapi tantangan dalam pengiriman sampel dari dan ke wilayah regional, yang sering memakan waktu lebih lama dibandingkan perkiraan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh status Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ), di mana pengiriman keluar wilayah FTZ harus melalui berbagai pemeriksaan, termasuk oleh Bea Cukai, sehingga menimbulkan proses tambahan yang memperpanjang

waktu pengiriman. Lama pengiriman sampel yang pernah dialami sampai dengan 10 hari kalender. Sedangkan jika pengiriman dari kota non ftz dibutuhkan waktu 4-5 hari kalender. Kondisi ini berdampak pada kecepatan tindak lanjut hasil uji dan pengambilan keputusan, serta dapat mempengaruhi indikator kinerja terkait penyelesaian pengujian tepat waktu.

9) **Terbatasnya penyedia di Batam yang memenuhi kriteria teknis dan administrasi serta adanya barang TKDN yang belum memenuhi standar atau kebutuhan**

Balai POM di Batam menghadapi ancaman/tantangan terkait pengadaan Barang dan Jasa yang dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan organisasi diantaranya adalah Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban penggunaan alat laboratorium dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini perlu diimbangi dengan ketersediaan produk yang memenuhi standar teknis pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan. Jika tidak, hal ini dapat menjadi ancaman terhadap akurasi dan reliabilitas hasil uji, serta berdampak pada kredibilitas laboratorium. Diperlukan advokasi kebijakan dan komunikasi dengan penyedia alat agar pengadaan alat berbasis TKDN tetap memenuhi persyaratan teknis dan mutu.

Selain hal di atas, keterbatasan jumlah penyedia barang dan jasa yang memenuhi standar pengadaan pemerintah menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran dan menurunkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Balai POM di Batam perlu melakukan pemetaan dan pengembangan penyedia potensial, serta peningkatan transparansi proses pengadaan agar kinerja dapat lebih optimal.

10) **Resistensi Antibiotik**

Meningkatnya kasus resistensi antibiotik menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Data WHO menunjukkan bahwa resistensi antimikroba secara langsung bertanggung jawab atas 1,27 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2019 dan berkontribusi

terhadap 4,95 juta kematian. Beberapa penyebab munculnya AMR adalah penggunaan yang salah dan penggunaan antimikroba yang berlebih, kontaminasi lingkungan, transmisi di fasilitas kesehatan, diagnostik cepat yang tidak optimal, vaksinasi yang tidak optimal, obat substandar dan palsu, perjalanan dan administrasi obat massal untuk kesehatan manusia. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan berpotensi menurunkan efektivitas pengobatan dan menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Kondisi ini menuntut Balai POM di Batam untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan antibiotik, meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penerapan program pengendalian resistensi antimikroba secara berkelanjutan.

11) **Gangguan siber, kendala pada sistem informasi terpusat, dan maraknya hoaks di media sosial melemahkan keandalan data, integritas pengawasan, serta kepercayaan publik**

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas juga membawa risiko keamanan siber, seperti kebocoran data, serangan malware, dan manipulasi data pengawasan. Ancaman ini dapat berdampak pada kerahasiaan data, integritas sistem, dan kepercayaan publik terhadap layanan Balai POM di Batam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan siber, penerapan manajemen risiko TI, serta peningkatan kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi untuk melindungi data organisasi dan publik.

Penyebaran informasi palsu (hoaks) terkait sediaan farmasi dan pangan olahan, maupun kebijakan BPOM di media sosial dapat menyesatkan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga. Hoaks yang tidak segera diklarifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan dan kesalahan persepsi publik. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu meningkatkan kecepatan respon informasi, memperkuat komunikasi publik, dan mengoptimalkan kanal resmi dalam memberikan edukasi dan klarifikasi berbasis data ilmiah.

Kinerja sistem informasi terpusat yang belum stabil dapat mengganggu kelancaran proses administrasi, pelaporan, dan analisis pengawasan.

Gangguan teknis atau keterlambatan sinkronisasi data berdampak pada akurasi dan ketepatan waktu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu penguatan infrastruktur TI, peningkatan kapasitas server, dan koordinasi intensif dengan unit pusat untuk menjaga keandalan sistem informasi.

12) Ditemukannya Pangan Fortifikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Masih ditemukan produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan menunjukkan lemahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap regulasi. Pangan fortifikasi erat hubungannya dengan program pemerintah terkait pengentasan stunting. Dari pengujian terhadap sampel fortifikasi yang dilakukan oleh Balai POM di Batam, setiap tahun selalu ditemukan sampel yang tidak memenuhi standar. Dari hasil pengujian yang dilakukan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 177 sampel fortifikasi ditemukan sebesar 15.25% atau 27 sampel TMS. Dengan adanya produk pangan fortifikasi yang TMS dapat berakibat terhadap keberhasilan program pemerintah serta mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kondisi ini perlu direspons dengan peningkatan pengawasan berbasis risiko, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan pengujian laboratorium terhadap komposisi produk fortifikasi.

13) Penyalahgunaan Sertifikat Hasil Pengujian dan Sertifikat Perizinan BPOM

Masih terdapat kasus pemalsuan atau penyalahgunaan sertifikat hasil uji dan dokumen perizinan BPOM oleh oknum tertentu untuk memperlancar peredaran produk ilegal. Praktik ini mengancam integritas sistem sertifikasi dan kredibilitas BPOM. Oleh karena itu, perlu diperkuat verifikasi digital dokumen, sistem keamanan dokumen seperti QR code, serta sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan.

14) Masih rendahnya Literasi, edukasi, Kepatuhan dan kesadaran Pelaku Usaha serta Masyarakat

Sebagian pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah, masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap regulasi, persyaratan produksi, dan pemanfaatan teknologi pengolahan. Kondisi ini menyebabkan banyak produk tidak memenuhi ketentuan, baik dari aspek keamanan maupun mutu. Untuk mengatasinya, Balai POM di Batam perlu memperkuat program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pelaku usaha agar mereka mampu bertransformasi menuju usaha yang patuh regulasi dan berdaya saing.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPOM masih belum merata. Banyak masyarakat yang belum mengetahui cara memastikan legalitas produk, melaporkan temuan ilegal, atau memahami bahaya konsumsi produk tidak terdaftar. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap efektivitas pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, Balai POM di Batam perlu memperluas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan komunitas dan kolaborasi lintas sektor.

15) Perubahan Cuaca dan Kondisi Lingkungan

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang terdiri atas ribuan pulau dengan kondisi perairan yang menjadi penghubung utama antar wilayah. Situasi ini menjadikan aktivitas pengawasan Balai POM di Batam sangat bergantung pada kondisi cuaca dan transportasi laut. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim global menyebabkan cuaca di wilayah Kepulauan Riau semakin tidak menentu, dengan frekuensi hujan lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi yang meningkat dan sulit diprediksi.

16) Perubahan Iklim / Kondisi Cuaca Yang Sulit Diprediksi

Kondisi cuaca ekstrem tersebut menjadi ancaman nyata bagi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kepulauan. Akses menuju pulau-pulau kecil kerap terganggu, menyebabkan keterlambatan jadwal pengawasan, sampling, maupun

kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha. Selain itu, risiko keselamatan dalam perjalanan laut meningkat, sehingga perlu penyesuaian jadwal dan strategi operasional. Dengan demikian, ketidakpastian cuaca menjadi faktor eksternal yang signifikan dan perlu diantisipasi melalui peningkatan fleksibilitas rencana kerja, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan jarak jauh

17) **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**

Penerapan PP 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Kota Batam yang belum didukung kesiapan sistem informasi yang digunakan dalam penerbitan perizinan lintas instansi. Keterbatasan integrasi data, ketidaksiapan platform layanan, dapat menghambat kelancaran proses perizinan yang merugikan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Jika tidak segera diperkuat, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, percepatan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi menjadi langkah krusial dalam mengantisipasi potensi ancaman tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 yang telah disusun. Dalam Rencana Strategis Balai POM di Batam telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Untuk mencapai Visi Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Misi Balai POM di Batam sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:
   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Tujuan yang dirumuskan untuk tahun 2025-2029 mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Sasaran strategis Badan POM dilakukan cascading ke beberapa level, level teratas adalah sasaran strategis yang selanjutnya dilakukan cascading ke sasaran program serta ke level sasaran kegiatan yang merupakan level untuk satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berikut adalah sasaran kegiatan Balai POM di Batam untuk tahun 2025-2029 hasil cascading adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
   BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek

krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1) Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3) Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16) Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

2. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

4. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

   UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

   Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

   Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap

potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

7. **Layanan Publik UPT yang prima**

   Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

   Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

   1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
   2. Nilai AKIP UPT BPOM

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2026

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Batam tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029. Adapun Rencana Kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 adalah sebagai berikut

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.63
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	87
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	92

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.58
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.4
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.04
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	27.27

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.01
		Nilai AKIP UPT BPOM	81.28
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.06

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Batam

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Balai POM di Batam mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Batam sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Batam dengan pemberi amanah yaitu Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91.63**
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	**27.00**
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**92.00**
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100.00**
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**92.00**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**87.00**
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**98.00**
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**98.00**
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**97.63**
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**98.00**
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**93.58**
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**92.00**
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100.00**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**68.00**
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**20.00**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**100.00**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**87.04**
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**7**
		19	Jumlah desa pangan aman	**3**
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**27.27**
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**88.75**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**91.00**
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	**4.92**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	**86.69**
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	**76.45**
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	**5.00**
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	**2.91**

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam TA 2026

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap berkala adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). RAPK tahun 2026 telah mengalami satu kali revisi yaitu pada tanggal 10 Juni 2026.

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	1,471,621,113
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	9,000,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	416,321,078
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	33,481,760
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang	0	0	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	36,930,459

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	5,343,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	2,948,119
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	42,592,741
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	186,643,620
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	172,202,460

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	3,620,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	12,873,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	15,467,200
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	68	3,409,083,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	10,256,450
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang				33.33	33.33	33.33	66.67	66.67	66.67	100	100	100	960,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	63,234,000
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	20	70	70	82.5	82.5	100	100	100	100	7	56,651,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	5	5	20	50	70	70	80	80	100	100	100	3	66,962,000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	20	55	60	85	100	100	100	100	100	1	20,620,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			15	15	15	45	70	80	90	95	95	27.27	7,560,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	21.25	25	25	25	28.75	38.75	42.5	52.5	60	63.75	71.25	88.75	251,484,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	15,162,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.92	24,617,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												86.69	6,417,488,060
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												76.45	1,408,605,060

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Organisasi yang optimal	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,400,811,630
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.91	1,337,168,250
														Total	16,899,707,000

Tabel 2.3
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Batam (awal)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	1,471,621,113
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	9,000,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	416,321,078
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	33,481,760
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang	0	0	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	36,930,459

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	5,343,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	2,948,119
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	42,592,741
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	186,643,620
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	172,202,460

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	3,620,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	12,873,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	15,467,200
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	68	3,409,083,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	10,256,450
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang				33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	66.67	66.67	66.67	100	960,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	63,234,000
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	20	45	70	70	95	100	100	100	100	7	56,651,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	5	5	20	50	70	70	90	100	100	100	100	3	66,962,000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	20	25	50	70	100	100	100	100	100	1	20,620,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			15	47.73	47.73	47.73	47.73	47.73	47.73	49.17	61.67	27.27	7,560,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	21.25	25	25	28.75	28.75	38.75	42.5	52.5	60	63.75	71.25	88.75	251,484,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	15,162,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.92	24,617,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												86.69	6,417,488,060
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												76.45	1,408,605,060

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Organisasi yang optimal	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,400,811,630
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.91	1,337,168,250
														Total	16,899,707,000

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Batam (Revisi 10 Juni 2026)

Revisi RAPK yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2026 untuk menyesuaikan target 6 indikator kinerja. Target yang dilakukan perubahan berada di bulan April sampai dengan November (berbeda setiap indikator kinerja). Adapun target indikator kinerja yang direvisi adalah:

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Dengan dilakukannya pemotongan anggaran dan penyesuaian target untuk pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target RAPK tahun 2026 dengan mempertimbangkan:

   - Target aktual pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai DIPA terbaru adalah sebanyak 2 sarana.
   - Target awal pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sebanyak 3 sarana yang dijadwalkan 1 sarana setiap triwulan.
   - Dengan adanya penyesuaian target menjadi 2 sarana maka jadwal pemeriksaan disesuaikan dari bulan April, Juli dan Oktober menjadi bulan April dan September.

   Dalam dokumen PK dan RAPK target akan masih tetap tercantum 3 sarana dikarenakan pengajuan revisi target tahunan belum dibuka oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Sebanyak satu sarana yang akan dikeluarkan dari target tahunan sementara ini akan ditargetkan pada bulan Desember. Target akan disesuaikan kembali saat pengajuan revisi Target PK telah dibuka oleh Biro Perencanaan dan Keuangan

	Target RAPK								
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Target semula	33.33	33.33	33.33	66.67	66.67	66.67	100.00	100.00	100.00
Realisasi	33.33								
Menjadi	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	66.67	66.67	66.67	100.00

Tabel 2.5
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

2. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

   Berdasarkan situasi dan kondisi sampai dengan bulan April dan berdasarkan pedoman pelaksanaan program maka dilakukan revisi dengan pertimbangan:

   - Tahapan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah yang semula direncanakan April bergeser ke bulan Mei dikarenakan kesiapan pihak sekolah.
   - Mengikuti pergeseran kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, jadwal kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diubah semula pada bulan Juni dan Agustus menjadi pelaksanaan sekaligus pada bulan Juli. Pelaksanaan mundur satu bulan namun akan lebih cepat selesai dibanding rencana awal.
   - Untuk tiga kegiatan lainnya tidak ada perubahan.
   - Seluruh kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan (jadwal) pada manual IKU.

	Target RAPK								
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Target semula	70.00	70.00	82.50	82.50	100.00	100.00	100.00	100.00	7
Realisasi	45.00								
Menjadi	45.00	70.00	70.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	7

Tabel 2.6
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

3. Jumlah Desa Pangan Aman

   Berdasarkan situasi dan kondisi sampai dengan bulan April dan berdasarkan pedoman pelaksanaan program maka dilakukan revisi dengan pertimbangan:

   - Tahapan Advokasi, pelatihan kader dan bimtek komunitas tetap seprti rencana awal.
   - Melihat kesiapan Pihak Desa dan Balai POM di Batam serta berpedoman pada jadwal di Manual IKU maka kegiatan dijadwal ulang menjadi lebih cepat yaitu bulan Juli.

- Dikarenakan pada bulan Juli berfokus pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi maka kegiatan pengawalan dijadwal ulang menjadi bulan Agustus.
- Seluruh kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan (jadwal) pada manual IKU.

	Target RAPK								
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Target semula	50.00	70.00	70.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	3
Realisasi	50.00								
Menjadi	50.00	70.00	70.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3

Tabel 2.7
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Jumlah Desa Pangan Aman

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

   Berdasarkan situasi dan kondisi sampai dengan bulan April dan berdasarkan pedoman pelaksanaan program maka dilakukan revisi dengan pertimbangan:

   - Tahapan Advokasi telah selesai dilaksanakan dan selesai lebih cepat dari target.
   - Melihat kesiapan Pihak Pasar maka kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dijadwal ulang menjadi bulan Mei yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan April.
   - Pelaksanaan akan dilakukan sekaligus di bulan Juni. Hal ini mengakibatkan Awal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur namun penyelesaian kegiatan lebih awal dari perencanaan sebelumnya.
   - Dikarenakan pada bulan Juni berfokus pada kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar maka Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi dijadwal ulang menjadi Juli
   - Pengawalan tetap akan dilaksanakan pada bulan Juli
   - Seluruh kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan (jadwal) pada manual IKU.

	Target RAPK								
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Target semula	55.00	60.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1

Realisasi	25.00								
Menjadi	25.00	50.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1

Tabel 2.8
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

   Berdasarkan situasi dan kondisi sampai dengan bulan April dan berdasarkan pedoman pelaksanaan program maka dilakukan revisi dengan pertimbangan:

   - Pada RAPK awal, target UMKM disusun hanya untuk UMKM pangan olahan. Saat berjalannya tahun 2026, terdapat UMKM Obat Bahan Alam yang dapat didampingi dan telah ditetapkan sebagai target UMKM yang akan didampingi tahun 2026. Penetapan dilakukan pada bulan Februari.
   - Dengan adanya perbedaan jenis UMKM pada perencanaan dan realisasi sehingga terdapat perbedaan perhitungan persentase progress indikator Kinerja. Hal ini berpotensi akan terus terjadi perbedaan jika RAPK tidak disesuaikan.
   - Target sampai dengan bulan Maret dapat terlampaui dengan dilaksanakannya 2 tahapan pendampingan UMKM pangan olahan dan satu tahapan pendampingan UMKM Obat Bahan Alam
   - Dengan telah berjalannya sebagian tahapan kegiatan, dapat dilihat bahwa kesiapan UMKM untuk melaksanakan kegiatan pendampingan sulit dikendalikan oleh Balai POM di Batam sehingga sulit menentukan jadwal pelaksanaan yang pasti. Untuk itu beberapa tahapan kegiatan yang belum terlaksana dijadwal ulang/dimundurkan dari jadwal awal. Namun Balai POM di Batam akan terus berupaya melaksanakan setiap tahapan kegiatan dengan sebaiknya dan lebih cepat dari jadwal yang ditargetkan.

	Target RAPK								
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

Target semula	15.00	15.00	45.00	70.00	80.00	90.00	95.00	95.00	27.27
Realisasi	47.73								
Menjadi	47.73	47.73	47.73	47.73	47.73	47.73	49.17	61.67	2127.27

Tabel 2.9
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Persentase UMKM Yang Didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

6. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

   Berdasarkan situasi dan kondisi sampai dengan bulan April dan berdasarkan pedoman pelaksanaan program maka dilakukan revisi dengan pertimbangan:

   - Dengan telah dilakukannya pemotongan anggaran, penyesuaian target DIPA terkait perkara juga dilakukan penyesuaian dan telah disahkan pada April 2026 yang semula target sebanyak 3 perkara menjadi 2 perkara.
   - Berkurangnya target Rincian Output mempengaruhi perhitungan persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT baik tahunan maupun bulanan
   - Namun dikarenakan penyesuaian akibat adanya perubahan target Rincian Output belum dibuka oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, dalam usulan perubahan RAPK ini Balai POM di Batam hanya mengusulkan perubahan target RAPK bulan April dengan menggunakan target perkara tahun 2026 masih sebanyak 3 perkara. Perubahan target bulan April dikarenakan 1 perkara baru pada tahun 2026 yang semula diprediksi masuk tahap SPDP pada bulan Mei namun dapat direalisasikan lebih awal yaitu pada bulan April.
   - Revisi PK dan RAPK dengan menggunakan target Rincian Output terbaru sebanyak 2 perkara akan diajukan saat pengajuan revisi tersebut telah dibuka oleh Biro Perencanaan dan Keuangan

	Target RAPK								
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Target semula	25.00	28.75	38.75	42.50	52.50	60.00	63.75	71.25	88.75
Realisasi	28.75								
Menjadi	28.75	28.75	38.75	42.50	52.50	60.00	63.75	71.25	88.75

Tabel 2.10
Tabel Semula Menjadi Revisi Target RAPK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Batam merupakan analisis terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pengawasan Obat dan Makanan terutama di wilayah kerja Balai POM di Batam. Adapun strategi Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Sistem Pengawasan Pre–Post Market sediaan farmasi dan pangan olahan yang berbasis risiko**

   Melalui strategi ini, Balai POM di Batam mengantisipasi ancaman dan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat terjamin keamanan, manfaat dan mutunya maka Balai POM di Batam senantiasa meningkatkan pengawasan baik pre market dan Post Market yang berbasis risiko.

   Dalam tahap pre market, Balai POM memperketat evaluasi dan verifikasi terhadap produk sebelum memperoleh izin edar. Proses ini mencakup penilaian dokumen, pemastian pemenuhan standar mutu dan keamanan, hingga memastikan produsen memiliki fasilitas yang sesuai dengan ketentuan Cara Pembuatan yang Baik. Pendekatan berbasis risiko diterapkan dengan memprioritaskan penilaian pada produk dan pelaku usaha yang memiliki potensi risiko lebih tinggi.

   Pada tahap Post market, Balai POM di Batam melakukan pengawasan secara berkala dan intensif melalui sampling, pemeriksaan dan pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu Balai POM di Batam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang berada di wilayah kerja Balai POM di Batam.

Selain itu, arah pengawasan ke depan juga akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans. Perluasan cakupan pengawasan BPOM termasuk pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran.

2. **Penguatan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Dengan strategi ini, Balai POM di Batam ingin menciptakan lingkungan dengan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjamin aman, legal dan terpercaya. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang membahayakan bagi kesehatan.

   Strategi ini menekankan pada dua aspek yaitu pencegahan dan penindakan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam hal pencegahan, Balai POM di Batam terus meningkatkan kegiatan patroli siber. Patroli siber BPOM bertujuan untuk mendeteksi, mengawasi, dan menindak peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, palsu, atau tidak layak edar secara online di website, media sosial, dan marketplace untuk melindungi kesehatan masyarakat, dengan cara berkoordinasi dengan Kominfo untuk takedown konten ilegal dan memberikan rekomendasi ke e-commerce. Balai POM di Batam juga melaksanakan analisis kerawanan kejahatan untuk mengidentifikasi, memetakan dan mencegah potensi tindak pidana terkait peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal atau berbahaya.

   Balai POM di Batam melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki juga melaksanakan penindakan terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kegiatan pengawasan dan intelijen.

3. **Peningkatan Kapasitas SDM, Laboratorium, dan Transformasi Digital**

   Dalam rangka memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta menjawab kemajuan yang terus terjadi, Balai POM di Batam menjalankan strategi untuk melaksanakan pengembangan SDM,

laboratorium serta transformasi digital. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan menyusun rencana pengambangan kompetensi pegawai secara terstruktur dan sesuai dengan tuntutan kinerja baik kemampuan teknis maupun manajerial dan sosiokultural. Dengan SDM yang kompeten, Balai POM di Batam akan dapat terus berkembang sesuai tuntutan perkembangan yang ada.

Laboratorium menjadi pilar utama dalam memastikan keamanan, mutu, dan efikasi sediaan farmasi serta pangan olahan yang beredar melalui pengujian ilmiah dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis serta mendukung fungsi pengawasan. Oleh karena itu penguatan laboratorium mutlak untuk dilaksanakan. Penguatan laboratorium Balai POM di Batam dilaksanakan dengan pemenuhan standar peralatan, modernisasi peralatan, penerapan sistem manajemen terintegrasi maupun pemenuhan kebutuhan pendukung laboratorium.

Strategi ini juga menekankan pada transformasi digital. Dengan tuntutan untuk melaksanakan pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah maka Balai POM di Batam terus berupaya melakukan transformasi digital dalam proses setiap pekerjaan. Dengan transformasi digital, penyampaian informasi, penyelesaian pelayanan publik serta pengambilan keputusan dapat terlaksana lebih cepat dan transparan.

4. Penguatan Kolaborasi, Sinergi, dan Kemitraan Lintas Sektor

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka Balai POM di Batam menerapkan strategi Kolaborasi, Sinergi, dan Kemitraan Lintas Sektor. Hal ini mengingat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terdapat saling keterkaitan kewenangan antar beberapa lintas sektor. Kolaborasi, Sinergi, dan Kemitraan yang dilakukan antara lain dengan Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana), pemerintah daerah, Bea Cukai serta lembaga pendidikan. Dengan strategi ini akan terbangun pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang menyeluruh dan terintegrasi.

5. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Partisipasi Masyarakat

Dengan tujuan meningkatkan perlindungan masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan maka perlu adanya strategi peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi serta partisipasi masyarakat. Terjaminnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermanfaat dan bermutu merupakan tugas pengawasan yang diamanahkan kepada Badan POM. Tugas ini membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk masyarakat selaku konsumen.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen maka Balai POM di Batam terus melaksanakan program KIE dengan berbagai macam pendekatan seperti penyuluhan secara langsung, penyuluhan kepada komunitas dan penyuluhan melalui media digital yang dapat menjangkau lebih luas. Penyebaran informasi juga akan terus dilaksanakan melalui berbagai macam kanal seperti website resmi BPOM, media sosial, media massa termasuk dengan lembaga penyiaran.

Strategi ini juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Melalui program ini, masyarakat menjadi mitra dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

6. Peningkatan Regulatory Assistance dan Pendampingan Kepada Pelaku Usaha

Untuk mendukung pertumbuhan industri sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Batam menetapkan strategi peningkatan Regulatory Assistance dan pendampingan kepada pelaku usaha. Strategi ini bertujuan menciptakan industri yang patuh regulasi, aman dan berdaya saing serta sebagai dukungan nyata untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam implementasinya, Balai POM di Batam mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas

akses pasar. Dukungan terhadap UMKM oleh Balai POM di Batam dilaksanakan dengan program pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Pelaku usaha UMKM didorong untuk secara mandiri menerapkan aspek-aspek Good Manufacturing Practices (GMP) melalui skema pendampingan partisipatif. Pemberian bimbingan teknis oleh fasilitator disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, termasuk aspek keamanan dan mutu. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing produk lokal, baik pangan olahan, obat bahan alam, maupun kosmetik.

7. **Penguatan Dukungan Manajemen dan Reformasi Birokrasi**

   Balai POM di Batam memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan ini dengan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Mutu, standar uji dan kalibrasi laboratorium, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

   Penerapan strategi ini merupakan upaya strategis untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani, dengan fokus pada komitmen pimpinan, perubahan budaya kerja, peningkatan kualitas SDM, dan transparansi layanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kepuasan publik.

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

KRITERIA	CAPAIAN	NOTIFIKASI
Tidak Dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Tabel 2.11
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Penetapan ini kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung nilai sasaran strategis/Kegiatan (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Nilai berikutnya yang dilakukan perhitungan adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO terdiri dari NKO periodik dan NKO tahunan.

1. NKO Periodik

   NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian

kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

Tabel 2.12
Contoh Perhitungan NKO Periodik

2. NKO Tahunan.

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Tabel 2.13
Contoh Perhitungan NKO Tahunan

Keterangan:
(1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja
(2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.



Grafik 2.1
Sumber Predikat AKIP

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Tabel 2.14
Besaran Koreksi Capaian NKO

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Tabel 2.15
Predikat Capaian NKO

Dalam pengukuran kinerja organisasi triwulan I menggunakan perhitungan NKO periodik.

Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Batam yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM
2. Setiap bulannya ketua tim menyerahkan data kinerja kepada petugas penanggung jawab data untuk diverifikasi. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja melalui aplikasi pelaporan kinerja e-performance, Sakti Kemenkeu, Monev Bappenas, dan spreadsheet RHPK.

3. Setiap triwulan dilakukan rapat evaluasi kinerja antara Kepala Balai, struktural, seluruh ketua tim dan tim keuangan untuk membahas dan mengevaluasi data kinerja dan capaian kinerja.
4. Berdasarkan hasil rapat pembahasan capaian kinerja, tim laporan kinerja membuat draft Laporan Kinerja Interim ataupun tahunan dan diserahkan kepada seluruh ketua tim untuk dikoreksi. Draft hasil koreksi ketua tim diserahkan kepada Kepala Balai untuk disetujui dan disahkan.

ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input.* si suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input,* sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ \text{CAPAIAN OUTPUT}}{\%\ \text{CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\%\ \text{RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila IE ≥ SE : kegiatan efisien
Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 2.16

Range Perhitungan Tingkat Efisiensi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Triwulan II Tahun 2026 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis, menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan membandingkan target dan realisasi sampai dengan Triwulan II. Selain menyajikan tingkat capaian, analisis kinerja juga menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator, baik faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Batam.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Berbagai kegiatan pengawasan pre-market dan post-market, pengujian laboratorium, sertifikasi, komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh unit kerja dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun demikian, pencapaian kinerja masih dipengaruhi oleh berbagai tantangan, terutama karakteristik wilayah kerja Balai POM di Batam yang meliputi wilayah kepulauan dan perbatasan dengan mobilitas barang dan manusia yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada kompleksitas pelaksanaan pengawasan, kebutuhan sumber daya yang lebih besar, serta perlunya penerapan strategi pengawasan berbasis risiko agar pelaksanaan pengawasan tetap efektif dan efisien. Tantangan serupa juga telah diidentifikasi dalam analisis strategis organisasi, khususnya terkait wilayah perbatasan, perdagangan internasional, perdagangan digital, keterbatasan akses ke wilayah kepulauan, dan kebutuhan penguatan sinergi lintas sektor.

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja pada subbab berikut disusun tidak hanya untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian target, tetapi juga untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial serta mendorong peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan secara berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Juni 2026			
				Target	Realisasi	%Capaian Target	Normalisasi % Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.63	99.92	109.05	109.05
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26.67	-	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	100.00	108.70	108.70
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100	100.00	100.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	100.00	108.70	108.70
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	87.00	92.56	106.39	106.39

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Juni 2026			
				Target	Realisasi	%Capaian Target	Normalisasi % Capaian
			ditindaklanjuti oleh stakeholder				
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.00	100.00	102.04	102.04
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.00	100.00	102.04	102.04
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.63	99.77	102.20	102.20
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65	110.00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.58	97.68	104.38	104.38

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Juni 2026			
				Target	Realisasi	%Capaian Target	Normalisasi % Capaian
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92.00	100.00	108.70	108.70
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	–	-	-
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.70	68.1	100.64	100.64
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33.33	33.33	100.00	100.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Juni 2026			
				Target	Realisasi	%Capaian Target	Normalisasi % Capaian
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.04	87.75	100.82	100.82
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70.00	70.00	100.00	100.00
		19	Jumlah desa pangan aman	70.00	70.00	100.00	100.00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70.00	70.00	100.00	100.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	47.73	63.33	132.70	110.00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38.75	38.75	100.00	100.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Juni 2026			
				Target	Realisasi	%Capaian Target	Normalisasi % Capaian
	di wilayah kerja UPT						
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	100.00
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) (Rata-rata capaian IKU 1-28)							**103.68**

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, sebagian besar indikator kinerja Balai POM di Batam menunjukkan capaian yang sesuai bahkan melampaui target antara waktu yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan, baik pada aspek pre-market maupun post-market, yang didukung oleh pengawasan berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun demikian, upaya peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun. Sampai dengan Triwulan II, masih terdapat beberapa indikator yang belum memiliki realisasi karena pengukurannya dilakukan pada akhir tahun atau bergantung pada pelaksanaan kegiatan tertentu (event-based). Oleh karena itu, capaian indikator tersebut belum dapat disajikan pada periode pelaporan ini dan akan diukur sesuai tahapan pelaksanaannya pada triwulan berikutnya.

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Triwulan II Tahun 2026 terhadap 8 sasaran kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan analisis capaian kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Analisis tersebut tidak hanya menyajikan tingkat pencapaian indikator kinerja, tetapi juga menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian, efektivitas pemanfaatan sumber daya, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kinerja organisasi pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.63	93.5	91.63	99.93	99.92	109.05	Sangat Baik		109.05	Tercapai / Melampaui		106.87
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.00	30		24.44	26.67	-	-	-	98.77	Akan Tercapai		88.89
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	92.00	95	92.00	100.00	100.00	108.70	Sangat Baik		108.70	Tercapai / Melampaui		105.26

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
			2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	0	100	100.00	Baik		100.00	Tercapai / Melampaui		100.00
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	95	92.00		100.00	108.70	Sangat Baik		108.70	Tercapai / Melampaui		105.26
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	87.00	90	87.00	66.27	92.56	106.39	Sangat Baik		106.39	Tercapai / Melampaui		102.84

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
			2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder												
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.00	96.5	98.00	100.00	100.00	102.04	Sangat Baik		102.04	Tercapai / Melampaui		103.63
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	98.00	95	98.00	100.00	100.00	102.04	Sangat Baik		102.04	Tercapai / Melampaui		105.26

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
			sesuai ketentuan												
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.63	99.95	97.63	99.26	99.77	102.20	Sangat Baik		102.20	Tercapai / Melampaui		99.82
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.00	95	85.00	99.64	100.00	117.65	Tidak Dapat Disimpulkan		102.04	Tercapai / Melampaui		105.26

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.58	96.78	93.58	95.56	97.68	104.38	Sangat Baik		104.38	Tercapai / Melampaui		100.93
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92.00	95	92.00	100	100.00	108.70	Sangat Baik		108.70	Tercapai / Melampaui		105.26
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68.00	82.2	67.70	67.69	68.1	100.64	Sangat Baik		100.19	Tercapai / Melampaui		82.88
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.	100	33.33	-	33.33	100	Baik		33.33	Perlu Upaya Keras		33.33
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.04	89.62	87.04	93.07	87.75	100.82	Sangat Baik		100.82	Tercapai / Melampaui		97.91
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan	7	14	70.00	25.00	70.00	100.00	Baik		-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
			keamanan pangan												
		19	Jumlah desa pangan aman	3	6	70.00	25.00	70.00	100.00	Baik		-	-	-	-
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	70.00	25.00	70.00	100.00	Baik		-	-	-	-
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27.27	84.85	47.73	15.91	63.33	132.70	Tidak Dapat Disimpulkan		-	-	-	74.64

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	88.75	98	38.75	25.00	38.75	100.00	Baik		43.66	Perlu Upaya Keras		39.54
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91.00	94	50.00	50.00	50.00	100.00	Baik		54.95	Perlu Upaya Keras		53.19
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.92	4.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86.69	89.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	76.45	82.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.91	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
91.63	93.5	91.63	99.92	109.05	Sangat Baik		109.05	Tercapai / Melampaui		106.87

Tabel 3.3
Realisasi Dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

(A) Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

- Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),
  30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),
  Mencakup kesesuaian dengan:
  - Target sampel,
  - Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
  - Renlak Kategori Kelas Terapi,
- Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
  20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).
  Mencakup kesesuaian dengan:
  - Renlak periode/waktu sampling,
  - Ketentuan Evaluasi Penandaan
- Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
  20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).
  Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
- Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:

- Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
- Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

○ Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)
10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

(B) Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e. Mencakup penentuan kesimpulan:

- Penandaan
- Pengujian
- Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

(C) Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/

target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

(D) Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

- Pemenuhan target pengawasan

  (a1 + a2) /2

  Keterangan:

  a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

  a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

  *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

  **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- Kesesuaian pelaksanaan sampling

  (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

  Mencakup kesesuaian dengan:

  1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
  2. Pemilihan parameter uji

  Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

  (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

  Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

  1. SLA Sampling
  2. SLA Pengujian
  3. SLA Pelaporan

  Catatan:

  Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

  (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

  Mencakup penentuan kesimpulan:

  1. Penandaan
  2. Pengujian
  3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

  Catatan:

  Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- Tanggapan atas surat tindak lanjut

  (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

  Mencakup surat:

  1. Edaran pembersihan pasar
  2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:
Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Realisasi indikator pada Triwulan II mencapai 99,92% dari target 91,63%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 109,05% dengan kategori Sangat Baik. Berdasarkan komoditas, realisasi kinerja terdiri atas obat sebesar 99,89%, obat bahan alam 99,80%, suplemen kesehatan 100%, dan kosmetik 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sampling, pengawasan penandaan, dan pengujian telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada indikator ini, penilaian tidak lagi didasarkan pada jumlah hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), melainkan pada tingkat kesesuaian pelaksanaan sampling, pengawasan penandaan, dan pengujian terhadap Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, serta pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) lain yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh perencanaan sampling yang baik, koordinasi yang efektif antara unit pengawasan dan laboratorium, serta konsistensi dalam penerapan pedoman teknis pada setiap tahapan pelaksanaan. Ke depan, upaya pengendalian mutu pelaksanaan sampling dan pengujian akan terus diperkuat untuk mempertahankan capaian kinerja sekaligus memastikan hasil pengawasan tetap akurat, andal, dan akuntabel.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
91.63	99.93	109.06	Sangat Baik	91.63	99.92	109.05	Sangat Baik	(0.01)

Tabel 3.4
Realisasi Dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya
Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Berdasarkan hasil perbandingan dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 99,92% dengan capaian kinerja sebesar 109,05% dan tetap berada pada kategori Sangat Baik. Dibandingkan dengan Triwulan I yang mencatat realisasi sebesar 99,93% dengan capaian 109,06%, terjadi penurunan realisasi yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,01%, sementara target pada kedua triwulan tetap sebesar 91,63%.

Penurunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian indikator karena realisasi tetap jauh melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sampling, pengujian, dan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko tetap terlaksana secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Stabilnya capaian kinerja juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara fungsi pengawasan dan laboratorium serta penerapan pedoman teknis secara berkelanjutan dalam mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 99,92% dengan capaian kinerja sebesar 109,05% (kategori Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses sampling, pengujian, dan tindak lanjut terhadap sampel telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan laboratorium, perencanaan sampling yang terstruktur, serta pengendalian proses pengujian yang berjalan secara efektif. Seluruh sampel yang diterima dapat diproses, diuji, dan dilaporkan tepat waktu melalui mekanisme pelaporan yang terintegrasi, sehingga mendukung ketepatan tindak lanjut hasil pengawasan.

Meskipun terdapat beberapa kendala operasional, seperti keterlambatan pengadaan reagen tertentu, pemeliharaan beberapa peralatan laboratorium, dan penyesuaian terhadap jenis sampel yang diterima, kendala tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian indikator. Seluruh permasalahan dapat diatasi melalui pengaturan prioritas pengujian, koordinasi lintas fungsi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laboratorium, serta percepatan pemenuhan kebutuhan sarana pendukung.

Untuk mempertahankan capaian kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Batam akan terus memperkuat pengendalian mutu pelaksanaan sampling dan pengujian, meningkatkan ketepatan waktu pelaporan hasil pengujian, mengoptimalkan pemeliharaan peralatan laboratorium, serta memperkuat monitoring dan

evaluasi secara berkala guna mengantisipasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.5
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi antara fungsi pemeriksaan, sampling, pengujian laboratorium, dan pelaporan hasil pengawasan. Sinergi antar unit tersebut memastikan seluruh tahapan pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan indikator didukung oleh penguatan koordinasi dan monitoring secara berkala antara Tim Pemeriksaan dan Tim Pengujian, sehingga pelaksanaan sampling, pengujian, serta tindak lanjut hasil pengawasan dapat berjalan sesuai perencanaan. Selain itu, penerapan metode analisis yang telah terverifikasi serta sistem pengendalian mutu laboratorium turut menjamin keabsahan dan keandalan hasil pengujian.

Dari aspek sarana dan prasarana, ketersediaan peralatan laboratorium yang terpelihara dengan baik, didukung kegiatan kalibrasi, verifikasi, serta pemeliharaan rutin, mampu menjaga kelancaran proses pengujian. Meskipun terdapat kendala berupa keterlambatan pengadaan beberapa reagen dan bahan pendukung, kegiatan pengujian tetap dapat diselesaikan melalui

optimalisasi pemanfaatan sumber daya laboratorium dan pengaturan prioritas pekerjaan.

Keberhasilan pencapaian indikator juga didukung oleh penerapan sistem pelaporan hasil pengujian yang terintegrasi sehingga proses penyampaian hasil pengawasan dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel. Pemanfaatan sistem informasi tersebut meningkatkan efektivitas koordinasi antarunit sekaligus mempercepat tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Batam akan terus memperkuat koordinasi lintas fungsi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pengelolaan sarana laboratorium, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan sampling, pengujian, dan tindak lanjut hasil pengawasan tetap berjalan secara efektif dan konsisten.

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
27	30	-	26.67	-	-	-	98.77	Akan Tercapai		88.89

Tabel 3.6
Realisasi Dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

dibandingkan dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Adapun cara perhitungan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM **= (A / B) x 100%.**

A: merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B: Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Target indikator ini bersifat tahunan sehingga pada triwulan II tidak ada perbandingan realisasi dengan target. Namun progres pada triwulan II, realisasi sebesar 26.67%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026, persentase capaian sebesar 98.77%. Balai POM di Batam terus berupaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
-	24.44	-	-		26.67	-	-	2.23

Tabel 3.7
Realisasi Dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Jika dibandingkan antara realisasi triwulan II dengan triwulan I, maka realisasi triwulan II mengalami peningkatan. Hal ini bermakna, fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan kejadian KTD/ESO terus bertambah. Seiring dengan peningkatan pelaporan KTD/ESO, hal ini juga akan meningkatkan pemantauan keamanan obat yang beredar dan akan meningkatkan keselamatan pasien. Laporan ini menjadi instrumen penting dalam farmakovigilans (pengawasan obat).

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026, pelaporan meningkat 2,23% dari 24,44 % menjadi 26,67%. Peningkatan bertahap ini menunjukkan bahwa Balai POM di Batam terus mendorong Fasyankes yang sudah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk aktif melakukan pelaporan KTD/ESO di Fasilitas Pelayanannya.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan partisipasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pelaporan KTD/ESO setelah mendapatkan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans, juga dipengaruhi tindak lanjut yang dilakukan oleh Balai POM

di Batam pada TW II yaitu melakukan supervisi pada fasyankes yang berpotensi memiliki KTD/ESO tinggi.

Pada Triwulan II Tahun 2026, belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE pada TW I melakukan pelaporan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya pemahaman tenaga kesehatan terkait pentingnya pelaporan KTD/ESO, serta belum terbangunnya kebiasaan pelaporan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian indikator, telah dilakukan upaya berupa penguatan komunikasi, pengarahan pengisian laporan KTD/ESO saat pengawasan ke sarana pelayanan dan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk melalui supervisi pelaporan KTD/ESO.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.8
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja adalah

1. Monitoring dan evaluasi internal kemajuan capaian kinerja Balai POM di Batam secara konsisten dilakukan secara berkala setiap bulan
2. Pembentukan media komunikasi bersama BPOM di Batam melalui whatsapp group dengan petugas fasyankes yang telah mendapatkan KIE KTD/ESO

3. Supervisi pelaporan KTD/ESO ke fasyankes oleh petugas Balai POM di Batam

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung indikator ini telah berjalan dengan baik, khususnya melalui pelaksanaan KIE farmakovigilans kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Penambahan supervisi dalam aktivitas pemantauan pelaporan KTD/ESO meningkatkan secara langsung jumlah pelaporan KTD/ESO pada Triwulan II.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
92	95	92	100	108.70	Sangat Baik		108.70	Tercapai / Melampaui		105.26

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;

2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kadaluarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan Formula persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F.

(A) Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

(B) Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

(C) Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(D) Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

(E) Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(F) Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Realisasi triwulan II sebesar 100% dari target 92% atau dengan persentase capaian terhadap target sebesar 108.70% dengan kategori sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target tahunan maka masuk dalam kategori tercapai/melampaui. Namun masih terdapat target sampel pangan olahan yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai renlak Juli sampai dengan Desember.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
91.63	99.93	109.06	Sangat Baik	91.63	99.92	109.05	Sangat Baik	(0.01)

Tabel 3.10
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 99,93% dengan persentase capaian 109,06% dan berada pada kategori Sangat Baik. Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi kinerja tercatat sebesar 99,92% dengan persentase capaian 109,05%, yang juga tetap berada pada kategori Sangat Baik.

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, realisasi kinerja mengalami penurunan yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,01 (dari 99,93% menjadi 99,92%). Demikian pula persentase capaian mengalami penurunan sebesar 0,01 (dari 109,06% menjadi 109,05%). Meskipun terjadi sedikit penurunan, perubahan tersebut tidak signifikan dan tidak memengaruhi kategori penilaian kinerja yang tetap berada pada kategori Sangat Baik.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tetap berjalan secara konsisten dan mampu mempertahankan kinerja di atas target yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang melebihi 100%, dapat disimpulkan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga terlampaui.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik, meskipun mengalami penurunan yang sangat kecil dibandingkan Triwulan I, yaitu sebesar 0,01. Penurunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja karena realisasi masih jauh melampaui target yang telah ditetapkan dan tetap berada pada kategori Sangat Baik.

Keberhasilan dalam mempertahankan capaian kinerja dipengaruhi oleh terlaksananya kegiatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko secara konsisten sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan, fungsi pengujian dan bagian perencanaan dalam penyusunan serta pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Sampling sediaan farmasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Adapun penurunan yang sangat kecil diduga disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah sampel yang diperiksa dan ditindaklanjuti pada masing-masing triwulan maupun variasi waktu penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pengujian. Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja antara lain memperkuat koordinasi antar unit pelaksana, meningkatkan pemantauan terhadap proses tindak lanjut hasil pengawasan, memastikan penyelesaian tindak lanjut dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan, serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.11
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain:

1. Penentuan bersama rencana pelaksanaan sampling antara tim pemeriksaan dan pengujian serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Peningkatan jumlah metode analisa yang terverifikasi di Laboratorium BPOM Batam dalam menjamin keabsahan hasil pengujian.
3. Ketersediaan sarana pendukung pengujian seperti baku pembanding, reagensia, media mikrobiologi dan penunjang lainnya.
4. Kondisi alat laboratorium bekerja optimal karena didukung pemeliharaan alat, kalibrasi dan pengecekan antara.
5. Pelaksanaan pengujian sampel dan pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara tepat waktu.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu mendukung pencapaian indikator kinerja secara optimal. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek keberlanjutan capaian, khususnya melalui peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan pangan olahan.

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
100	100	100	100	100	Baik		100	Tercapai / Melampaui		100.00

Tabel 3.12
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan Dan Formula persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

$$\frac{\Sigma\,(30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

A Adalah jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B adalah jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C adalah jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

Pada triwulan II 2026, Balai POM di Batam menerima sampel KLB sebanyak 17 sampel. Sampel diterima pada bulan April sebanyak 12 sampel dan pada bulan Mei sebanyak 5 sampel. Seluruh sampel yang diterima telah diuji sesuai ketentuan. Dari hasil upaya tersebut, realisasi IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II sebesar 100% dari target 100% atau dengan dengan persentase capaian sebesar 100% yang masuk kategori Baik. Dikarenakan target IK ini sebesar 100%/maksimal menyebabkan kategori tertinggi yang dapat dicapai hanya dalam kategori baik. Sedangkan untuk mencapai kategori sangat baik dimana capaian harus diatas 100% dan tidak melebihi 110% tidak dapat dicapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
100.00	-	-	-	100.00	100	100.00	Baik	-

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Berdasarkan Tabel di atas, indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar memiliki target sebesar 100%. Pada Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat realisasi karena tidak ada sampel KLB keracunan pangan yang diterima atau diuji pada periode tersebut, sehingga capaian kinerja belum dapat diukur. Sementara itu, pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi mencapai 100% dengan persentase capaian 100,00% dan berada pada kategori Baik.

Karena tidak terdapat realisasi pada Triwulan I, maka tidak dapat dilakukan perhitungan peningkatan atau penurunan kinerja antar triwulan. Namun demikian, capaian pada Triwulan II menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB keracunan pangan yang diterima pada periode tersebut telah diuji sesuai standar yang berlaku, sehingga target indikator berhasil dicapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Triwulan II terdapat jumlah sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) yang diterima dan diuji sebanyak 17 sampel. Dari jumlah tersebut, 4 sampel dikirim oleh Puskesmas Tanjung Batu,8 sampel dikirim oleh Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dan 5 sampel dikirim oleh dinas kesehatan Kota Batam Parameter

pengujian yang dilakukan meliputi Angka *Staphylococcus aureus*, identifikasi *Salmonella*, Angka *Clostridium perfringens*, MPN *Escherichia coli*, identifikasi boraks, Angka *Bacillus cereus*, serta *Escherichia coli*.

Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam proses pengiriman dan penerimaan sampel Kejadian Luar Biasa (KLB). Selain itu, penetapan prioritas terhadap pengujian sampel KLB di laboratorium turut mendukung pelaksanaan pengujian secara tepat waktu sehingga hasil pemeriksaan dapat segera dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan KLB.

Upaya tersebut juga didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Program-program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pengawasan keamanan pangan, khususnya dalam penanganan KLB keracunan pangan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian target meliputi:

- Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan KLB Keracunan Pangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
- Pertemuan lintas sektor yang diselenggarakan oleh POLDA Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kota Batam dalam rangka pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Koordinasi dengan lintas sektor, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN), dalam pelaksanaan pengawasan KLB yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada penjamah pangan mengenai keamanan pangan (*food safety*) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melibatkan BPOM di Batam sebagai narasumber.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.14
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan penyegaran (*refreshment*) mengenai penanganan dan pengujian sampel KLB Keracunan Pangan yang dilaksanakan secara daring sebagai upaya peningkatan kompetensi personel.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengujian, meliputi baku pembanding, reagensia, media mikrobiologi, serta bahan dan peralatan penunjang lainnya yang memadai.
3. Kondisi peralatan laboratorium yang berfungsi secara optimal melalui pelaksanaan pemeliharaan rutin, kalibrasi, dan pengecekan antara secara berkala.
4. Pelaksanaan pengujian sampel dan penyampaian laporan hasil pengawasan secara tepat waktu sehingga mendukung percepatan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan.

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
92.00	95	92.00	100.00	108.70	Sangat Baik		108.70	Tercapai / Melampaui		105.26

Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara perhitungan dan formula **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

(A) Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan: (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

(B) Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

(C) Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(D) Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

(E) Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

(F) Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Target IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru dimulai pada triwulan II yaitu pada bulan

Juni yaitu sebesar 92%. Dari target sampel tahun 2026, seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sampel yang diuji oleh laboratorium Balai POM di Batam termasuk sampel yang disampling oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang. Persentase realisasi dari IK ini adalah 100% atau dengan persentase capaian target sebesar 108.70% dengan kategori sangat baik. Kategori capaian terhadap target tahunan adalah tercapai/melampaui.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisas	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
-	-	-	-	92.00	100.00	108.70	Sangat Baik	100.00

Tabel 3.16
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya
Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan I Tahun 2026 belum ditetapkan target maupun realisasi pengukuran indikator ini karena pelaksanaan sampling dan pengujian sampel PIRT berisiko dijadwalkan pada Triwulan II Tahun 2026 sesuai perencanaan pengawasan. Pada Triwulan II Tahun 2026, Balai POM di Batam berhasil merealisasikan capaian sebesar 100,00% dari target 92,00%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 108,70% dengan kategori Sangat Baik.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh terlaksananya seluruh tahapan sampling dan pengujian sampel PIRT berisiko sesuai pedoman yang berlaku, mulai dari penetapan target sampling berbasis analisis risiko, kesesuaian

parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan pelaporan, hingga tindak lanjut terhadap sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai ketentuan. Koordinasi yang baik antara petugas pengawas dan laboratorium juga mendukung penyelesaian proses pengujian dan pelaporan secara tepat waktu.

Selain itu, Balai POM di Batam telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batam dan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna sebagai instansi pembina Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah pelaksanaan sampling. Koordinasi dilakukan melalui penyampaian surat yang memuat hasil sampling dan hasil pengujian, sekaligus daftar produk PIRT yang telah dilakukan sampling oleh Balai POM di Batam. Penyampaian informasi tersebut bertujuan agar Dinas Kesehatan memiliki data produk yang telah diawasi sehingga dapat menghindari terjadinya duplikasi (double sampling) terhadap produk PIRT yang sama di peredaran, serta mengoptimalkan cakupan pengawasan terhadap produk PIRT lainnya belum dilakukan penyamplingan.

Surat tersebut juga menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha PIRT yang masih ditemukan tidak memenuhi ketentuan, baik terkait ketidaksesuaian pelabelan maupun produk yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil pengujian yaitu parameter sulfit pada gula aren.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Batam akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, meningkatkan monitoring terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap pelaku usaha PIRT. Monitoring tersebut diharapkan

dapat memastikan bahwa seluruh hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara efektif serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan, mutu, dan label pangan olahan, sekaligus memperkuat sinergi pengawasan antara Balai POM dan pemerintah daerah.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) berbasis risiko sesuai rencana kerja Tahun 2026. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan target sampling berdasarkan analisis risiko, pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan, pengujian laboratorium sesuai parameter yang ditetapkan, penyusunan laporan hasil pengawasan secara tepat waktu, serta pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel yang Tidak Memenuhi Syarat sesuai ketentuan.

Selain itu, pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pelaku usaha turut mendukung efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan sehingga seluruh proses dapat diselesaikan sesuai pedoman. Sinergi antara fungsi pemeriksaan, laboratorium, dan tindak lanjut pengawasan menjadi faktor utama yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini dengan kategori Sangat Baik.

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
87	90	87	92.56	106.39	Sangat Baik		106.39	Tercapai / Melampaui		102.84

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Target indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II sebesar 87%. Sedangkan realisasi triwulan II sebesar 92.56% atau dengan persentase capaian sebesar 106.39% atau dengan kategori capaian sangat baik. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 87% maka persentase capaian sebesar 106.39% dengan kategori tercapai/melampaui. Walaupun secara persentase telah melampaui target tahunan, kegiatan pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan masih akan berlanjut. Oleh karena itu akan ada rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan Balai POM di Batam dan harus ditindaklanjuti oleh lintas sektor maupun pelaku usaha. Masih dibutuhkan upaya yang terus menerus untuk mencapai target tahunan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
87.00	66.27	76.17	Cukup	87.00	92.56	106.39	Sangat Baik	26.29

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Realisasi indikator pada Triwulan II Tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I, realisasi mencapai 66,27% atau sebesar 76,17% dari target 87,00% dengan kategori Cukup. Sementara itu, pada Triwulan II realisasi meningkat menjadi 92,56%, sehingga capaian terhadap target sebesar 106,39% dengan kategori Sangat Baik. Sehingga terjadi peningkatan realisasi sebesar 26,29 poin dibandingkan Triwulan I.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin optimalnya tindak lanjut yang diberikan oleh stakeholder terhadap keputusan maupun rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Batam, baik kepada pelaku usaha maupun instansi lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan capaian indikator pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh optimalnya upaya Balai POM di Batam dalam memastikan setiap keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan memperoleh tindak lanjut dari stakeholder, khususnya pelaku usaha. Pada saat *closing meeting*, petugas memberikan penjelasan mengenai kewajiban penyusunan

Corrective Action and Preventive Action (CAPA), tata cara penyusunan, batas waktu penyampaian, serta tindakan perbaikan yang harus dilakukan atas temuan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya, dilakukan monitoring secara berkala terhadap sarana yang belum menyampaikan CAPA melalui media komunikasi dan penyampaian surat resmi sebagai pengingat. Balai POM di Batam juga menyelenggarakan Desk CAPA secara daring untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan CAPA, membantu identifikasi akar penyebab, serta memastikan tindakan korektif dan pencegahan yang diusulkan telah sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan.

Setiap CAPA yang diterima dievaluasi secara komprehensif dan diberikan surat balasan yang memuat hasil evaluasi, termasuk perbaikan, kelengkapan bukti, dan tindak lanjut yang masih perlu dipenuhi oleh pelaku usaha. Mekanisme evaluasi dan umpan balik tersebut mendorong peningkatan kualitas tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, Balai POM di Batam akan terus memperkuat monitoring penyampaian CAPA, mengoptimalkan pelaksanaan Desk CAPA, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder agar seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara tepat waktu, efektif, dan sesuai ketentuan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.19
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan monitoring penyampaian dan penyelesaian Corrective Action and Preventive Action (CAPA) secara berkala terhadap pelaku usaha yang menjadi objek pengawasan. Monitoring dilakukan untuk memastikan setiap keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan memperoleh tindak lanjut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Selain itu, Balai POM di Batam melaksanakan Desk CAPA secara daring sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha dalam menyusun CAPA yang sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan. Kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, menyusun tindakan korektif dan pencegahan yang efektif, serta memenuhi kelengkapan bukti tindak lanjut yang dipersyaratkan.

Pencapaian indikator juga didukung melalui penyampaian surat permintaan CAPA kepada sarana yang belum menyampaikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, sehingga mendorong pelaku usaha untuk segera memberikan respons terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan. Di samping itu, Balai POM di Batam secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi lintas sektor yang telah

menerima surat rekomendasi hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian sampel. Koordinasi tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing serta memperoleh umpan balik atas pelaksanaan pembinaan maupun tindakan yang telah dilakukan.

Rangkaian kegiatan tersebut terbukti mendukung peningkatan respons stakeholder terhadap keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan, sehingga capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada Triwulan II Tahun 2026 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
98.00	96.5	98.00	100.00	102.04	Sangat Baik		102.04	Tercapai / Melampaui		103.63

Tabel 3.20
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi

industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara perhitungan persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase Sarana produksi obat adalah Rata-rata dari komponen (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
   (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
   (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut rata-rata persentase sub aspek 1-6
   1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
   2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
   3) Kesesuaian format laporan inspeksi

4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dihitung dari Rata-rata komponen (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
(Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
(Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Persentase sarana produksi kosmetik dari Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil

pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Realisasi triwulan II 2026 sebesar 100% dari target triwulanan maupun tahunan sebesar 98% atau dengan capaian sebesar 102.04%. Kategori pencapaian target pada triwulan II, terhadap target triwulan II masuk dalam kategori sangat baik sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kategori tercapai/melampaui. Walaupun target tahunan maupun target jangka menengah capaian telah melebihi 100%, namun pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi akan terus dilakukan sehingga capaian triwulan II ini belum menggambarkan capaian pada akhir tahunan maupun capaian jangka menengah.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
98.00	100.00	102.04	Sangat Baik	98.00	100.00	102.04	Sangat Baik	- .00

Tabel 3.21
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Realisasi indikator pada Triwulan II Tahun 2026 tetap 100,00%, sama dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Dengan target sebesar 98,00%, capaian kinerja pada kedua triwulan mencapai 102,04% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Balai POM di Batam dalam melaksanakan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana produksi sediaan farmasi telah terjaga secara konsisten sesuai ketentuan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh terlaksananya seluruh tahapan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku, mulai dari pelaksanaan inspeksi, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, hingga tindak lanjut terhadap temuan hasil inspeksi. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal pengawasan, dengan laporan yang disampaikan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.22
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang dilaksanakan sesuai perencanaan kegiatan dan target pengawasan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan sesuai pedoman, mulai dari persiapan, pelaksanaan inspeksi, penyusunan laporan, hingga penyampaian tindak lanjut sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan.

Selain itu, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan Inspektur Kosmetik dan Inspektur Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBA SK) turut mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan inspeksi, ketepatan dalam pengambilan

kesimpulan hasil pemeriksaan, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan.

Rangkaian kegiatan tersebut memastikan seluruh proses pemeriksaan dan tindak lanjut pengawasan terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan sesuai standar, sehingga indikator kinerja dapat mencapai kategori Sangat Baik.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
98.00	95	98.00	100.00	102.04	Sangat Baik		102.04	Tercapai / Melampaui		105.26

Tabel 3.23
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
    a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
    b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
    c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
        i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
        ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)

iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)

d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.__Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Realisasi triwulan II 2026 sebesar 100% dari target triwulanan maupun tahunan sebesar 98% atau dengan capaian sebesar 102.04%. Kategori pencapaian target pada triwulan II, terhadap target triwulan II masuk dalam kategori sangat baik sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kategori tercapai/melampaui. Walaupun target tahunan maupun target jangka menengah capaian telah melebihi 100%, namun pemeriksaan sarana produksi pangan olahan akan terus dilakukan sehingga capaian triwulan II ini belum menggambarkan capaian pada akhir tahunan maupun capaian jangka menengah.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
98.00	100.00	102.04	Sangat Baik	98.00	100.00	102.04	Sangat Baik	- .00

Tabel 3.24
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Realisasi indikator pada Triwulan II Tahun 2026 tetap sebesar 100,00%, sama dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Dengan target sebesar 98,00%, capaian kinerja pada kedua triwulan mencapai 102,04% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana produksi pangan olahan telah terlaksana secara konsisten sesuai dengan perencanaan, pedoman, dan ketentuan yang berlaku.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai rencana pengawasan dan target yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan pemeriksaan, mulai dari pelaksanaan inspeksi, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, penetapan grading, hingga penyampaian tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai pedoman dan dalam batas waktu yang ditentukan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.25
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang dilaksanakan sesuai perencanaan kegiatan dan target pengawasan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan sesuai pedoman, mulai dari persiapan, pelaksanaan inspeksi, penyusunan laporan, hingga penyampaian tindak lanjut sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan.

Selain itu, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan Inspektur Pangan turut mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan inspeksi, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan.

Pencapaian indikator juga didukung oleh penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta penyampaian laporan hasil inspeksi melalui sistem pelaporan (SIPT) sesuai timeline yang telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan tersebut memastikan seluruh proses pemeriksaan dan tindak lanjut pengawasan terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan sesuai standar, sehingga indikator kinerja dapat mencapai kategori Sangat Baik.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
97.63	99.95	97.63	99.77	102.20	Sangat Baik		102.20	Tercapai / Melampaui		99.82

Tabel 3.26
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang

memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A) Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak Lanjut (b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun

berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b. Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

c. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B) Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C) Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

Realisasi triwulan II 2026 sebesar 99.77% dari target triwulanan maupun tahunan sebesar 97.63% atau dengan capaian sebesar 102.20%. Kategori pencapaian target pada triwulan II, terhadap target triwulan II masuk dalam kategori sangat baik sedangkan

terhadap target tahunan masuk dalam kategori tercapai/melampaui. Walaupun target tahunan maupun target jangka menengah capaian telah melebihi 100%, namun pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi akan terus dilakukan sehingga capaian triwulan II ini belum menggambarkan capaian pada akhir tahunan maupun capaian jangka menengah.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
97.63	99.26	101.67	Sangat Baik	97.63	99.77	102.20	Sangat Baik	0.51

Tabel 3.27
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Realisasi indikator pada Triwulan II Tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I, realisasi mencapai 99,26% dengan capaian kinerja sebesar 101,67% (kategori Sangat Baik), sedangkan pada Triwulan II meningkat menjadi 99,77% dengan capaian kinerja sebesar 102,20% (kategori Sangat Baik). Dengan demikian, terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,51 poin, yang menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pengawasan terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai ketentuan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan capaian indikator didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi yang telah sesuai dengan target dan sasaran dalam Rencana Kerja Pengawasan.

Seluruh tahapan pengawasan, mulai dari pelaksanaan inspeksi, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, hingga penyusunan dan penyampaian tindak lanjut, dilaksanakan sesuai pedoman dan timeline yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator juga didukung oleh peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan Inspektur CDOB, Inspektur Kosmetik, serta Inspektur Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBA SK). Peningkatan kompetensi tersebut berkontribusi terhadap kualitas pelaksanaan inspeksi, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan, serta penyusunan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, pelaksanaan supervisi oleh ketua tim dan kepala UPT dalam penyusunan tindak lanjut dan pelaporan hasil pemeriksaan turut meningkatkan kualitas dokumen tindak lanjut hasil pengawasan serta memastikan seluruh laporan disampaikan secara tepat waktu melalui SIPT. Untuk mempertahankan capaian pada periode berikutnya, Balai POM di Batam akan terus meningkatkan kompetensi petugas, memperkuat supervisi terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan tindak lanjut, serta memastikan seluruh proses pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sesuai pedoman dan timeline yang berlaku.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.28
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi yang sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan dan target pengawasan yang telah ditetapkan. Kualitas pelaksanaan pengawasan juga didukung oleh peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan Inspektur CDOB, Inspektur Kosmetik, Inspektur Pangan, serta Inspektur Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBA SK) sehingga pelaksanaan inspeksi, pengambilan kesimpulan, dan penentuan tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih optimal.

Selain itu, pencapaian indikator didukung oleh penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengacu pada pedoman tindak lanjut yang berlaku, pelaksanaan supervisi dalam penyusunan tindak lanjut dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk memastikan kualitas serta kesesuaiannya dengan ketentuan, serta penyampaian laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu sesuai timeline yang ditetapkan. Sinergi seluruh kegiatan tersebut berkontribusi terhadap tercapainya indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan kategori Sangat Baik.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
98	95	85	100.00	117.65	Tidak Dapat Disimpulkan		102.04	Tercapai / Melampaui		105.26

Tabel 3.29
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2) Ketepatan waktu pelaporan
3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C.

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%) (catatan: pending sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan?)
B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)
C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Realisasi triwulan II 2026 sebesar 100% dari target triwulanan maupun tahunan sebesar 85% atau dengan capaian sebesar 117.65%. Kategori pencapaian target pada triwulan II, terhadap target triwulan II masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kategori tercapai/melampaui. Walaupun target tahunan maupun target jangka menengah capaian telah melebihi 100%, namun pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan akan terus dilakukan sehingga capaian triwulan II ini belum menggambarkan capaian pada akhir tahunan maupun capaian jangka menengah.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
98.00	99.64	101.68	Sangat Baik	85.00	100.00	117.65	Tidak Dapat Disimpulkan	0.36

Tabel 3.30
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya
Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100,00% atau 117,65% terhadap target Triwulan II sebesar 85%. Dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai realisasi 99,64%,

terdapat peningkatan sebesar 0,36 poin. Meskipun peningkatan realisasi relatif kecil, capaian tersebut menunjukkan konsistensi Balai POM di Batam dalam menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh terlaksananya pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Seluruh hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai pedoman yang berlaku serta dilaporkan melalui aplikasi SIPT secara tepat waktu sesuai timeline bulanan.

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan, Balai POM di Batam secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui rapat internal rutin yang mencakup pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pengawasan, ketepatan pelaporan di SIPT, dan pengisian RHPK. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas melalui pembinaan dan pengembangan Inspektur Pangan turut mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif, konsisten, dan sesuai ketentuan.

Upaya yang akan terus dilakukan adalah mempertahankan pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan, memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala, serta meningkatkan kompetensi petugas agar kualitas pengawasan tetap terjaga.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-		-	-	-	-	-	-

Tabel 3.31
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang dilaksanakan secara terencana sesuai rencana kerja dan target yang ditetapkan oleh BPOM. Program tersebut diperkuat dengan koordinasi internal yang baik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta komitmen petugas dalam memenuhi target pemeriksaan, menyusun tindak lanjut hasil pengawasan sesuai pedoman, dan menyampaikan laporan melalui aplikasi SIPT secara tepat waktu.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi petugas melalui pembinaan dan pengembangan Inspektur Pangan turut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan sesuai standar, sehingga mendukung tercapainya indikator kinerja secara optimal.

Sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, peningkatan kompetensi, pelaporan, dan evaluasi menjadi faktor utama yang mendukung capaian indikator melampaui target pada Triwulan II Tahun 2026.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
93.58	96.78	93.58	97.68	104.38	Sangat Baik		104.38	Tercapai / Melampaui		100.93

Tabel 3.32
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara perhitungan realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah (A+B+C+D+E)/5

A: Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan (a+b)/2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\textit{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\textit{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\textit{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\textit{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B: Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C: Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D: Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
   - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
     Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
   - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
   - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E: Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per

media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media) X 20%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%
d. Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Realisasi triwulan II 2026 sebesar 97.68% dari target triwulanan maupun tahunan sebesar 91.38% atau dengan capaian sebesar 106.89%. Kategori pencapaian target pada triwulan II, terhadap target triwulan II masuk dalam kategori sangat baik sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kategori tercapai/melampaui. Walaupun target tahunan maupun target jangka menengah capaian telah melebihi 100%, namun pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan akan terus dilakukan sehingga capaian triwulan II ini belum menggambarkan capaian pada akhir tahunan maupun capaian jangka menengah.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
93.58	95.56	102.11	Sangat Baik	93.58	97.68	104.38	Sangat Baik	2.12

Tabel 3.33
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya
Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 97,68% dengan capaian 106,89 % (kategori sangat baik). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, capaian indikator ini

menunjukkan kinerja yang stabil dan tetap berada pada kategori sangat baik.

Capaian yang melampaui target mencerminkan bahwa kegiatan pengawasan terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui iklan tidak menyesatkan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Capaian ini juga menunjukkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan sedian farmasi dan pangan olahan baik dalam aspek perencanaan, evaluasi dan verifikasi iklan serta ketepatan waktu pelaporan iklan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh terlaksananya pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Seluruh hasil pengawasan iklan yang sudah di evaluasi, diverifikasi kembali dan serta dilaporkan melalui aplikasi SIPT secara tepat waktu sesuai timeline bulanan.

Keberhasilan capaian indikator ini juga didukung didukung perencanaan media iklan dan breakdown target bulanan yang rinci dan disesuaikan berdasarkan arahan/ surat edaran dari direktorat terkait. Pemahaman dari petugas penilai iklan tentang target kinerja dan kontribusi masing-masing terhadap terhadap capaian. Balai POM di Batam juga menerapkan tahapan verifikasi internal untuk memastikan setiap laporan iklan yang dikirim telah memenuhi aspek ketepatan waktu dan kesesuaian hasil penilaian.

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan, Balai POM di Batam secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi

melalui rapat internal rutin untuk memantau kendala-kendala secara cepat sehingga kendala dapat teridentifikasi sejak dini dan tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target. Upaya yang akan terus dilakukan adalah mempertahankan pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan, memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala, serta meningkatkan kompetensi petugas agar kualitas pengawasan tetap terjaga.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.34
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, antara lain:

1. Fokus pada Pengawasan Berbasis Daring (Online Surveillance). Mengingat keterbatasan anggaran untuk perjalanan dinas dalam dan luar kota, Balai POM di Batam mengoptimalkan pengawasan iklan melalui media daring seperti situs web, media sosial, dan platform e-commerce. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya tetapi juga memperluas cakupan pengawasan terhadap iklan.
2. Peningkatan Kedisiplinan dan Koordinasi Internal Penjadwalan yang tepat dan komunikasi intens antar petugas pengawas menjadikan proses verifikasi, penilaian, dan pelaporan hasil pengawasan berlangsung dengan baik.
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan di luar kota dilakukan saat petugas melakukan kegiatan pengawasan

lainnya, baik pemeriksaan sarana produksi maupun sarana distribusi obat dan makanan. Melalui pendekatan ini, sekalipun tidak ada anggaran pengawasan iklan ke luar kota, namun iklan di luar kota masih bisa di jangkau dan diawasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu mendukung pencapaian indikator kinerja secara optimal, khususnya melalui kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek pengawasan berbasis teknologi informasi serta peningkatan kapasitas dalam analisis konten iklan guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
92	95	92	100	100	Sangat Baik		108.70	Tercapai / Melampaui		105.26

Tabel 3.35
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula : % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar =A+B/2
Keterangan:
A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Realisasi triwulan II 2026 sebesar 100% dari target triwulanan maupun tahunan sebesar 92.00% atau dengan capaian sebesar 108.70%. Kategori pencapaian target pada triwulan II, terhadap target triwulan II masuk dalam kategori sangat baik sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kategori tercapai/melampaui. Walaupun target tahunan maupun target jangka menengah capaian telah melebihi 100%, namun terdapat target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sampai akhir tahun sehingga capaian triwulan II ini

belum menggambarkan capaian pada akhir tahun maupun capaian jangka menengah.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
92.00	100.00	108.70	Sangat Baik	92.00	100.00	108.70	Sangat Baik	- .00

Tabel 3.36
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya
Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 100,00% dengan capaian 108,70% (kategori sangat baik). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dan tetap berada pada kategori sangat baik. Capaian yang melampaui target mencerminkan bahwa kegiatan pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan, khususnya terkait informasi kesehatan yang wajib dicantumkan pada produk.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang konsisten terhadap pemenuhan ketentuan pelabelan produk tembakau dan/atau rokok elektronik, termasuk

pencantuman peringatan kesehatan sesuai regulasi. Selain itu, adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan turut berkontribusi terhadap capaian kinerja yang optimal.

Penguatan koordinasi internal serta pelaksanaan monitoring secara berkala memungkinkan setiap temuan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Meskipun capaian telah melampaui target, ke depan diperlukan penguatan pengawasan terhadap produk yang beredar melalui jalur distribusi tidak resmi serta produk impor yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan.

Selain itu, keberhasilan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh adanya perencanaan sampling produk tembakau per bulan yang dilaksanakan dengan efektif. Sementara itu, pengawasan produk rokok elektronik mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2026. Dilakukan pula pemantauan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT agar tidak melampaui batas waktu.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.37
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Perencanaan sampling produk tembakau dan rokok elektronik sudah dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun. Kegiatan ini memastikan pengawasan berjalan konsisten.
2. Pelaksanaan sampling dan pemeriksaan label produk dilakukan sesuai pedoman teknis pengawasan, sehingga hasil pengawasan mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha secara akurat.
3. Pemantauan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT, dengan pemantauan rutin terhadap timeline agar proses pelaporan tidak melewati batas waktu yang ditetapkan.
4. Koordinasi dan komunikasi internal antar petugas pengawas diperkuat untuk memastikan keseragaman interpretasi terhadap standar pelabelan dan kelengkapan data hasil pemeriksaan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu mendukung pencapaian indikator kinerja secara optimal, khususnya melalui kegiatan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik. Ke depan, diperlukan penguatan pengawasan terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan serta peningkatan sinergi lintas sektor guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
100.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.38
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT)BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu: Capaian UPT = 25%A + 25%B + 25%C + 25%D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:
Persentase pemenuhan target pengendalian = 25%A + 25%B + 25%C + 25%D

Target indikator kinerja persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT bersifat tahunan sehingga pada triwulan I belum ada evaluasi capaian target.

Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT belum memiliki realisasi pada Triwulan II Tahun 2026.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR (Antimicrobial Resistance) bersifat tahunan dan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. Realisasi kinerja sangat dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan kegiatan yang tidak merata pada setiap triwulan.

Dengan demikian, belum adanya realisasi pada Triwulan II tidak mencerminkan kinerja yang rendah, melainkan merupakan bagian dari tahapan perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Balai POM di Batam telah melakukan langkah awal berupa perencanaan kegiatan, koordinasi dengan stakeholder terkait, serta penyiapan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan pengendalian AMR pada periode selanjutnya

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum adanya realisasi pada indikator ini disebabkan target yang bersifat tahunan. Kegiatan pengendalian AMR direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap pada triwulan berikutnya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Indikator ini memiliki karakteristik pelaksanaan yang bersifat komprehensif dan memerlukan koordinasi lintas sektor, sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara merata pada setiap triwulan.

Untuk memastikan pencapaian target indikator, Balai POM di Batam telah melakukan berbagai persiapan, antara lain melalui penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dengan instansi terkait, serta penyiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung.

Ke depan, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan bahwa target pengendalian AMR dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung indikator ini difokuskan pada pengendalian resistensi antimikroba melalui pendekatan lintas sektor. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan sinergi dengan stakeholder guna memastikan efektivitas pelaksanaan program pengendalian AMR.

14. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
68	82.2	67.70	68.1	100.64	Sangat Baik		100.19	Tercapai / Melampaui		82.88

Tabel 3.39
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.
  Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawah Keberhasilan pencapaian nilai SKL diatas target didukung dengan perencanaan yang baik, monitoring evaluasi SKL oleh Balai POM di Batam dan PPPOMN secara berkala setiap triwulan.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
  Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
  Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:
  Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 (satu).

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1. Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium;

4. Standar Metode yang terverifikasi.

- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)
   a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2
   b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
   c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
   d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)
   a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
   b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
   c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 = (75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)
   a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
   b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
   c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 = (75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)
   a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
   b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
   c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Nilai standar kemampuan laboratorium Balai POM di Batam triwulan II sebesar 68.1. Nilai tersebut diperoleh dari nilai komponen yaitu standar ruang lingkup sebesar 84.5, standar peralatan sebesar 84.6, standar kompetensi laboratorium 30 dan standar metode terverifikasi sebesar 29.3. Realisasi telah melampaui target triwulanan sebesar 67.7 atau dengan persentase capaian sebesar 100.64 (kategori: sangat baik). Sedangkan terhadap target tahunan 2026 sebesar 68.00, persentase capaian sebesar 100.19% (tercapai/melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
67.60	67.69	100.14	Sangat Baik	67.70	68.1	100.64	Sangat Baik	0.44

Tabel 3.40
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja,realisasi indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujiaan sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 68,1 dengan capaian 100,64 (kategori sangat baik)

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya,capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dan tetap berada pada kategori sangat baik.Capaian yang melampaui target triwulan dan tahun 2026 menandakan bahwa pemenuhan standar kemampuan laboratorium telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pemenuhan terhadap standar SKL didukung oleh 4 poin utama yaitu pemenuhan standar ruang lingkup (SRL),pemenuhan peralatan,kompetensi personil dan pemenuhan standar metode analisa terverifikasi.Pada TW 2 2026,realisasi pemenuhan terhadap standar SKL mencapai 68,1 dengan persentase terhadap target 100,64%.Kenaikan nilai berasal dari poin pemenuhan standar ruang lingkup (SRL),pemenuhan peralatan dan

pemenuhan standar metode analisa terverifikasi yang berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Peningkatan nilai pada point standar ruang lingkup berupa penambahan 1 laporan ruang lingkup yaitu identifikasi Shigella pada sediaan dalam kuasi (36/MBM/MA-PPPOMN/23). Peningkatan nilai pada poin pemenuhan peralatan karena adanya alat baru di TW 2 2026 yaitu 3 unit *electric pipet controller* yang diterima oleh laboratorium mikro. Data alat baru ini telah dimasukkan kedalam aplikasi Dikolaborasi.

Untuk peningkatan metoda analisa terverifikasi adanya 4 metode yang berhasil diverifikasi di TW 2 2026 ini.Keempat metode ini adalah identifikasi raksa secara Reinsch Test (MA PPOMN 053/KO/13), identifikasi vitamin D2 dan D3 dalam Kosmetik secara KCKT-PDA (47/KO/MA-PPPOMN/18),Identifikasi Acid Red 73 (CI 27290) dalam Kosmetik Sediaan Pewarna Rambut secara KCKT-PDA (62/KO/MA-PPPOMN/18) dan deteksi Candida albicans pada kosmetika tidak mudah larut dalam air (23/MBM/MA-PPPOMN/22)

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1							

Tabel 3.41
Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini di TW 2 2026 antara lain:

a. Adanya perencanaan target capaian pada awal tahun 2026 terkait pemenuhan SKL
b. Pemenuhan sumberdaya operasional laboratorium melalui proses pengadaan khususnya pada poin pemenuhan standar ruang lingkup dan standar metode analisa terverifikasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu mendukung pencapaian indikator kinerja secara optimal, khususnya melalui penguatan kapasitas laboratorium dan penerapan sistem manajemen mutu.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
20.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.42
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
c) Jumlah target dihitung secara kumulatif

Formula Perhitungan:
Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman/ Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT x 100

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum memiliki realisasi pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini disebabkan karena pengukuran realisasi indikator pelaksanaan kegiatan pendampingan kabupaten/kota pangan aman dilaksanakan pada tahunan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan karena pelaksanaan kegiatan bersifat bertahap dan tidak merata pada setiap triwulan. Dengan demikian, belum adanya realisasi pada Triwulan II tidak mencerminkan kinerja yang rendah, melainkan merupakan bagian dari tahapan awal pelaksanaan program yang meliputi perencanaan dan koordinasi. Pada Triwulan II, Balai POM di Batam telah melaksanakan advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) kepada Pemerintah Kota Batam sebagai upaya

memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Selain itu, Balai POM di Batam memberikan asistensi kepada perangkat daerah pengampu melalui reviu kelengkapan data dukung, pendampingan pengisian Tools Penilaian Mandiri KKPA, serta pemberian masukan terhadap pemenuhan indikator penilaian sesuai ketentuan. Asistensi dilaksanakan kepada Dinas Kesehatan Kota Batam, Dinas Perikanan Kota Batam, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Dalam rangka mempercepat pemenuhan target indikator, Balai POM di Batam juga melakukan koordinasi dan tindak lanjut kepada PIC Kabupaten Lingga. PIC Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas agar segera melakukan pengisian Tools Penilaian Mandiri KKPA melalui tautan yang telah disediakan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pendampingan aktif kepada pemerintah daerah agar seluruh kabupaten/kota sasaran siap memenuhi indikator penilaian KKPA sesuai ketentuan.

c. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan persiapan dan pendampingan pada Triwulan II, antara lain advokasi kepada Pemerintah Kota Batam untuk memperkuat komitmen penyelenggaraan Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA), asistensi kepada perangkat daerah pengampu melalui reviu kelengkapan data dukung, pendampingan pengisian Tools Penilaian Mandiri KKPA, serta pemberian masukan terhadap pemenuhan indikator penilaian. Selain itu, Balai POM di Batam juga melakukan koordinasi dan tindak lanjut kepada PIC Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas agar segera melakukan pengisian Tools Penilaian Mandiri KKPA. Kegiatan tersebut menjadi upaya strategis untuk meningkatkan

kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kriteria penilaian KKPA sesuai pedoman.

Belum adanya realisasi indikator pada Triwulan II bukan disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan program, melainkan karena pengukuran indikator dilakukan secara tahunan setelah seluruh tahapan pendampingan dan penyampaian hasil penilaian mandiri oleh pemerintah daerah selesai dilaksanakan. Dengan dukungan koordinasi yang baik antara Balai POM di Batam dan pemerintah daerah, diharapkan target indikator dapat tercapai pada akhir Tahun 2026.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

16. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
100	100	33.33	33.33	100	Baik		33.33	Perlu Upaya Keras		33.33

Tabel 3.43
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas

sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. Target sarana produksi pangan yang akan diperiksa pada tahun 2026 sebanyak 3 sarana dari 3 sarana yang ada. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 33.33% yang merupakan realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sebanyak 1 sarana. Terhadap target triwulan II sebesar 33.33% maka persentase capaian sebesar 100% (kategori: baik). Sedangkan terhadap target tahunan sebesar 100% maka capaian masuk dalam kategori perlu upaya keras. Saat ini target tahunan mengacu pada DIPA awal yaitu target sarana yang akan diperiksa sebanyak 3 sarana. Namun sesuai penyesuaian DIPA (pengurangan anggaran) maka target sarana yang akan diperiksa disesuaikan menjadi 2 sarana. Untuk itu, pada triwulan III target tahunan akan dilakukan penyesuaian.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
-	-	-	-	33.33	33.33	100.00	Baik	-

Tabel 3.44
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dalam mencapai keberhasilan indikator pemeriksaan sarana produksi fortifikasi sesuai ketentuan, BPOM di Batam telah menyusun perencanaan pelaksanaan pada bulan April, Juli dan September 2026, sehingga pada TW II telah berhasil mencapai target sebesar 33,33%. Selain itu untuk pemenuhan poin-poin penilaian dalam pemeriksaan sarana dan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka petugas BPOM di Batam melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui Bimbingan Teknis Nasional Pengawasan Fortifikasi Pangan.

c. penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain:

1. Menentukan rencana pelaksanaan pengawasan sarana serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Menyusun data sarana sesuai dengan analisa resiko.
3. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan target dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Meningkatkan kompetensi dalam hal pengawasan sarana baik dilakukan secara mandiri maupun pelatihan dan diseminasi.

5. Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, melakukan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut serta melakukan pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.45
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pengawasan terhadap sarana sesuai ketentuan. Diperlukan juga penguatan kerjasama dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan agar capaian terhadap indikator ini tetap optimal.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
87.04	89.62	87.04	87.75	100.82	Sangat Baik		100.82	Tercapai / Melampaui		97.91

Tabel 3.46
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE

- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survey. Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:

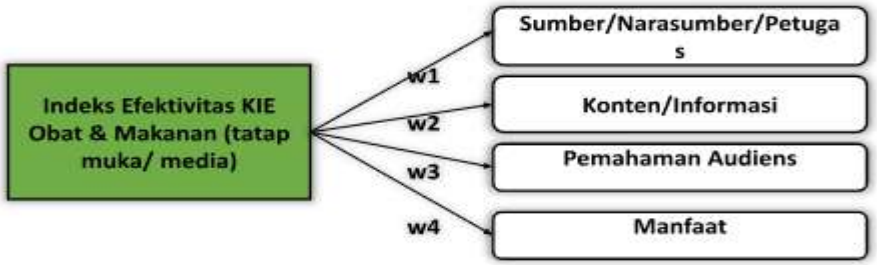

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel 3.47
Skor Indeks Efektivitas KIE

Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE pada Triwulan II Tahun 2026, Balai POM di Batam memperoleh nilai indeks sebesar 87,75. Mengacu pada Tabel 3.44, nilai tersebut termasuk dalam kategori *Efektif* karena berada pada rentang 85,01–95,00. Nilai tersebut juga telah melampaui target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 87,04 dengan persentase capaian sebesar 100,82%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan Balai POM di Batam telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan pemahaman dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai penerima informasi mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
87.04	93.07	106.93	Sangat Baik	87.04	87.75	100.82	Sangat Baik	(5.32)

Tabel 3.48
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

Pada Triwulan II Tahun 2026, Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Batam memperoleh nilai 87,75, meningkat dibandingkan target triwulan sebesar 87,04 sehingga mencapai 100,82% dengan kategori Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi mengalami penurunan sebesar 5,32 poin, dari 93,07 menjadi 87,75. Meskipun demikian, capaian pada Triwulan II tetap berada pada kategori Sangat Baik dan telah melampaui

target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan masih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator yang tetap melampaui target didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan KIE secara langsung maupun melalui media digital yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Materi KIE disampaikan oleh narasumber yang kompeten, menggunakan materi yang relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan sasaran sehingga memberikan manfaat bagi peserta.

Penurunan nilai indeks dibandingkan Triwulan I diduga dipengaruhi oleh variasi karakteristik responden, jenis kegiatan KIE yang dilaksanakan, serta tingkat pemahaman audiens yang berbeda pada setiap kegiatan. Meskipun demikian, nilai efektivitas masih berada pada kategori Sangat Efektif, sehingga tidak berdampak terhadap pencapaian target kinerja.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian pada triwulan berikutnya, Balai POM di Batam akan terus meningkatkan kualitas materi KIE, memperkuat kompetensi narasumber, memperluas pemanfaatan media digital dan media sosial, serta melakukan evaluasi terhadap hasil survei efektivitas KIE sebagai dasar perbaikan metode penyampaian informasi.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai efektivitas KIE mengalami sedikit penurunan dibanding Triwulan I meskipun masih melampaui target.	Meningkatkan kualitas penyampaian materi KIE dan metode komunikasi sesuai karakteristik sasaran.	Evaluasi hasil survei efektivitas KIE, penyempurnaan materi edukasi, optimalisasi media digital, dan peningkatan kapasitas narasumber.	Triwulan III–IV 2026	Tidak	-	-

Tabel 3.49
Matriks Rekomendasi Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara berkesinambungan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka, kampanye publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan media digital dan media sosial Balai POM di Batam. Kegiatan KIE mencakup edukasi keamanan pangan, penggunaan obat yang benar, kosmetik aman, pencegahan penyalahgunaan obat, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap pengawasan obat dan makanan. Selain itu, keterlibatan narasumber yang kompeten, materi edukasi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, serta evaluasi efektivitas KIE melalui survei kepada peserta turut mendukung tercapainya nilai efektivitas yang melampaui target pada Triwulan II Tahun 2026. Meskipun terjadi

sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, capaian indikator tetap berada pada kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program KIE di Balai POM di Batam masih berjalan secara efektif.

18. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
7	14	70.00	70.00	100.00	Baik		-	-	-	-

Tabel 3.50
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
B. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:
    1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
    2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
    3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
    4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
    5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan Target 2025 - 490 Sekolah Full Intervensi

- 1.864 Sekolah Perluasan

Target indikator kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2026 sebanyak 7 sekolah. Lokus pelaksanaan kegiatan tahun 2026 yang diajukan adalah Lingga. Namun dengan anggaran yang tersedia, lokus pelaksanaan kegiatan menjadi sama dengan tahun 2025 yaitu dalam kota Batam. Target bulan Januari sampai dengan bulan November adalah progress pelaksanaan tahapan kegiatan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah mencapai target progres sebesar 70,00 atau 100,00% dari target Triwulan II yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan hingga bulan Juni telah terlaksana sesuai jadwal. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi advokasi lintas sektor, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah sasaran, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, serta pelaksanaan bimbingan teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah. Selanjutnya, pada semester II akan dilaksanakan tahapan monitoring, sertifikasi sekolah, dan pengawalan sekolah sehingga target sebanyak 7 sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Tahun 2026 dapat tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
20.00	25.00	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	70.00	70.00	100.00	Baik	45.00

Tabel 3.51
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan mencapai nilai progres sebesar 70,00, meningkat sebesar 45,00 dibandingkan Triwulan I yang mencapai 25,00. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan intervensi pembudayaan keamanan pangan di sekolah berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Realisasi Triwulan II telah mencapai 100,00% dari target progres triwulan dengan kategori Baik, sedangkan pada Triwulan I capaian sebesar 125,00% terhadap target menunjukkan pelaksanaan tahapan awal kegiatan berlangsung lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Peningkatan progres pada Triwulan II didukung oleh terlaksananya kegiatan advokasi, koordinasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, serta persiapan dan pelaksanaan tahapan pembentukan Kader Keamanan Pangan Sekolah sesuai petunjuk teknis. Dengan capaian tersebut, pelaksanaan kegiatan masih berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target sebanyak 7 sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada akhir Tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Triwulan II Tahun 2026 telah memenuhi target progres yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh terlaksananya tahapan kegiatan sesuai jadwal, mulai dari advokasi kepada pemangku kepentingan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah sasaran, sosialisasi keamanan pangan, hingga pelaksanaan bimbingan teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah. Dukungan dan komitmen dari sekolah sasaran serta koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah turut mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Meskipun target progres telah tercapai, masih diperlukan pengawalan secara berkelanjutan agar seluruh sekolah sasaran dapat memenuhi seluruh kriteria pembudayaan keamanan pangan, termasuk pembentukan Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah, pelaksanaan intervensi kepada komunitas sekolah, penyusunan rencana aksi, serta keberhasilan proses monitoring dan sertifikasi. Oleh karena itu, Balai POM di Batam akan terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala kepada sekolah sasaran hingga seluruh tahapan kegiatan selesai dilaksanakan pada akhir tahun.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Keberlanjutan pelaksanaan program di sekolah perlu terus dikawal agar seluruh	Meningkatkan intensitas pendampingan dan monitoring kepada	Melaksanakan monitoring berkala, pendampingan	Triwulan III–IV 2026	Tidak	-	-.

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	tahapan pembudayaan keamanan pangan dapat dipenuhi sesuai petunjuk teknis.	sekolah sasaran serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan.	penyusunan rencana aksi, pembinaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, serta persiapan sertifikasi sekolah.				

Tabel 3.52
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan sampai dengan triwulan II ini adalah koordinasi dengan stakeholder, komitmen dari Balai POM di Batam serta komitmen dari sekolah-sekolah yang diintervensi.

19. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
3	6	70.00	70.00	100.00	Baik		-	-	-	-

Tabel 3.53
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, pelatihan kader, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
4.	Monev	20%	Juli atau November
5.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	**100%**	

Tabel 3.54
Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman

Target indikator kinerja Jumlah desa pangan aman tahun 2026 sebanyak 3 Desa. Namun, berdasarkan Nota Dinas NOMOR: PR.05.03.2.02.26.132 perihal Pemberitahuan Input Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA tanggal 20 Februari 2026, UPT melakukan revisi penyesuaian DIPA Rincian Output (RO) tahun 2026 sesuai target penyesuaian pada saat desk tanggal 26 Januari 2026. Target indikator menjadi 2 Desa. Pada Lokus pelaksanaan kegiatan tahun 2026 yang diajukan adalah Lingga. Namun dengan anggaran yang tersedia, lokus pelaksanaan kegiatan menjadi sama dengan tahun 2025 yaitu dalam kota Batam. Target bulan Januari sampai dengan bulan November adalah progress pelaksanaan tahapan kegiatan.

Pada triwulan II, tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang sudah tercapai adalah tahap advokasi yang dilaksanakan pada

bulan April 2026 (25%), pelatihan kader pada bulan April 2026 (25%), dan bimtek komunitas pada bulan Mei 2026 (20%) dengan total capaian adalah 70% dari keseluruhan tahapan kegiatan.

Berdasarkan Tabel 3.50 diketahui bahwa perbandingan antara capaian triwulan II dengan target triwulan II tahun 2026 adalah 100% dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman pada triwulan II dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala berarti, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
20.00	25.00	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	70.00	70.00	100.00	Baik	45.00

Tabel 3.55
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya
Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Berdasarkan tabel 3.52 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada triwulan II telah mencapai 70.00% dan mengalami peningkatan sebesar 45.00% dibandingkan dengan realisasi kinerja pada triwulan I. Selain itu, meski persentase capaian kinerja pada triwulan II (100%) lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian kinerja pada triwulan I (125%), hal ini tidak menggambarkan kegagalan kinerja organisasi, karena capaian kinerja pada triwulan II telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan kategori capaian kinerja Baik.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator kinerja jumlah desa pangan aman pada triwulan II berhasil tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahkan angka realisasi kinerja meningkat 45.00% dari kinerja triwulan I. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kekuatan tercapainya kinerja adalah perencanaan serta persiapan pelaksanaan setiap tahapan yang matang serta solidnya kerjasama tim. Faktor eksternal yang juga penting adalah respon dan komunikasi yang baik dengan Lurah setiap kelurahan lokus intervensi. Dengan dukungan dari faktor internal dan eksternal ini, seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja yang sudah baik ini harus tetap dipertahankan dan bahkan perlu ditingkatkan melalui monitoring evaluasi program. Sehingga target kinerja organisasi dapat terus tercapai dan dapat memberikan dampak positif bagi kelurahan lokus intervensi, terutama terwujudnya kemandirian implementasi keamanan pangan di kelurahan pasca periode intervensi.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Keberlanjutan implementasi di desa	Penguatan monitoring pasca intervensi	Monitoring desa	2026	Tidak	-	-

Tabel 3.56
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan capaian kinerja periode triwulan II pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman, dapat dikategorikan 4 faktor utama yang menunjang keberhasilan ini, yaitu:

1. Perencanaan atau penyusunan roadmap tahapan kegiatan yang matang. Baik dari segi perencanaan waktu, petugas maupun anggaran yang tersedia dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan.
2. Komitmen Balai POM di Batam yang tinggi. Kerjasama tim yang solid terwujud di antara petugas Balai POM di Batam dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan. Setiap petugas proaktif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, bahkan saling membantu dan tetap berkoordinasi sehingga setiap tahapan kegiatan dapat terlaksana dan diselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
3. Koordinasi dan komunikasi serta komitmen yang baik dari kelurahan lokus intervensi. Salah satu upaya untuk membangun koordinasi dan komunikasi yang baik, yaitu melalui fasilitas *whatsapp group* yang beranggotakan petugas Balai POM Batam dan tim serta kader keamanan pangan kelurahan.
4. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Monitoring dilakukan setiap bulan terhadap implementasi rencana aksi keamanan pangan yang telah disusun oleh setiap kelurahan lokus intervensi. Selain itu, dilakukan juga pembahasan usulan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh kelurahan selama implementasi rencana aksi keamanan pangan tersebut.

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
1	1	70.00	70.00	100.00	Baik	-	-	-	-	-

Tabel 3.57
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar

dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Sedangkan untuk realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10%	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

Tabel 3.58
Tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Target indikator kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2026 sebanyak 1 pasar. Lokus pelaksanaan kegiatan tahun 2026 yang diajukan adalah Lingga. Namun dengan anggaran yang tersedia, lokus pelaksanaan kegiatan menjadi sama dengan tahun 2025 yaitu dalam kota Batam. Target

bulan Januari sampai dengan bulan November adalah progress pelaksanaan tahapan kegiatan. Pada Triwulan II telah dilaksanakan Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar pada Bulan April 2026 (25%), Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada Bulan Mei (20%), Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar dengan menyampaikan 2 video dibulan Mei dan 2 video dibulan Juni (20%), dan Pengawasan Keamanan Pangan Tahap 1 pada Bulan Mei (10%). Total capaian adalah 90% dari keseluruhan tahapan kegiatan. Oleh karena kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dimulai pada Triwulan II sehingga tidak ada perbandingan realisasi Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
20.00	25.00	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	70.00	70.00	100.00	Baik	45.00

Tabel 3.59
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya
Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah selesai dilaksanakan seluruhnya, dari target Triwulan II sebesar 90% atau dengan capaian 114% (kriteria: tidak dapat disimpulkan). Terhadap target tahun 2026 sebanyak 1 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Oleh karena kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dimulai pada Triwulan II sehingga tidak ada perbandingan realisasi Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pasar merupakan tempat yang strategis dalam pengawasan makanan, dimana masyarakat sebagian besar mendapatkan di pasar. Dari pemeriksaan yang pernah dilakukan ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna tekstil, formalin dan boraks. Untuk melindungi masyarakat dari makanan yang mengandung bahan berbahaya, BPOM melaksanakan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Tahapan kegiatan yang terlaksana sampai dengan triwulan II adalah Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar 25%, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar 20%, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar 20%, dan Pengawasan Keamanan Pangan Tahap 1 10%. Capaian tahapan kegiatan didukung oleh beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Batam diantaranya adalah:

1. Dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kota Batam, dimana lokus kegiatan dilaksanakan pada tahun 2026. Setiap tahapan kegiatan dikomunikasikan dan disepakati bersama antara pihak pasar, OPD Kab/Kota dan Balai POM di Batam
2. Perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dalam evaluasi internal.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Keberlanjutan komitmen pengelola pasar,	Meningkatkan koordinasi dan pendampinga	Melaksanakan pengawasan	2026	Tidak	-	-

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	pedagang, dan pemangku kepentingan perlu terus dijaga agar seluruh tahapan program dapat diselesaikan sesuai petunjuk teknis.	n kepada pengelola pasar, OPD terkait, serta komunitas pasar untuk memastikan seluruh tahapan intervensi dan pengawalan terlaksana secara optimal.	keamanan pangan tahap lanjutan, monitoring dan evaluasi, pengawalan implementasi keamanan pangan di pasar, serta koordinasi berkala dengan Pemerintah Kota Batam dan pengelola pasar hingga seluruh tahapan kegiatan selesai.				

Tabel 3.60
Matriks Rekomendasi Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Batam telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai target dan pedoman pada triwulan II. Tahapan-tahapan kegiatan yang terlaksana pada triwulan II. Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan II adalah Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar,

Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar, dan Pengawasan Keamanan Pangan Tahap 1.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	% Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
27.27	84.85	47.73	63.33	132.7	Tidak Dapat Disimpulkan	-	-	-	-	74.64

Tabel 3.61
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
   b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah**:**

UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi**:**

Untuk UMK Pangan Olahan:

- UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

- UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap

Untuk UMKM Kosmetik:

- UMKM yang memproduksi kosmetik;
- UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:
  - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
  - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
  - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Pengumpulan Data Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan	Januari - Maret	5	Data UMK Pangan Olahan
2	Seleksi dan Penetapan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Target	Januari-Maret	10	Keputusan Kepala UPT BPOM terkait daftar UMK Pangan Olahan yang Didampingi
3	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Februari-Juni	30	Laporan Bimtek CPPOB
4	Pelaksanaan Pendampingan Usaha Mikro Kecil (UMK) Pangan Olahan	Februari -Desember	50	Data Izin Penerapan CPPOB yang Terbit
5	Pelaporan	Februari -Desember	5	1. Laporan Progress 2. Laporan Akhir

Tabel 3.62
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 3.63
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 3.64
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Kosmetik

Cara perhitungan realisasi indikator kinerja telah dilakukan perubahan dari bulan Agustus 2025. Adapun cara perhitungan tersebut adalah

Sebelumnya:

- **Perhitungan target B1 - B11:**

Rata-rata progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik).

- **Perhitungan target tahunan (B12):**

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$\mathbf{A} = \frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

$$\mathbf{B} = \frac{jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

$$\mathbf{C} = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

Saat ini:

- **Perhitungan target B1 - B11:**

Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

- **Perhitungan target tahunan (B12):**

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%.

Target tahunan indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dilakukan revisi mengikuti perubahan cara perhitungan target tahunan. Jika sebelumnya penyebut perhitungan target adalah target UMK yang didampingi dalam tahun n, namun dalam revisi manual IKU berubah menjadi target UMK yang didampingi dalam 1 periode rencana Strategis (2025-2029) yaitu sebanyak 66 UMK.

Pada tahun 2026, target UMK yang didampingi oleh Balai POM di Batam sebanyak 10 UMK pangan olahan dan 1 UMKM Obat Bahan Alam. Untuk mencapai target tahun 2026 sebesar 27.27% maka seluruh UMK yang

didampingi harus memperoleh IP-CPPOB untuk UMK Pangan Olahan dan rekomendasi Sertifikat CPOTB untuk UMK Obat Bahan Alam.

Realisasi triwulan II 63.33% dari target 47.73 atau dengan persentase capaian sebesar 132.70% (kategori: tidak dapat disimpulkan). Terhadap target tahunan maupun jangka menengah belum dapat dibandingkan karena perbedaan cara perhitungan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
15.00	15.91	106.06	Sangat Baik	47.73	63.33	132.70	Tidak Dapat Disimpulkan	47.42

Tabel 3.65
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Balai POM di Batam telah berhasil melaksanakan target kegiatan triwulan 2 dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 2 yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Cara Produksi pangan Olahan yang Baik pada tanggal 22 - 23 April 2026, Gap Assessment terhadap UMKM yang menjadi target pendampingan dan fasilitasi UMKM. Adapun Fasilitasi UMKM dilakukan melalui beberapa kegiatan baik secara daring maupun secara luring juga melalui komunikasi intensif antara fasilitator dengan UMKM yang didampingi. Kegiatan Fasilitasi UMKM yang telah dilakukan pada Triwulan II berupa pelaksanaan Inovasi Desktop UMKM (Desk On The PC Percepatan Pendampingan UMKM, bimbingan pendaftaran akun pada aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dan pembuatan dokumen-dokumen untuk keperluan pemenuhan aspek IP CPPOB.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain :

1. Pengumpulan data UMKM Pangan Olahan di Seluruh Kepulauan Riau
2. Kerjasama lintas sektor yang baik melalui TKPPOM
3. Penetapan UMK pangan olahan target
4. Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk UMK
5. Fasilitasi Pendampingan melalui Desktop UMKM
6. Coaching e-sertifikasi
7. Coaching e-registrasi

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	–	-	-	-		-	-

Tabel 3.66
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Target kinerja untuk indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan dapat dicapai. Pada triwulan lalu rencana tindaklanjut yang dilakukan adalah turun mengundang UMKM yang tidak ditetapkan sebagai target pada Bimtek IP CPPOB, sehingga UMKM Potensial meskipun tidak mendapatkan pendampingan secara langsung, tetap memahami proses sertifikasi IP CPPOB dan tetap dapat menjalankan proses sertifikasi IP CPPOB.

Sasaran Kegiatan 5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
88.75	98	38.75	38.75	100.00	Baik		43.66	Perlu Upaya Keras		39.54

Tabel 3.67
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut :

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan dan melalui srikandi.

Cara perhitungan realisasi indikator adalah Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

Target indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT untuk triwulan II tahun 2026 sebesar 25%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 38.75% sehingga persentase capaian target triwulan II sebesar 100% dengan kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 88.75% maka capaian sampai dengan triwulan I sebesar 43.66% dengan kategori perlu upaya keras.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
25.00	25.00	100.00	Baik	38.75	38.75	100.00	Baik	13.75

Tabel 3.68
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan IV Tahun 2025 perlu memperhatikan perbedaan siklus capaian kinerja. Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 88.75% merupakan capaian kumulatif hingga akhir tahun anggaran, sedangkan realisasi Triwulan II Tahun 2026 sebesar 38.75% merupakan capaian awal tahun sesuai dengan target progres tahapan kegiatan. Dengan demikian, perbandingan tersebut tidak menunjukkan penurunan kinerja, melainkan mencerminkan dimulainya kembali siklus pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya dukungan pimpinan serta kerjasama yang baik personil Balai POM di Batam dalam memenuhi target perkara.
2. Hubungan dengan lintas sektor terjalin dengan baik diantaranya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri di Wilayah Kepulauan Riau serta Pengadilan Negeri di Wilayah Kepulauan Riau sehingga proses penyidikan berjalan dengan baik.
3. Mengoptimalkan operasi intelijen dan patroli siber untuk mengungkap kejahatan obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Batam.

4. Adanya aplikasi e-Berpadu yang memudahkan PPNS untuk memperoleh penetapan penggeledahan dan penyitaan sehingga penyidikan menjadi lebih cepat.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.69
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan, antara lain :

1. Kegiatan intelijen serta patroli siber yang dilakukan secara konsisten. Konsistensi dalam pelaksanaan intelijen dan patroli siber memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Informasi yang akurat dan cepat akan memperbesar peluang penindakan yang tepat sasaran, sehingga meningkatkan persentase keberhasilan
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setiap bulan. Evaluasi bulanan memberikan mekanisme kontrol yang memastikan setiap langkah penindakan sesuai ketentuan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan strategi, sehingga kelemahan dapat segera diatasi dan kinerja tetap terjaga.
3. Melakukan koordinasi berkelanjutan dan yang baik dengan lintas sektor dari Criminal Justice System, khususnya pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
4. Adanya kegiatan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2026 yang diikuti oleh PPNS Balai POM di Batam untuk menambah pemahaman PPNS dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan sesuai ketentuan Undang Undang 20 Tahun 2026.

Sasaran Kegiatan 6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
91.00	94	50.00	50.00	100	Baik		54.95	Perlu Upaya Keras		53.19

Tabel 3.70
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 654 Nomor Tahun 2025 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan yang terdiri dari :

1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun (50%). Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25%). Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT (25%). Target yang ditetapkan pada bulan Januari sampai dengan bulan November adalah persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber sebesar 50%. Sedangkan target tahun 2026 sebesar 91% terdiri dari tiga komponen penilaian di atas.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor PR.09.02.63.07.26.619 tanggal 6 Juli 2026 perihal Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM sampai dengan Bulan Juni Tahun 2026 , kinerja

Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai Standar Balai POM di Batam dengan nilai 100. Sesuai bobot persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber sebesar 50%, maka realisasi indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 50%. Persentase capaian terhadap triwulan II sebesar 100% atau dengan kategori Baik. Sedangkan capaian terhadap target tahunan sebesar 54.95% dengan kategori perlu upaya keras.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Triwulan I 2026				Triwulan II 2026				Realisasi Meningkat / Menurun
Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
50.00	50.00	100.00	Baik	50.00	50.00	100.00	Baik	- .00

Tabel 3.71
Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap triwulan sebelumnya Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Realisasi kinerja pada periode berjalan belum dapat dibandingkan secara komprehensif dengan target tahunan, mengingat indikator kinerja terdiri dari tiga komponen penilaian. Pada periode Januari–November, capaian yang tersedia baru berasal dari satu komponen yang dinilai secara berkala, sedangkan dua komponen lainnya baru akan dinilai pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, capaian yang disajikan masih bersifat parsial dan belum mencerminkan kinerja secara utuh.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi keberhasilan analisis pada triwulan II tahun 2026 sebanyak sebesar 50% dari total target tahunan 91%. Nilai total realisasi analisis sebesar 50% karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam yaitu:

- Pelaporan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan tepat waktu setiap bulannya.
- Adanya aplikasi inawebcrawler.id mempermudah pelaporan hasil patroli siber setiap bulannya
- Mengoptimalkan data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya sebagai gambaran awal data dalam membuat laporan analisis kejahatan berbasis kewilayahan.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.72
Matriks Rekomendasi Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan laporan analisis kejahatan obat dan makanan, antara lain :

- Kegiatan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan secara konsisten
- Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setiap bulan
- Melakukan koordinasi berkelanjutan antar substansi dan lebih baik lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan 7

Layanan Publik UPT yang prima

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
4.92	4.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.73
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan. K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 3.74
Kategori NIlai Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik Balai POM di Batam tahun 2026 ditetapkan oleh unit pengampu Badan POM yaitu besar 4.92. Target bersifat tahunan, sehingga triwulan II belum dapat dilakukan evaluasi terhadap realisasi kinerja.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Meskipun realisasi Indeks Pelayanan Publik belum dapat diukur pada Triwulan II Tahun 2026 karena penilaiannya dilakukan secara tahunan, Balai POM di Batam telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian target Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,92. Upaya tersebut antara lain pemenuhan dokumen kebijakan pelayanan publik, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, pemeliharaan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan, optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), penguatan pengelolaan konsultasi dan pengaduan masyarakat, serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan komponen penilaian sesuai Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 guna memastikan seluruh aspek penilaian dapat dipenuhi secara optimal pada saat pelaksanaan evaluasi.

Dengan berbagai upaya tersebut, Balai POM di Batam optimis target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2026 dapat tercapai melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
86.69	89.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.75
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Target Nilai Pembangunan ZI UPT Balai POM di Batam tahun 2026 sebesar 86.69%. Target bersifat tahunan, sehingga belum ada evaluasi terhadap realisasi kinerja

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Batam belum memiliki capaian yang dapat diukur secara komprehensif pada Triwulan II Tahun 2026, mengingat penilaian indeks dilakukan secara tahunan dan tidak dievaluasi setiap triwulan. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung karena proses evaluasi indeks dilakukan berdasarkan penilaian tahunan oleh instansi terkait.

Meskipun demikian, berbagai upaya penguatan reformasi birokrasi telah mulai dilaksanakan pada Triwulan II sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator ini mencerminkan tingkat kematangan pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi aspek tata kelola, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik. Pada Triwulan II Tahun 2026, berbagai upaya penguatan reformasi birokrasi telah dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, penguatan komitmen pimpinan serta peningkatan integritas dan profesionalisme sumber daya manusia turut menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian indikator ini. Ke depan, diperlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan, termasuk

peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP, penguatan zona integritas, serta peningkatan efektivitas pengendalian internal guna memastikan tercapainya target indeks pada akhir tahun

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.76
Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Balai POM di Batam. Ke depan, diperlukan peningkatan konsistensi implementasi reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola organisasi guna memastikan tercapainya target indeks secara optimal.

26. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
76.45	82.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.77
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:
(1) Perencanaan Kinerja;
(2) Pengukuran Kinerja;
(3) Pelaporan Kinerja;
(4) Evaluasi Kinerja Internal;
(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12

No	Komponen	Bobot
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Tabel 3.78
Bobot Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bersifat tahunan dengan target tahun 2026 sebesar 76.45. Oleh karena itu belum ada evaluasi terhadap realisasi kinerja.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Informasi terbaru dari pelaksanaan penilaian AKIP tahun 2026, capaian kinerja tidak lagi menjadi komponen penilaian SAKIP. Kondisi ini akan menjadi masukan untuk merevisi target AKIP tahun 2026. SAKIP Balai POM di Batam telah menjadi sistem yang melekat dalam pelaksanaan kinerja Balai POM di Batam. Balai POM di Batam telah menetapkan Rencana Strategis dengan jangka waktu 5 tahunan sebagai yang berfungsi sebagai pedoman atau cetak biru (blueprint) Balai POM di Batam mencapai tujuan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perencanaan tahunan juga telah dilakukan dimana target indikator kinerja mengacu kepada target di Renstra dan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Target tahunan yang menjadi Perjanjian Kinerja telah diturunkan menjadi target bulanan/Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). Pada triwulan II telah dilakukan evaluasi terhadap target RAPK dan telah dilakukan revisi untuk 6 indikator. Evaluasi yang dilakukan melihat dengan situasi kondisi terkini dari lingkungan strategis yang mempengaruhi capaian.

Untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan produktivitas, dan memberikan umpan balik untuk perencanaan kedepannya, Balai POM di Batam secara rutin melakukan evaluasi kinerja yang melibatkan seluruh fungsi yang ada di Balai POM di Batam.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP, peningkatan kompetensi pegawai yang terkait langsung dengan SAKIP telah terlaksana pada semester I. Pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi

berasal dari Pokja Akuntabilitas dan Tim SAKIP Balai POM di Batam tahun 2026.

27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.79
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan bentuk penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dengan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja (NK) atas pelaksanaan anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi aspek dan indikator:

a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, dengan indikator:
   i. revisi DIPA (10);
   ii. deviasi halaman III DIPA (15);
b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dengan indikator:
   i. penyerapan anggaran (20);
   ii. belanja kontraktual (10);
   iii. penyelesaian tagihan (10);
   iv. pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) (10); dan
   v. dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pengurang Nilai IKPA;
c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan indikator Capaian Output (25).

Nilai Kinerja (NK) atas perencanaan anggaran merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran terdiri atas variabel:

Indikator pembentuk NK Perencanaan adalah:

a. Efektivitas (75), dengan indikator Capaian RO (75), diukur dengan membandingkan Realisasi Rincian Output dengan Target Rincian Output.
b. Efisiensi (25), dengan indikator:
    i. Penggunaaan SBK (10), diukur dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU;
    ii. Efisiensi SBK (15), diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK.

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 3.80
Kategori Nilai Kinerja Anggaran

Target Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam tahun 2026 sebesar 5 kategori sangat baik. Target bersifat tahunan sehingga pada triwulan II belum dapat dilakukan evaluasi realisasi kinerja.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan triwulan sebelumnya

Sampai Triwulan II, Nilai NKA adalah 67,22, masuk dalam kategori 3 (Cukup), terdiri atas NK Perencanaan Anggaran 34,44 dan NK Pelaksanaan Anggaran 100. Nilai ini bersifat sementara, dan bersifat progres. NK Perencanaan Anggaran pada Triwulan I belum tersedia, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II. Sedangkan NK Pelaksanaan Anggaran Triwulan II sama dengan Triwulan I, yang menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran dapat dipertahankan. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang relatif stabil dalam pengelolaan anggaran, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Pada Triwulan II Tahun 2026, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, termasuk dalam hal ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap jadwal penyerapan anggaran, serta kelengkapan administrasi pelaporan. Selain itu, koordinasi internal yang baik serta pemantauan realisasi anggaran secara berkala turut mendukung capaian kinerja yang optimal.

Meskipun capaian telah menunjukkan hasil yang baik, ke depan diperlukan penguatan pada aspek perencanaan yang lebih presisi, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran guna mendukung pencapaian kinerja secara lebih efektif.

Sampai Triwulan II, adapun kondisi yang dilakukan internal maupun dampak dari kebijakan eksternal dalam peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran guna mengantisipasi potensi kendala dalam penyerapan dan pelaporan anggaran:

- NK Perencanaan Anggaran baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi. Selain itu nilai efisiensi SBK belum dapat dihitung, dikarenakan realisasi belum mencapai target volume RO;
- Dari 21 Rincian Output (RO) pada DIPA, terdapat 1 RO Standar Biaya Khusus (SBK) Umum dan 1 RO SBK Khusus. Penggunaan kedua RO ini menghasilkan nilai komponen penggunaan SBK dalan NK Perencanaan, maksimal;
- Untuk Capaian RO mencapai 72,08, yang merupakan rata-rata progress seluruh (21) capaian RO di Satuan Kerja Balai pengawas obat dan makanan di Batam:
    a. 2 RO sudah tercapai 100%: RO Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (3165.PDD.001) dan RO Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans (3165.QDC.001);
    b. 19 RO masih dalam progres (belum tercapai 100%)
- Dilakukan revisi terpusat dengan Eselon I (kewenangan DJA):
    a. Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025, tanggal 8 Desember 2025 tentang Tindak Lanjut Atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, bahwa diperlukan dukungan alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan secara cepat namun tetap terjaga tata kelolanya melalui pengalokasian anggaran TA 2026 pada Rincian Output (RO) yang secara khusus dibentuk untuk menampung alokasi dana dalam rangka pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026, yakni:

- pengurangan pagu berasal dari sumber dana rupiah murni sebesar Rp2.219.022.000,- dan
- pemblokiran pagu berasal dari PNBP sebesar Rp173.069.000,-.

b. Pemotongan pagu dan penyesuaian target rincian output sesuai Nota Dinas dari Sekretaris Utama terkait Penyampaian Data Penajaman Belanja per satuan kerja untuk digeser/direalokasi ke BA -BUN TA 2026 Nomor PR.05.03.2.02.26.260, tanggal 8 April 2026:
   - Pemotongan/pergeseran anggaran ke BA BUN pada Balai POM di Batam sebesar Rp6.770.000,- (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
   - Penyesuaian target Rincian Output (RO), akibat adanya efisiensi anggaran sesuai hasil kesepakatan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit teknis sebelumnya;

c. Penyesuaian anggaran antar Rincian Output (RO) antar satuan kerja, dengan penambahan Rp38.352.000 (Tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai dampak penyesuaian target dan anggaran, setelah revisi penajaman belanja agar sesuai dengan indeks SBK perkara pada UPT sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2026 Tentang Rincian Indeks Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga (Nota Dinas dari Sekretaris Utama terkait Pemberitahuan terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA Nomor PR.05.03.2.05.26.353, tanggal 11 Mei 2026).

- Telah dilakukan revisi Kewenangan KPA berkala untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan utama, menyesuaikan dengan dampak revisi anggaran dan kebutuhan satuan kerja
- Telah dilakukan penyusunan *Plan Of Action* TA 2026, yang kemudian juga dituangkan sebagai Rencana Penarikan Dana Triwulan I dan II. RPD disusun dengan memperhatikan target penyerapan anggaran, yakni belanja pegawai 50%, belanja barang 50% dan belanja modal

40%. Dengan demikian menjaga kesesuaian RPD sejalan dengan pencapaian minimal target penyerapan.

- Terdapat penyelesaian belanja modal (alat laboratorium) yang lebih cepat dari akhir kontrak, sehingga dilakukan penyelesaian belanja modal lebih cepat dari RPD dengan menjaga deviasi Halaman III di bawah 5%. Sementara untuk kontraktual diterima lebih cepat, diselesaikan dengan menjaga nilai akhir komponen Deviasi Halaman III DIPA dibawah 5%.
- Dalam pemenuhan kebutuhan anggaran, dilakukan penentuan nilai Uang Persediaan sebesar Rp125.000.000,- dengan komposisi tunai Rp75.000.000,- dan kartu kredit pemerintah sebesar Rp50.000.000,- dengan mempertimbangkan kemampuan *revolving* satuan kerja sesuai dengan kebutuhan operasional dan rutin. Sampai Triwulan II sudah dilakukan 15 (lima) kali *revolving* tepat waktu dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mencapai 123,31% dari target penggunaan KKP Triwulan II.
- Dilakukan juga pengusulan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk memastikan ketersediaan dana untuk kegiatan/pengadaan yang tidak dapat dilakukan pembayaran langsung dengan penyedia. Sampai triwulan II TA 2026, dilakukan 5 kali pengusulan TUP, dengan 4 diantaranya sudah dipertanggungjawabkan secara tepat waktu dan tanpa sisa, sementara 1 TUP sedang berproses, direncanakan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, pada Juli 2026.
- Dilakukan penandatanganan dan pendaftaran kontrak Pra DIPA (proses penandatanganan kontrak sebelum tahun berjalan) sejumlah 7 kontrak belanja barang, dan seluruh alat laboratorium dikontrakkan dan diselesaikan pada Semester I. Total 38 kontrak didaftarkan sampai 30 Juni 2026, untuk memastikan pengadaan kebutuhan pengujian dalam laboratorium seperti: pemeliharaan alat, kalibrasi eksternal alat, pengadaan suku cadang dan penunjang, pengadaan reagensia dan media mikrobiologi, pengadaan glassware, dan pengadaan baku pembanding; maupun kebutuhan belanja operasional, seperti *outsourcing*, sewa rumah dan sewa kendaraan jabatan, pemeriksaan resiko kesehatan bagi penguji di laboratorium.

- Dilakukan monitoring *real-time* atas realisasi anggaran melalui subsite TANJAK, yang menjadi *dashboard* monitoring, dengan tujuan memudahkan monitoring realisasi terhadap RPD, memudahkan pengumpulan informasi kinerja dan revisi, serta memudahkan dokumentasi proses pertanggungjawaban keuangan.
- Dilakukan pula monitoring bulanan dengan perbandingan target dan realisasi anggaran bulanan, memantau progres pengadaan, memastikan IKPA masih *on track* untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sebelum triwulan berakhir.

Matriks Rekomendasi

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

Tabel 3.81
Matriks Rekomendasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berupa monitoring dan evaluasi berkala telah mendukung pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Ke depan, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta penguatan monitoring dan evaluasi guna memastikan optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II 2026 dan Tahunan Tahun 2026

Target			Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
2026	2029	Juni 2026		%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
2.91	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.82
Realisasi dan Capaian terhadap target bulanan dan tahunan Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Tabel 3.83
Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori. Cara perhitungan level maturitas/ Skor Maturitas:

$$= \frac{Skor\ Total}{16}$$

Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Target Indeks Manajemen Risiko UPT Balai POM di Batam tahun 2026 sebesar 2.91. Target bersifat tahunan sehingga pada triwulan II belum dapat dievaluasi realisasi kinerja.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja indeks manajemen risiko di Balai POM di Batam tahun 2026 yaitu dengan melibatkan aktif seluruh pegawai dalam proses identifikasi, analisis dan pengendalian risiko, peningkatan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko dan keterlibatan auditor internal dalam melakukan reviu, evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Pada semester I telah dilakukan penerapan manajemen risiko dan telah dilakukan pelaporan melalui SAPA APIP. Identifikasi risiko dilakukan per fungsi dan setelahnya akan dibahas dalam level Balai. Daftar risiko yang diidentifikasi Balai POM di Batam pada semester I sebanyak 98 risiko dengan terdapat 1 risiko yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk Risiko yang masuk dalam kategori tinggi telah dilakukan mitigasi. Selain risiko yang memiliki kategori tinggi telah dilakukan upaya pengendalian untuk menurunkan risiko. Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan juga telah dikaitkan dengan manajemen risiko sehingga jika ditemukan kendala dalam pencapaian kinerja akan dijadikan risiko untuk dikendalikan.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Analisis perbandingan kinerja dilakukan untuk melihat perkembangan capaian indikator kinerja dengan membandingkan realisasi Triwulan II Tahun 2026 terhadap capaian Triwulan I Tahun 2026 serta terhadap target tahunan Tahun 2026. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren kinerja, stabilitas capaian, serta efektivitas strategi yang telah dilaksanakan.

Secara umum, capaian kinerja Balai POM di Batam menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat. Meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan capaian secara marginal, kondisi tersebut tetap menunjukkan kinerja yang optimal karena terjadi dalam konteks peningkatan target kinerja yang lebih tinggi pada tahun berjalan. Hal ini

mencerminkan adanya upaya peningkatan standar kinerja yang tetap dapat diimbangi dengan kapasitas pelaksanaan kegiatan yang memadai.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan setiap evaluasi internal yang dilakukan, terdapat rekomendasi atau rencana aksi untuk memperbaiki kondisi. Adapun rekomendasi per indikator kinerja.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan **(selesai TW II)** - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** - Jadwal pengiriman sampel regiona telah diatur di PoA sampel tahun 2026 - Monev rutin dilakukan setiap triwulan - Peningkatan kompetensi masih terkendala dengan tidak adanya anggaran **Hasil Evaluasi Triwulan II 2026**	2026	Y	RPT 4	Hasil pengujian sampel Obat dan Makanan tidak valid

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel sediaan farmas - Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar	serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid **(selesai TW II)** - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel sediaan farmas - Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu		- Jadwal pengiriman sampel regiona telah diatur di PoA sampel tahun 2026 dan sampai triwulan II masih berjalan sesuai rencana - Monev rutin dilakukan setiap triwulan - Peningkatan kompetensi				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu sehingga tidak melewati timeline pengujian	sehingga tidak melewati timeline pengujian **(selesai TW I)**		di 2026 telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan di pusat dan akan di desiminasikan ke anggota lab terkait - Pada triwulan II terdapat staf fungsi pemeriksaan telah mengikuti sampling OBA, Obat				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kuasi, SK dan Kosmetik				
		Potensi penurunan konsistensi kualitas pengujian	Penguatan monitoring timeline pelaporan	Monitoring mingguan dan evaluasi SLA pelaporan	Selesai	Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala. TW II target dapat dilampaui	TW II	Y	STR 1	Timeline Pengujian tidak terpenuhi
		Ketergantungan pada ketersediaan alat laboratorium	Optimalisasi pemeliharaan dan backup peralatan	Penjadwalan kalibrasi & maintenance berkala	Selesai	Pada Triwulan II telah dilakukan kalibrasi alat lab oleh Balai Kalibrasi BPOM serta pemeliharaan	TW II	Y	RPT 5	Hasil pengujian sampel Obat dan Makanan tidak valid

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						alat lab oleh penyedia				
	2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Kepatuhan Fasyankes dalam pelaporan KTD/ESO masih tergolong rendah	Monitoring pelaporan KTD/ESO setiap bulan dan supervisi pelaporan setiap triwulan	-Petugas monev dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 1. Klinik, 2.puskesmas dan apotek 3. Rumah sakit		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Telah dilakukan monitoring setiap triwulan **Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Telah dilakukan monitoring	setiap bulan dan triwulan			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
							setiap triwulan. Realisasi TW II meningkat dibandingkan TW sebelumnya. Untuk mencapai target 2026 hanya butuh 1 fasyankes untuk melapor KTD/ESO				
			Tenaga Kesehatan pada Fasyankes	Menyusun perencanaan KIE Farmakovigilans	Melakukan KIE kepada tenaga kesehatan/tenaga medis pada	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026:**	Februari 2026			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang mendapatkan KIE masih terbatas		fasyankes yang belum mendapatkan KIE pada tahun 2025		Sudah dilakukan pada bulan Februari 2026				
		Pemahaman farmakovigilans belum optimal	Penguatan edukasi dan sosialisasi	Bimtek/Sosialisasi lanjutan dan/atau pendampingan teknis	Selesai	Pada Triwulan II dilakukan supervisi kepada sarana mengenai KTD/ESO. Untuk mencapai target tahunan IKU, dibutuhkan 1 sarana lagi	TW II	Y	OPR 4	Sarana yang telah diedukasi tidak melaporkan ESO

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						untuk melapor				

		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** - Jadwal pengiriman sampel regiona telah diatur di PoA sampel tahun 2026 - Monev rutin dilakukan setiap triwulan - Peningkatan kompetensi masih terkendala dengan tidak adanya anggaran **Hasil Evaluasi Triwulan II 2026**	2026	Y	RPT 4	Hasil pengujian sampel Obat dan Makanan tidak valid

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel sediaan farmas - Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar	data hasil pengujian yang valid **(selesai TW II)** - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel sediaan farmas - Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu sehingga tidak		- Jadwal pengiriman sampel regiona telah diatur di PoA sampel tahun 2026 dan sampai triwulan II masih berjalan sesuai rencana - Monev rutin dilakukan setiap triwulan - Peningkatan kompetensi				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu sehingga tidak melewati timeline pengujian	melewati timeline pengujian **(selesai TW I)**		personil lab pangan direncanakan pada bulan Agustus 2026 - Belum ada pelatihan sampling dan penandaan yang terjadwal oleh unit pengampu. Pelaksanaan secara mandiri blm dapat dilakukan karena tidak				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						adanya anggaran				
		Potensi penurunan konsistensi kualitas pengujian	Penguatan quality control pengujian	Evaluasi berkala hasil uji & QA internal		Evaluasi telah dilakukan secara berkala dan akan terus dilaksanakan	2026	Y	RPT 6	Hasil pengujian sampel Obat dan Makanan tidak valid
		Ketergantungan pada ketersediaan bahan uji	Optimalisasi manajemen logistik laboratorium	Monitoring stok & pengadaan bahan uji		- Pada triwulan II telah dilakukan pengadaan bahan uji seperti reagensia, baku pembanding	2026	Y	- STR 1 - STR 2	- Timeline Pengujian tidak terpenuhi - Nilai SKL tidak tercapai sesuai target

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						dan suku cadang - Mekanisme monitoring stok telah berjalan setiap saat dan setiap semester dilakukan stok opname				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Diperlukan kejelasan alur pada saat penanganan KLB Keracunan Pangan akibat MBG - Diperlukan kejelasan pembagian tugas antar OPD untuk menghindari tumpang tindih kewenangan	- Diperlukan kejelasan alur pada saat penanganan KLB Keracunan Pangan akibat MBG **(selesai TW I)** - Diperlukan kejelasan pembagian tugas antar OPD untuk menghindari tumpang tindih kewenangan **(selesai TW I)** - Pelatihan lebih mendalam kepada personil penguji terkait penanganan dan pengujian sampel KLB	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** - Sudah dibahas dalam pertemuan Germas bersama Sekda Kota Batam - Peningkatan kompetensi menunggu panduan KLB dari PMPU	2026			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			- Pelatihan lebih mendalam kepada personil penguji terkait penanganan dan pengujian sampel KLB Keracunan Pangan	Keracunan Pangan **(selesai TW II)**		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** -Telah mengikuti sosialisasi KLB melalui zoom meeting				
		Tidak adanya kejadian KLB (indikator event-based)	Penguatan sistem kesiapsiagaan	Koordinasi lintas sektor	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** - Sudah dibahas dalam pertemuan Germas	TW II-IV	T	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						bersama Sekda Kota Batam				
		Potensi keterlambatan respon saat KLB terjadi	Peningkatan kesiapan tim	Pelatihan penanganan KLB	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** -Telah mengikuti sosialisasi KLB melalui zoom meeting	TW II-IV	T	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala - Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan - Peningkatan kompetensi personil		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** - Peningkatan kompetensi pengujian belum dapat dilaksanakan karena terbatsanya anggaran. Pelatihan tidak dimungkinkan dengan pelaksanaan daring karena	2026	Y	RPT 4	Hasil pengujian sampel Obat dan Makanan tidak valid

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala	pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid - Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan		harus ada praktik - Monev rutin dilakukan setiap triwulan **Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** - Peningkatan kompetensi personil lab pangan direncanakan pada bulan Agustus 2026				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel	pengawasan dan pengujian sampel		- Monev rutin dilakukan setiap triwulan				

		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	- Rekomendasi pengawasan di tahun 2025 menjadi tanggungan kinerja 2026 - Carry over tahun 2025 sebanyak 34 rekomendasi. - 23 rekomendasi belum di TL - Surat permintaan sudah dikirimkan - Sarana yang belum menindaklanjuti rekomendasi Puskesmas Sekupang, Naomi Farma Bengkong, Klinik Budi Rosari Sei Panas, Toko	**Kepala Balai:** - Dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan yang membawahi sarana, surat ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.	- Akan dilakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan yang membawahi sarana, surat ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** -Komunikasi telah dilakukan. Realisasi TW II meningkat sehingga dapat mencapai target dimana TW I tidak tercapai. - Akan terus berkomunikasi dgn dinas terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana.	April 2026			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Obat PT. TOP Seratus Niaga, Puskesmas Tanjung Batu, Apotek Berkat, IFK Natuna, Puskesmas Kundur Barat, Puskesmas Subi, CV. Narata Wira Utama, Anugrah Abadi Citrarasa, Kenara, PT Gelael Swalayan, Harapan Indah Arira, Top Seratus Sejati								

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		(Top 100 Niaga Mas) dan PT. Sukses Bintan Permata Natuna								
		Rendahnya kepatuhan stakeholder dalam tindak lanjut	Penguatan pembinaan dan pengawasan	Monitoring intensif dan reminder tindak lanjut		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Telah dilakukan secara berkala. Pada Tw II target dapat dilampaui dan meningkat	TW II-IV	**Y**	**STR 5**	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak mendapatkan feedback dari sarana /pelaku usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						signifikan dibandingkan TW I				
		Variasi kapasitas stakeholder	Pendampingan teknis	Bimtek dan asistensi kepada stakeholder		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Balai POM di Batam telah melaksanakan dan akan melaksanakan Desk CAPA	TW II-IV	**Y**	**STR 5**	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak mendapatkan feedback dari sarana /pelaku usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Persentase sarana produksi Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan									
	9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	Kurangnya kompetensi petugas	Peningkatan kompetensi	Mengikuti pelatihan inspektur CDOB, kosmetik dan OBASK pada tahun 2026	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Telah dilakukan peningkatan kompetensi yaitu: CDOB Ricko	-	Y	SDM 4	Petugas belum kompeten melakukan pemeriksaan sarana produksi / distribusi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan					Kosmetik: Celsy OBA dan SK : Aji dan Septi				obat dan makanan
	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	Y	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Kapasitas SDM belum merata, terutama dalam pemahaman teknis pengawasan iklan dan regulasi terbaru.	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan bimbingan teknis (bimtek) secara berjenjang.	1. Meningkatkan pemahaman petugas terkait evaluasi pengawasan iklan obat dan makanan melalui pelatihan dan supervisi **(Selesai Triwulan I)** 2. Komunikasi aktif dengan direktorat terkait untuk iklan yang tidak ada di SIAPIK dan spreadsheet klaim data dukung kosmetik		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** - Petugas iklan belajar mandiri dari materi dan telah mengikuti Bimtek Online pengawasan iklan Obat **Hasil Evaluasi Triwulan II 2026**	2026	Y	SDM 5	Hasil Pengawasan evaluasi Iklan oleh Petugas BPOM Batam berbeda dengan hasil evaluasi Pusat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						- Komunikasi dengan unit pengampu akan terus dilakukan saat dibutuhkan				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Keterbatasan sarana prasarana di untuk melakukan pengawasan iklan secara optimal (misalnya akses ke media digital).	Prioritas pengawasan berbasis risiko dan Perencanaan pengawasan adaptif	- Fokus pengawasan berbasis risiko - Perencanaan pengawasan iklan	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** - Pengawasan iklan mengikuti Nota Dinas dari masing2 unit pengampu jenis iklan yang diawasi - Perencanaan pengawasan iklan tahun 2026 telah disusun per	-	Y	STR 6	Tingginya jumlah iklan beredar sehingga tidak semua iklan terawasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						komoditi dan setiap komoditi telah disusun berdasarkan target media/platform. Untuk PO iklan ditayangkan melalui media online disusun juga berdasarkan kategori pangan				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaporan terlambat karena aplikasi pelaporan mengalami kendala pada batas waktu pelaporan melalui SIPT	1.Perencanaan pengawasan iklan 2. Penyampaian ke pusat apabila aplikasi mengalami kendala atau gangguan	1.Melaporkan pengawasan iklan sebelum batas waktu pelaporan 2. Membuat nota dinas ke pusat apabila terjadi kendala atau gangguan aplikasi	Selesai	Hasil Evaluasi Triwulan II 2026 1. Pada triwulan II pelaporan telah dilaksanakan sebelum deadline sehingga seluruh target dapat dicapai 2. Pada saat gangguan SIPT, petugas akan melapor pada WA	TW II	Y	SDM5, STR6, STR7	Pelaporan terlambat karena aplikasi pelaporan mengalami kendala pada batas waktu pelaporan melalui SIPT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						grup yang difasilitasi oleh Pusdatin yang salah fungsinya adalah untuk melaporkan jika adanya gangguan				

		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: 1. Meningkatkan efektivitas perencanaan sampling melalui analisis risiko dan pemetaan wilayah prioritas pengawasan, agar cakupan produk dan sarana yang diperiksa lebih representatif. 2. Melaksanakan pengawasan lanjutan terhadap sarana atau produk yang sebelumnya ditemukan belum memenuhi standar pelabelan untuk memastikan tindak	1. Meningkatkan efektivitas perencanaan sampling melalui analisis risiko dan pemetaan wilayah prioritas pengawasan, agar cakupan produk dan sarana yang diperiksa lebih representatif. 2. Melaksanakan pengawasan lanjutan terhadap sarana atau produk yang sebelumnya ditemukan belum memenuhi standar pelabelan untuk memastikan tindak koreksi telah dilakukan. 3. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** 1. Sampling mayoritas dilakukan di kota Batam menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia 2. Produk rokok yang yang pendaannya tidak memenuhi ketentuan, ditindaklanjuti dengan melaporkan ke pusat melalui SIPT. Balai POM di Batam menunggu	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			koreksi telah dilakukan. 3. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, guna memperkuat penegakan kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan. 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha	daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, guna memperkuat penegakan kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan. 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelabelan sesuai regulasi, termasuk ketentuan peringatan kesehatan bergambar (PHW) dan informasi wajib pada kemasan.		arahan lanjutan dari pusat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelumnya. 3. Evaluasi capaian indikator secara berkala telah dilakukan monev dalam rapat evaluasi internal				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			terkait kewajiban pelabelan sesuai regulasi, termasuk ketentuan peringatan kesehatan bergambar (PHW) dan informasi wajib pada kemasan.							

					5. Meningkatkan kapasitas petugas pengawas melalui kegiatan pelatihan lanjutan dan bimbingan teknis tematik agar pemahaman terhadap regulasi dan standar pelabelan semakin komprehensif. 6. Menguatkan sistem pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT, termasuk optimalisasi pemanfaatan data hasil pemeriksaan untuk evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan pengawasan berikutnya.	5. Meningkatkan kapasitas petugas pengawas melalui kegiatan pelatihan lanjutan dan bimbingan teknis tematik agar pemahaman terhadap regulasi dan standar pelabelan semakin komprehensif. 6. Menguatkan sistem pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT, termasuk optimalisasi pemanfaatan data hasil pemeriksaan untuk evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan pengawasan berikutnya. 7. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian						

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			7. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian indikator, untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta menyusun strategi perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik.	indikator, untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta menyusun strategi perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik.						
	13 Persentase pemenuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	target pengendalian AMR di wilayah UPT									

		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Terdapat 2 verifikasi metode yang tidak memenuhi syarat	Verifikasi metode akan dilakukan lagi di TW 3 atau 4	Verifikasi metode akan dilakukan lagi di TW 3 atau 4		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Akan berkoordinasi dengan P3OMN **Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Telah dilakukan diskusi dengan tim PPPOMN dimana rekomendasi PPPOMN sebagai berikut: 1. Untuk PK Natamisin pada keju,verifikasi nya perlu	TW IV 2026	Y	STR 2	Nilai SKL tidak tercapai sesuai target

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						diulang dengan menambahkan baku kerja matriks dan dihitung apakah efek matriks besar atau tidak. 2. Untuk PK Asesulfam,sakarin dan aspartam pada susu cair,verifikasi perlu diulang dengan menambahkan tahapan pada				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						prosedur dimana sebelum divortex sampel dikocok kuat dengan tangan selama 1 menit. Kedua Verifikasi ini akan rencana akan diulang di TW 4 (november-desember) karena di TW 3 ini masih				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						banyak sampel rutin memakai HPLC.				
	15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Besarnya Gap penilaian mandiri pengisian matriks KKPA dengan hasil evaluasi tim juri pusat	Besarnya Gap penilaian mandiri pengisian matriks KKPA dengan hasil evaluasi tim juri pusat	Besarnya Gap penilaian mandiri pengisian matriks KKPA dengan hasil evaluasi tim juri pusat	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Sudah dibahas bulan Februari dengan PMPU dan jajaran Pemko Batam				

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Tidak tersedia alokasi anggaran khusus untuk program KKPA	Perencanaan program pendampingan diintegrasikan dengan program lainnya	- Perencanaan pendampingan Kabupaten Kota Pangan Aman		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Program masih dilaksanakan yang lokus dalam kota (Batam)	2026			
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiks	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pangan Fortifikasi	a dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan									
3 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17** Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Keterbatasan anggaran	Mengoptimalkan pelaksanaan melalui media daring untuk meminimalisir penggunaan anggaran	Perencanaan kegiatan KIE	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Perencanaan KIE telah dibuat untuk tahun 2026		Y	-KEU 1 -RPT 1	-Pembengkakan biaya perjalanan dinas -Tidak meratanya penyebaran informasi terkait keamana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
										n obat dan makanan kepada masyarakat
	18 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Dukungan lintas sektor belum optimal	Dilakukan advokasi dengan pembahasan peluang keterlibatan lintas sektor	Dilakukan advokasi dengan pembahasan peluang keterlibatan lintas sektor	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Advokasi telah terlaksana pada triwulan I 2026				
	19 Jumlah desa	Dukungan lintas sektor belum optimal	Dilakukan advokasi dengan pembahasan	Advokasi dengan pemerintah daerah	Selesai	**Hasil Evaluasi**				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	pangan aman		peluang keterlibatan lintas sektor	yang menjadi lokus intervensi		**Triwulan I 2026** Advokasi telah terlaksana pada triwulan I 2026				
		Keberlanjutan implementasi di desa	Penguatan monitoring pasca intervensi	Monitoring desa		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Kegiatan monitoring akan dilakukan pada bulan Juli 2026	TW III	T	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Keberlanjutan implementasi di Pasar	Penguatan monitoring pasca intervensi	Monitoring Pasar		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Kegiatan monitoring akan dilakukan pada bulan Juli 2026	TW III	T	-	-

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	UMKM dampingan tidak konsisten mengikuti seluruh rangkaian pendampingan (putus di tengah jalan)	UMKM dampingan tidak konsisten mengikuti seluruh rangkaian pendampingan (putus di tengah jalan)	1. Memperkuat proses seleksi untuk memastikan komitmen calon peserta. 2. Menyediakan opsi pendampingan fleksibel (kombinasi daring dan luring) bagi UMKM dengan keterbatasan waktu. 3. Melakukan monitoring intensif kepada UMKM		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** 1. Telah dilakukan pemetaan UMKM dan penandatangan komitmen pada bulan Januari-Maret 2026 bagi UMKM yang ditetapkan untuk didampingi 2. Untuk tahap bimtek dan pelaksanaan pada triwulan II-IV tahun 2026 **Hasil Evaluasi**	2026	Y	STR 7	UMKM Dampingan tidak menyelesaikan seluruh tahapan pendampingan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Triwulan II 2026 Tahapan kegiatan terus berlanjut, progres kegiatan UMKM melebihi target TW II. Pada TW II ada pengurangan target jumlah UMKM yang didampingi karena penyesuaian target pada				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						DIPA. sampai TW II belum ada UMKM yang mendur dari pendampingan				
		Banyak UMKM yang melakukan pendaftaran namun Lokasi produksi masih menyatu dengan rumah tinggal atau lingkungan yang tidak	Diikutsertakan sebagai peserta Bimtek CPPOB meskipun belum memenuhi kriteria pendampingan UMKM agar kedepannya bisa memperbaiki diri dan bisa didampingi setelah	Mengundang UMKM yang ditetapkan maupun yang tidak ditetapkan (namun potensial) sebagai UMKM dampingan pada kegiatan Bimtek CPPOB	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Pada bulan april telah diundang baik yg ditetapkan maupun tidak ditetapkan dalam SK	TW II	T	-	UMKM tidak dapat didampingi karena Lokasi produksi masih menyatu dengan rumah tinggal

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				mendukung sanitasi.	melakukan perbaikan			pendampingan dan diberikan Bimtek				atau lingkungan yang tidak mendukung sanitasi.
5	Terlaksanya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Masih terdapat perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa peneliti berkas perkara	Dilaksanaka koordinasi antara Penyidik dan Jaksa untuk menyamakan persepsi terkait konstruksi pertanggungjawaban pidana.	Menjadwalkan koordinasi dengan Jaksa untuk penyempurnaan berkas perkara.	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Sudah dilaksanakan koordinasi dengan JPU pada bulan Januari 2026 terkait penyelesaian		Y	HK2	Berkas perkara BPOM Batam tidak P21 sesuai jadwal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wilayah kerja UPT	Olahan di UPT					berkas perkara carry 2025. Perkara dimaksud saat ini sudah pada tahap II				

			Target triwulan tercapai. Tidak ada kendala yang teridentifikasi. Rekomendasi adalah upaya peningkatan	Rekomendasi adalah upaya peningkatan, bukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala: 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik melalui pelatihan teknis, bimbingan hukum, serta penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik melalui pelatihan teknis, bimbingan hukum, serta penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penindakan, pelaporan perkara, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan agar lebih cepat dan akurat. 3. Melakukan pengungkapan kejahatan obat dan makanan serta	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik melalui pelatihan teknis, bimbingan hukum, serta penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. **(Selesai)** 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penindakan, pelaporan perkara, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan agar lebih cepat dan akurat. 3. Melakukan pengungkapan kejahatan obat dan		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** - Sudah mengikuti sosialisasi KUHAP yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dan dari Korwas PPNS. - Sudah dilakukan rutin melalui aplikasi ADP - Sudah dilakukan melalui kegiatan intelijen dan patroli siber yang rutin dilakukan.	2026			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penindakan, pelaporan perkara, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan agar lebih cepat dan akurat. 3. Melakukan pengungkapan kejahatan obat	percepatan penyidikan agar perkara dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.	makanan serta percepatan penyidikan agar perkara dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penindakan, pelaporan perkara, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan telah dilakukan				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan makanan serta percepatan penyidikan agar perkara dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.				melalui aplikasi yang disiapkan unit pengampu. Pemanfaatan teknologi informasi akan terus dilanjutkan - Pada Triwulan II telah dilakukan pengungkapan kejahatan yang ditindaklanjuti dengan pro justitia.				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**23** Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Kemampuan Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang belum dimiliki oleh semua petugas	Mengikuti Pelatihan Penyusunan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mendaftarkan Petugas mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Cegah Tangkal	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Telah mengikuti sosialisasi pedoman cegah tangkal pada bulan Maret 2026		Y	SDM 2	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak disusun sesuai standar

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Standar Pelayanan berubah secara dinamis seiring perubahan-perubahan regulasi terkait pelayanan publik	Peningkatan Kompetensi SDM	Perencanaan dan realisasi peningkatan kompetensi SDM yanblik	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Pada triwulan I telah dilakukan peningkatan kompetensi terkait pelayanan publik				
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisa	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Perbedaan persepsi maupun pemahaman antara personil Balai POM di	Melaksanakan diskusi persamaan persepsi dan pemahaman terkait poin-poin penilaian Pembangunan ZI	Melaksanakan diskusi persamaan persepsi dan pemahaman terkait poin-poin penilaian Pembangunan ZI	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Telah dilakukan				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
si yang optimal		Batam dengan evaluator terhadap poin-poin penilaian pembangunan ZI				FGD dengan APIP pada 20 Februari pada tahun 2026				
		Penilaian indeks belum dilakukan	Penguatan persiapan evaluasi RB	Pemenuhan evidence dan dokumen RB	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Telah dilakukan pengisian LKE dan pengumpulan data dukung/evidence. Deks				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						penilaian pembangunan ZI telah dilaskanakan pada TW II.				
		Implementasi RB belum merata	Penguatan internalisasi RB	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** - Balai POM di Batam telah menetapkan agent of change tahun 2026 - Masing-masing AOC	TW II - IV	T	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						memiliki program dan telah berjalan dan akan masih berjalan hingga akhir tahun. Program akan mengimplementasikan RB ke Balai POM di Batam				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26 Nilai AKIP UPT BPOM	Tidak tercapainya indikator kinerja yang mempengaruhi nilai SAKIP	- Mengoptimalkan rapat evaluasi internal untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan rencana aksi - Mengajukan target Perjanjian Kinerja dengan mengevaluasi realisasi tahun sebelumnya Untuk indikator kinerja yang dievaluasi oleh APIP akan dilaksanakan diskusi untuk memperoleh pemahaman yang	- Melaks anakan rapat evaluas i interna l secara berkala - Mengevaluasi capaian untuk mengajukan target Perjanjian Kinerja **(selesai Triwulan I)** - Melaksanakan diskusi dengan APIP untuk memperoleh persamaan persepsi dan pemahaman terkait poin-poin dalam penilaian indikator kinerja yang evaluasi dilakukan oleh APIP **(selesai Triwulan I)**		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** - Rapat evaluasi internal telah dilaksanakan setiap triwulan sesuai pedoman SAKIP BAdan POM - Target kinerja tahun 2026 diajukan dan ditetapkan melalui	2026	Y	SR 8	Tidak terkawalnya pelaksanaan kinerja sesuai dengan target dan tujuan organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sama terkait poin-poin evaluasi			evaluasi capaian kinerja tahun 2025 - Telah dilakukan FGD dengan APIP pada 20 Februari pada tahun 2026 **Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Rapat internal dilakukan sesuai pedoman dan				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						SOP secara berkala				
	27 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Potensi ketidaktepatan perencanaan anggaran	Penguatan perencanaan	Penyusunan perencanaan berbasis kebutuhan	Selesai	**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** - Awal Triwulan II telah dilakukan pembaharuan RPD dengan melihat realisasi TW I, kebutuhan anggaran dan perencanaan kinerja	TW II	Y	KEU 10	Penyerapan Anggaran belum mencapai target dan belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						- Monitoring secara berkala telah dilakukan dan data monitoring dapat diakses setiap saat melalui aplikasi Tanjak - Target RPD TW II dapat dilampaui				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Risiko keterlambatan penyerapan	Penguatan monitoring anggaran	Monitoring realisasi anggaran secara berkala		**Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** - Awal Triwulan II telah dilakukan pembaharuan RPD dengan melihat realisasi TW I, kebutuhan anggaran dan perencanaan kinerja - Monitoring secara berkala telah dilakukan	TW II - IV	Y	KEU 10	Penyerapan Anggara

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						dan data monitoring dapat diakses setiap saat melalui aplikasi Tanjak - Target RPD TW II dapat dilampaui Akan dilakukan sepanjang tahun				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	28 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Target indeks manajemen risiko belum tercapai dengan kelemahan bahwa belum meratanya pemahaman pegawai terhadap manajemen risiko	Melibatkan seluruh pegawai dalam kegiatan manajemen risiko untuk meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko	Melibatkan seluruh pegawai dalam kegiatan manajemen risiko		**Hasil Evaluasi Triwulan I 2026** Identifikasi risiko telah dilakukan secara berjenjang. Identifikasi dilakukan pada level fungsi terlebih dahulu, yang selanjutnya telah dibahas di level Balai dengan melibatkan	2026	Y	OPR 15	Adanya risiko yang tidak teridentifikasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						seluruh pegawai **Hasil Evaluasi Triwulan II 2026** Analisis risiko telah dilaksanakan melibatkan seluruh pegawai. Dilakukan per fungsi dan selanjutnya dibahas di level Balai. daftar risiko per fungsi				

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								direview setiap triwulan dan akan terus dilakukan				
10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan arang dan Jasa	29	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
11 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri (tidak diturunkan ke dalam tim kerja, hanya menjadi target PPT Pratama dan Kepala UPT)	30 Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
12 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	31 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	32 Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
14 Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pengguna layanan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BPOM	33 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam (SKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
15 Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam program sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi / Kabupaten/Kota	34 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.84
Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

3.3 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Triwulan II TA 2026

Adapun kondisi alokasi anggaran Balai POM di Batam pada Triwulan II TA 2026:

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran pada DIPA (SP DIPA-063.01.2.672838/2026 disahkan 1 Desember 2025)	Proporsi Anggaran setelah 3 kali revisi mengubah Digital Stamp (Kewenangan DJA)			Penurunan Anggaran efektif terhadap Alokasi Anggaran	% Penurunan Anggaran efektif terhadap Alokasi Anggaran
		Pagu	Blokir	Anggaran Efektif		
	(Rp)					%
Belanja Pegawai	5,040,521,000	5,040,521,000		5,040,521,000	0	0.00%
Belanja Barang	10,322,398,000	8,886,120,000	173,069,000	8,713,051,000	-1,609,347,000	-15.59%
Belanja Modal	3,755,810,000	3,004,648,000		3,004,648,000	-751,162,000	-20.00%
Total	19,118,729,000	16,931,289,000	173,069,000	16,758,220,000	-2,360,509,000	-12.35%

Tabel 3.85
Perbandingan Alokasi Anggaran 2026 DIPA awal dan DIPA pada akhir Triwulan II

Sesuai dengan DIPA Balai POM di Batam dengan nomor SP DIPA063.01.2.672838/2026, disahkan 1 Desember 2025, alokasi anggaran Balai POM di Batam terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp5,040,521,000,-, belanja barang sebesar Rp10,322,398,000,-, dan belanja modal sebesar Rp3,755,810,000,-, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp19,118,729,000,-. Sepanjang Triwulan II dilakukan revisi:

1. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025, tanggal 8 Desember 2025 tentang Tindak Lanjut Atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, bahwa diperlukan dukungan alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan secara cepat namun tetap terjaga tata kelolanya melalui pengalokasian anggaran TA 2026 pada Rincian Output (RO) yang secara khusus dibentuk untuk menampung alokasi dana dalam rangka pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026.

Maka, dilakukan revisi pergeseran tersebut sesuai dengan hasil identifikasi dari Kemenkeu, berupa: - pengurangan pagu berasal dari sumber dana rupiah murni sebesar Rp2.219.022.000,- (Dua Milyar dua ratus sembilan belas juta dua puluh dua ribu rupiah) dan - pemblokiran pagu berasal dari PNBP sebesar Rp173.069.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah) pada DIPA Satuan Kerja Balai POM di Batam.

2. Sesuai dengan Nota Dinas dari Sekretaris Utama terkait Penyampaian Data Penajaman Belanja per satuan kerja untuk digeser/direalokasi ke BA -BUN TA 2026 Nomor PR.05.03.2.02.26.260, tanggal 8 April 2026 bahwa diperlukan revisi dengan ruang lingkup revisi: Pemotongan/pergeseran anggaran ke BA BUN pada Balai POM di Batam sebesar Rp6.770.000,- (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan Penyesuaian target Rincian Output (RO), akibat adanya efisiensi anggaran sesuai hasil kesepakatan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit teknis sebelumnya;
3. Sesuai dengan Nota Dinas dari Sekretaris Utama terkait Pemberitahuan terkait Usulan Revisi DIPA Kewenangan DJA Nomor PR.05.03.2.05.26.353, tanggal 11 Mei 2026 bahwa diperlukan revisi dengan ruang lingkup revisi: Penyesuaian anggaran antar Rincian Output (RO) antar satuan kerja, dengan penambahan Rp38.352.000 (Tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai dampak penyesuaian target dan anggaran, setelah revisi penajaman belanja agar sesuai dengan indeks SBK perkara pada satuan kerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2026 Tentang Rincian Indeks Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi terhadap Pagu	
Total	Blokir	Efektif		Total	Efektif
(Rp)				%	
16,931,289,000	173,069,000	16,758,220,000	10,298,553,257	60.83	61.45

Tabel 3.86
Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Triwulan II Tahun 2026

Realisasi anggaran pada Triwulan II TA 2026 sampai mencapai Rp 10,298,553,257, sebesar 61.45% dari pagu efektif, atau 60.83% dari pagu alokasi anggaran terbaru. Realisasi anggaran ini terdiri dari: - belanja pegawai sebesar Rp2,672,257,993,- atau 53,02% dari total alokasi anggaran belanja pegawai - belanja barang sebesar Rp4,621,648,953,- atau 52,01% dari total alokasi anggaran belanja barang, dan - Belanja modal sebesar Rp3,004,646,311,- atau 99.9999% dari total alokasi anggaran belanja modal. Revisi kewenangan KPA (internal) untuk memfasilitasi penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan dalam pencapaian target juga dilakukan secara. Pelaksanaan anggaran pada Balai POM di Batam selalu dipantau harian melalui Subsite TANJAK, dipantau secara berkala (bulanan) dan triwulanan, dengan tujuan identifikasi tantangan/kemungkinan kendala untuk segera mitigasi sebelum triwulan berakhir.

2. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Alokasi anggaran per Indikator kinerja dalam pencapaian sasaran kegiatan pada PK 2026 terlampir pada dua tabel di bawah. Tabel pertama di bawah membandingkan capaian kinerja dengan capaian realisasi terhadap Rencana Penarikan Dana. Dari 28 indikator, 9 indikator masuk dalam kategori efisien, 14 indikator tidak efisien, dan 5 indikator belum dapat diukur dikarenakan target bersifat tahunan. Sedangkan jika dilihat per sasaran kegiatan, terdapat 2 Sasaran Kegiatan efisien, 4 sasaran tidak efisien, dan 2 sasaran belum dapat diukur karena target bersifat tahunan.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Juni									
					Kinerja		Anggaran					Efisiensi		
					%Capaian Target Juni	%Capaian Target Tahunan	Pagu	RPD sd Triwulan II	Realisasi	% thdp RPD	% thdp Pagu	Tingkat Efisiensi =((4/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91.63**	109.05	109.05	1,498,502,181	985,872,227	984,863,714	99.90	65.72	0.09	100% Efisien
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	**27.00**		98.77	9,000,000	7,810,000	8,150,000	104.35	90.56		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**92.00**	108.70	108.70	441,980,622	281,873,849	295,924,622	104.98	66.95	0.04	100% Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100.00**	100.00	100.00	38,428,762	22,869,177	26,108,559	114.16	67.94	(0.12)	Tidak Efisien
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang	**92.00**	108.70	108.70	30,551,026	21,160,859	22,852,334	107.99	74.80	0.01	100%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Juni									
					Kinerja		Anggaran						Efisiensi	
					%Capaian Target Juni	%Capaian Target Tahunan	Pagu	RPD sd Triwulan II	Realisasi	% thdp RPD	% thdp Pagu	Tingkat Efisiensi =((4/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
			ditindaklanjuti sesuai ketentuan										Efisien
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**87.00**	106.39	106.39	3,432,000	2,315,000	2,368,000	102.29	69.00	0.04	100% Efisien
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**98.00**	102.04	102.04	1,740,839	850,309	719,509	84.62	41.33	0.21	Tidak Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**98.00**	102.04	102.04	34,248,161	18,798,491	16,529,291	87.93	48.26	0.16	100% Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Juni									
					Kinerja		Anggaran						Efisiensi	
					%Capaian Target Juni	%Capaian Target Tahunan	Pagu	RPD sd Triwulan II	Realisasi	% thdp RPD	% thdp Pagu	Tingkat Efisiensi =((4/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**97.63**	102.20	102.20	180,817,480	64,837,272	82,887,064	127.84	45.84	(0.20)	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**98.00**	117.65	102.04	101,769,252	30,050,740	29,857,454	99.36	29.34	0.18	100% Efisien
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**93.58**	106.89	104.38	20,277,900	3,596,360	6,463,410	179.72	31.87	(0.41)	Tidak Efisien
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**92.00**	108.70	108.70	12,873,000	7,205,500	1,777,500	24.67	13.81	3.41	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Juni									
					Kinerja		Anggaran						Efisiensi	
					%Capaian Target Juni	%Capaian Target Tahunan	Pagu	RPD sd Triwulan II	Realisasi	% thdp RPD	% thdp Pagu	Tingkat Efisiensi =((4/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100.00**	0		9,573,368	6,654,904	7,818,347	117.48	81.67	(1.00)	Tidak Efisien
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**68.00**	100.64	100.19	3,359,617,960	2,996,924,800	3,114,567,124	103.93	92.71	(0.03)	Tidak Efisien
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**20.00**	0		10,256,450	7,977,612	8,490,595	106.43	82.78	(1.00)	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	**100.00**	100.00	33.33	960,000	990,000	480,000	48.48	50.00	1.06	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Juni									
					Kinerja		Anggaran					Efisiensi	
					%Capaian Target Juni	%Capaian Target Tahunan	Pagu	RPD sd Triwulan II	Realisasi	% thdp RPD	% thdp Pagu	Tingkat Efisiensi =((4/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
	Pangan Fortifikasi		ditindaklanjuti sesuai ketentuan										
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**87.04**	100.82	100.82	60,627,000	28,968,500	29,095,075	100.44	47.99	0.00	100% Efisien
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**7**	100.00		56,651,000	27,093,300	27,053,300	99.85	47.75	0.00	100% Efisien
		19	Jumlah desa pangan aman	**3**	100.00		61,962,000	35,377,000	36,975,300	104.52	59.67	(0.04)	Tidak Efisien
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1**	100.00		25,620,000	16,629,950	18,969,950	114.07	74.04	(0.12)	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	**27.27**	132.70		14,320,000	11,599,735	12,959,735	111.72	90.50	0.19	100% Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Juni								
					Kinerja		Anggaran					Efisiensi	
					%Capaian Target Juni	%Capaian Target Tahunan	Pagu	RPD sd Triwulan II	Realisasi	% thdp RPD	% thdp Pagu	Tingkat Efisiensi =((4/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
	keamanan dan mutu		dan/atau IP CPPOB pangan olahan										
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**88.75**	100.00	43.66	289,836,000	92,411,876	125,205,436	135.49	43.20	(0.26)	Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**91.00**	100.00	54.95	49,462,000	10,540,840	19,281,837	182.93	38.98	(0.45)	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Juni									
					Kinerja		Anggaran					Efisiensi	
					%Capaian Target Juni	%Capaian Target Tahunan	Pagu	RPD sd Triwulan II	Realisasi	% thdp RPD	% thdp Pagu	Tingkat Efisiensi =((4/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
	wilayah kerja UPT												
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	**4.92**			25,372,000	12,909,100	15,114,100	117.08	59.57		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	**86.69**			2,732,646,430	1,365,366,510	1,397,527,783	102.36	51.14		
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	**76.45**			2,635,815,360	1,317,493,762	1,350,001,744	102.47	51.22		
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	**5.00**			2,621,744,460	1,305,565,812	1,338,442,793	102.52	51.05		
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	**2.91**			2,603,203,750	1,284,045,735	1,318,068,680	102.65	50.63		

Tabel 3.87
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Triwulan II Tahun 2026 per Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Capaian Sasaran Kegiatan	Pagu	RPD TW II 2026	Realiasasi	% Realisasi Thd RPD	Efisiensi	
							Tingkat Efisiensi =((2/6)-1)/1	Capaian Efisiensi
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106.08	5,753,069,000	4,458,797,100	4,609,377,524	103.38	0.03	100% Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	960,000	990,000	480,000	48.48	1.06	Tidak Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100.20	204,860,000	108,068,750	112,093,625	103.72	(0.03)	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	132.70	14,320,000	11,599,735	12,959,735	111.72	0.19	100% Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	289,836,000	92,411,876	125,205,436	135.49	(0.26)	Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	49,462,000	10,540,840	19,281,837	182.93	(0.45)	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima		25,372,000	12,909,100	15,114,100	117.08		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		10,593,410,000	5,272,471,819	5,404,041,000	102.50		

Tabel 3.88
Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM di Batam Triwulan II Tahun 2026 Per Sasaran Kegiatan

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input, atau yang disebut dengan Tingkat Efisiensi disebut Indeks Efisiensi (IE). Capaian Output adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan sedangkan capaian inputnya merupakan persentase realisasi RPD masing-masing sasaran kegiatan. indeks ini kemudian dibandingkan terhadap Standar Efisiensi (bernilai 1, capaian output sama dengan capaian input). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Pada tabel di atas diperbandingkan rencana penggunaan anggaran pada triwulan II (RPD) dengan pencapaian target sasaran kegiatan. Tingkat efisiensi bervariasi dengan rincian:

- Dua SK tidak dapat dihitung, dikarenakan sifat target tahunan yaitu SK Layanan Publik UPT yang prima dan SK Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Namun keduanya menggunakan anggaran (input) berturut-turut 117.08% dan 102.50% dari RPD.
- Dua SK masuk dalam Kategori Efisien yaitu SK Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dan SK Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Kategori efisiensi yang dicapai dari kedua SK tersebut mencapai tingkat efisiensi 100%.
- Empat SK masuk dalam Kategori Tidak Efisien yaitu SK Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dan SK Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

3. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Adapun analisis untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pada Triwulan II 2026:

1. Anggaran yang direalisasikan untuk pencapaian SK Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian sasaran kegiatan 106.08%, dan realisasi anggaran 103.38% dari RPD yang sudah disusun (RPD yang sudah disusun 77.50% dari pagu total) dikategorikan efisien. Dalam pencapaian sasaran ini terdapat, 15 Indikator Utama, dengan penggunaan anggaran dari 8 rincian output. Dari 15 IK Indikator, pelaksanaan 5 indikator masuk dalam kategori Efisien, yakni: Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dan Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

- Realisasi anggaran dalam SK ini digunakan untuk:
  a. Pengadaan keperluan pengujian di laboratorium seperti suku cadang dan penunjang pengujian, baku pembanding, serta reagensia dan media mikrobiologi, kalibrasi alat laboratorium, dan alat laboratorium
  b. sebagian besar telah diadakan. Anggaran juga digunakan untuk kegiatan pengawasan seperti: pembelian sampel untuk diperiksa dan/atau diuji, administrasi pengawasan, pengawasan sarana produksi, distribusi dan layanan kefarmasian,
  c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi terpadu/terpusat:
     - Pengembangan Kemampuan Penguji Laboratorium Tingkat 3 dan 4 Dalam Pengujian Kimia Obat Tradisional

- FGD Decision Rule Hasil Pengujian dan Persiapan Uji Petik
- Pelatihan Kitchen Inspection untuk SPPG
- Bilateral Technic Workshop oleh Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
- Workshop AMR Warrior Campaign

Keikutsertaan kegiatan ini penting untuk mempertahankan kualitas SDM dalam pendampingan dan pengawasan.

- Terdapat beberapa upaya pelaksanaan dengan prinsip efisien tanpa mengurangi efektivitas, yakni
  a. Melakukan prioritisasi ulang untuk jenis pengadaan kebutuhan laboratorium, baik jenis reagensia, suku cadang maupun alat yang dikalibrasi, dikarenakan sebagian pagunya diblokir
  b. Melakukan priotisasi ulang untuk target pemeriksaaan sarana, sesuai dengan tingkat risiko dan urgensi memperhatikan ketersediaan pagu;
  c. Optimalisasi anggaran pengadaan alat laboratorium, yang awalnya dialokasikan 4 jenis alat (ICP MS, UPS 10 KVa, 6 KVa, Pipette Filler), sehingga dapat dioptimalkan untuk pengadaan alat Cooler HPLC, Bottle Top Dispenser, dan Hotplate;
  d. Mengikuti kegiatan dan pertemuan yang mempertahankan kualitas pelaksanaan untuk mempertahankan capaian kinerja, secara daring, seperti Pelatihan Inspektur Kosmetik dan Pelatihan Inspektur Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Desk CAPA
  e. Desk CAPA, Melakukan penyesuaian atas alokasi anggaran tersedia dengan mengutamakan kegiatan pengawasan, memaksimalkan keikutsertaan kegiatan terpadu secara daring,
  f. Melaksanakan kegiatan pengawasan iklan *back-to-back* dengan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian
  g. Melaksanakan kegiatan pengawasan iklan berbasis daring *(Online Surveillance)* seperti situs web, media sosial, dan platform e-commerce. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya tetapi juga memperluas cakupan pengawasan terhadap iklan.

h. Kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan keamanan pangan di wilayah Kabupaten/Kota, penguatan koordinasi lintas sektor melalui aktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), serta pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memahami mekanisme pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dilakukan secara daring.

i. Advokasi program pengendalian AMR ke Kabupaten Lingga dan Anambas secara daring.

2. Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sampai akhir Triwulan II sebesar 100% sedangkan persentase capaian RPD anggaran 48.48%. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan anggaran masuk dalam kategori capaian tidak efisien. Indikator Kinerja ini didukung dengan satu RO yaitu Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT dengan target output sebanyak 3 sarana. Dengan adanya pemotongan anggaran maka dilakukan penyesuaian target output menjadi 2 sarana. Dengan target terbaru pemeriksaan dijadwal ulang menjadi bulan April dan bulan September.

3. Anggaran yang direalisasikan untuk pencapaian SK Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan capaian sasaran kegiatan 100.20%, dan realisasi anggaran 103.72% dari RPD yang sudah disusun (RPD yang sudah disusun 52.75% dari pagu total) dikategorikan tidak efisien. Dalam pencapaian sasaran ini terdapat 4 Indikator Utama, dengan penggunaan anggaran dari 5 rincian output.

- Realisasi anggaran dalam SK ini digunakan untuk:

  a. Pelaksanaan KIE ke Kelompok Masyarakat, KIE dengan pameran, publikasi ke media cetak, elektronik, dan sosial.

  b. Rangkaian fasilitasi dan pembinaan Lembaga: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Penggunaan sumber dana pada SK ini termasuk tidak efisien, karena terdapat pembayaran honor kader dan pelaksanaan pengawalan pasar yang sedang berproses lebih cepat.

- Namun demikian, tetap dilakukan upaya - upaya efisiensi dalam pelaksanaan tanpa mengurangi efektivitas:
    a. Pergantian lokus kegiatan yang seharusnya Lingga, menjadi dalam kota (Batam) sebagai dampak terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
    b. Penggunaan media daring (Indeks Survei Media) sebagai wadah KIE, dimanfaatkan dengan baik sehingga menghasilkan tingkat efektivitas sangat Efektif, namun dengan anggaran yang hanya menjamin akses internet dan biaya langganan pertemuan daring. Media yang digunakan seperti media sosial, dan subsite kantor
    c. Pelaksanaan KIE dengan pameran di Tanjungpinang, dilaksanakan bersama Loka POM di Tanjungpinang, sehingga memungkinkan hanya penggunaan biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang saja, yang mana sedang berproses pertanggungjawabannya pada triwulan berikutnya
    d. Dilakukan penyesuaian tingkat detail atas perubahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan KIE: Mengurangi biaya pelaksanaan KIE tatap muka: dengan penghapusan biaya transport lokal peserta, memanfaatkan aula kantor, pengurangan biaya satuan snack, menghilangkan biaya satuan konsumsi, serta meniadakan pencetakan banner dan kit peserta. Selain itu dilakukan pengurangan jumlah peserta tatap muka, dengan memprioritaskan perwakilan kunci yang dapat menularkan informasi kepada komunitasnya, sementara peserta lainnya secara daring
    e. Balai POM di Batam juga mendorong dan membuka kesempatan kunjungan peserta dari sekolah, untuk KIE di lokasi kantor langsung.
    f. Publikasi media cetak diutamakan untuk kebutuhan konsultasi konsumen di ruang pelayanan ULPK, dan pada

titik-titik strategis. Selain itu seluruh jenis desain, dan konten media diolah dan diedit secara internal, sehingga tidak menimbulkan biaya jasa tambahan

g. Mengupayakan publikasi di ruang fasilitas umum yang bekerja sama dengan lintas sektor (tanpa biaya), yakni publikasi di digital banner di Bandara Hang Nadim.
h. Mengoptimalkan kanal media sosial resmi BPOM sehingga tidak perlu menggunakan media berbayar secara masif
i. Dilakukan penyesuaian tingkat detail atas perubahan alokasi anggaran, dengan:
    - Mengurangi bahan cetak/modul dan mengganti sebagian materi menjadi softcopy atau melalui QR code
    - Meniadakan percetakan banner,
    - Meminimalisir biaya kit peserta kegiatan,
    - Mengalokasikan biaya transport peserta dan petugas lebih kecil dari SBM
    - Mengurangi jumlah peserta kegiatan, dengan memprioritaskan perwakilan guru, pengelola kantin, dan kader siswa yang dapat menyebarluaskan informasi kepada warga sekolah lainnya
    - Mengurangi jumlah petugas pelaksana, misalnya dari 5 petugas menjadi 3 petugas, dengan tetap menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan,
    - Memanfaatkan fasilitas sekolah/pengelola pasar, atau milik pemerintah sebagai lokasi kegiatan, sehingga tidak memerlukan biaya sewa tempat pertemuan.
    - Melakukan reprioritisasi untuk kader dan lintas sektor yang terlibat
j. Dalam pelaksanaan Advokasi sebagai langkah Kick-off untuk Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, dilakukan upaya-upaya seperti: pelaksanaan di gedung pemerintah kota Batam, Menyederhanakan konsumsi kegiatan (misalnya hanya

snack), pengurangan biaya satuan transport lokal bagi petugas, dan pembatasan pemberian perlengkapan menjadi 1 kit untuk 1 orang stakeholder.

4. Anggaran yang direalisasikan untuk pencapaian SK Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan capaian sasaran kegiatan 132.70%, dan realisasi anggaran 111.72% dari RPD yang sudah disusun (RPD yang sudah disusun 90.50% dari pagu total) dikategorikan efisien. Dalam pencapaian sasaran ini terdapat 1 Indikator Utama, dengan penggunaan anggaran dari 2 rincian output.

- Realisasi anggaran dalam SK ini digunakan untuk:
    a. Pemetaan UMKM Obat dan Makanan dalam kota
    b. Fasilitasi dan Sertifikasi UMKM Obat dan Makanan dalam kota
    c. Kegiatan Bimbingan Teknis Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk UMKM
    d. Kegiatan Bimbingan Teknis Produksi Obat Bahan alam yang Baik untuk UMKM
    e. Peningkatan kompetensi berupa: Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Calon Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik
- Terdapat beberapa upaya pelaksanaan dengan prinsip efisien tanpa mengurangi efektivitas, yakni
    a. Selain dengan pagu anggaran, penjaringan dan pemetaan UMKM dilaksanakan dengan fasilitas kendaraan kantor
    b. Koordinasi dengan lintas sektor yang baik sehingga memudahkan proses pengumpulan data UMKM, dapat melakukan penjaringan sesuai skala prioritas UMK yang didampingi berdasarkan potensi keberhasilan menyelesaikan tahap pendampingan sampai terbit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
    c. Pelaksanaan 2 Kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pelaku Usaha: Bimtek Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk UMKM dan Kegiatan Bimbingan Teknis Produksi Obat Bahan alam yang Baik untuk UMKM, dilaksanakan di kantor unit

kerja, dengan tanpa biaya penyelenggaraan, dan penekanan drastis biaya konsumsi.

5. Anggaran yang direalisasikan untuk pencapaian SK Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan capaian sasaran kegiatan 100.00%, dan realisasi anggaran 135,49% dari RPD, dan 43.20% dari pagu total, dikategorikan tidak efisien. Dalam pencapaian sasaran ini terdapat, 1 Indikator Utama, dengan penggunaan anggaran dari 1 rincian output standar biaya khusus. Realisasi anggaran dalam SK ini digunakan untuk kegiatan operasi intelijen dalam kota dan ke Kabupaten Karimun, penangkapan dan penahanan, pemberkasan perkara dari konsultasi, gelar perkara, bantuan dan penasehat hukum, serta kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik.

   Penggunaan sumber dana termasuk tidak efisien, dikarenakan terdapat kegiatan baru (tidak ada saat penyusunan RPD), sesuai arahan terpusat diperlukan kegiatan pencanangan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu di wilayah unit kerja. Selain itu, terdapat kegiatan pelatihan yang belum diidentifikasi sebelumnya, namun dilaksanakan secara terpusat, yakni peningkatan kinerja, profesionalisme, dan koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2026. Pelatihan ini diikuti karena akan berpengaruh langsung pada kualitas PPNS.

6. Anggaran yang direalisasikan untuk pencapaian SK Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan capaian sasaran kegiatan 100.00%, dan realisasi anggaran 182.93% dari RPD yang sudah disusun, atau 38.98% dari pagu total) dikategorikan efisien. Dalam pencapaian sasaran ini terdapat, 1 Indikator Utama, dengan penggunaan anggaran dari 2 rincian output. Realisasi anggaran dalam SK ini digunakan untuk Pelaksanaan Diklat Investigasi Siber, Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan, dan Kegiatan Aksi Nasional

   Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu di wilayah unit kerja. Penggunaan sumber dana termasuk tidak efisien,

dikarenakan terdapat kegiatan baru (tidak ada saat penyusunan RPD), sesuai arahan terpusat diperlukan kegiatan pencanangan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu di wilayah unit kerja.

Namun demikian tetap dilakukan upaya - upaya efisiensi berupa:

a. Mengoptimalkan data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya sebagai gambaran awal data dalam membuat laporan analisis kejahatan berbasis kewilayahan, untuk mencapai target kinerja
b. Pengurangan jumlah petugas untuk verifikasi hasil patroli siber dan pelaksanaan verifikasi beberapa hasil dalam satu waktu perjalanan

7. Anggaran yang direalisasikan untuk pencapaian SK Layanan Publik UPT yang prima, dengan belum adanya capaian sasaran kegiatan namun realisasi anggaran sebesar 117.08% dari RPD yang sudah disusun, dan 59.57% dari pagu total. Dikarenakan target bersifat tahunan dan capaian kinerja belum bisa diukur, maka tingkat efisiensi belum dapat diukur. Dalam pencapaian sasaran ini terdapat, 1 Indikator Utama, dengan penggunaan anggaran dari 3 rincian output. Realisasi anggaran dalam SK ini digunakan untuk: Audit dalam rangka sertifikasi sarana dalam kota dan luar kota (Kabupaten Karimun), Forum Konsultasi Publik, dan Operasional ULPK.
8. Anggaran yang direalisasikan untuk pencapaian SK Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan belum adanya capaian sasaran kegiatan namun realisasi anggaran sebesar 102.50% dari RPD yang sudah disusun, atau 51.01% dari pagu total. Dikarenakan target bersifat tahunan dan capaian kinerja belum bisa diukur, maka tingkat efisiensi belum dapat diukur. Dalam pencapaian sasaran ini terdapat 1 Indikator Utama, dengan penggunaan anggaran dari 4 rincian output. Adapun realisasi anggaran digunakan untuk:
    a. Koordinasi dan Konsultasi pimpinan kepada perangkat daerah tingkat provinsi, maupun kepada unit pengampu/Eselon I

b. Pengelolaan Belanja pegawai, dan Alih Daya (Outsourcing), honor petugas pengelola anggaran dan Laporan Keuangan,
c. Pemeliharaan Aset baik Alat Laboratorium, Kendaraan, Gedung, dan aset -aset lainnya
d. Sewa rumah dan kendaraan jabatan untuk pimpinan
e. Dan operasional kantor lainnya yang menjamin pelaksanaan kantor berjalan dengan baik.

- Terdapat beberapa upaya pelaksanaan dengan prinsip efisien tanpa mengurangi efektivitas, yakni
  a. Seleksi pertemuan/koordinasi yang diikuti oleh Kepala Unit kerja secara luring, yang berfokus pada pencapaian dan pelaksanaan bersifat strategis
  b. Memastikan pemeliharaan yang dilakukan bersifat substansial dan mempertahankan fungsi aset
  c. Mengikuti seluruh kegiatan koordinasi dan pelaksanaan fungsi ketatausahaan secara daring:
     - Penyusunan Laporan Keuangan BPOM TA 2025
     - Bimbingan teknis dan rekonsiliasi PNBP Badan POM TA 2026
     - Rapat Kerja Nasional Badan POM TA 2027
     - Pembelajaran dari Praktik Terbaik Incoterms dalam Pengadaan Barang/Jasa
     - Diskusi terkait pengadaan barang dan jasa dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
     - Diseminasi dari Inspektorat Badan POM: Titik Kritis dan Pengendalian dalam Mewujudkan PBJ yang Efektif, Akuntabel dan Bebas dari Korupsi
     - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan BPOM Tahun 2026
     - Sosialisasi Pemindahan Arsip di Lingkungan BPOM pada Aplikasi SRIKANDI
     - Sosialisasi percepatan penginputan data arsip di SIKN
     - Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM
     - Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara
     - Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran

- Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja 2025

Dari 9 Sasaran Kegiatan, terdapat 2 Sasaran Kegiatan yang masuk dalam kategori efisien, 5 Sasaran Kegiatan belum efisien, sementara 2 Sasaran Kegiatan lainnya belum dapat diukur. Dalam pelaksanaan lima sasaran tersebut, tingginya penggunaan input (realisasi anggaran), dikarenakan adanya percepatan proses pelaksanaan kegiatan, dan kebutuhan atas pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis. Selain itu, pada pelaksanaan setiap sasaran kegiatan selalu dilaksanakan upaya - upaya efisiensi, dengan menjaga efektivitas (memaksimalkan manfaat yang diterima) dengan alokasi anggaran yang tersedia.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026, secara umum Balai POM di Batam telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga keberlanjutan pencapaian target kinerja hingga akhir tahun. Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Isu strategis utama yang dihadapi adalah belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Batam. Kondisi tersebut tercermin pada indikator persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dimana pencapaian target baru dapat terpenuhi pada akhir Triwulan II. Mengingat kegiatan pengawasan sarana masih berlangsung hingga akhir tahun, diperlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan monitoring tindak lanjut agar setiap rekomendasi hasil pengawasan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Selain itu, terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya belum dapat diukur pada Triwulan II karena memiliki karakteristik pencapaian tahunan, antara lain pembangunan Zona Integritas, implementasi SAKIP, manajemen risiko, program pengendalian resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR), serta pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kondisi tersebut memerlukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif pada semester kedua agar target tahunan dapat dicapai sesuai rencana.

Di sisi lain, karakteristik wilayah kerja Balai POM di Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan wilayah perbatasan dengan mobilitas orang serta barang yang tinggi tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Kondisi ini meningkatkan risiko masuk dan beredarnya produk yang

tidak memenuhi ketentuan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan berbasis risiko, optimalisasi intelijen dan penindakan, serta sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis tersebut, Balai POM di Batam akan terus memperkuat pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan efektivitas pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, mempererat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sebagai upaya memastikan tercapainya sasaran kinerja organisasi secara optimal hingga akhir Tahun 2026.

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan yang dihadapi pada Triwulan II Tahun 2026, Balai POM di Batam menetapkan arah kebijakan dan strategi yang difokuskan pada penguatan efektivitas pengawasan, percepatan pencapaian target kinerja, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Strategi yang diterapkan diarahkan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal hingga akhir Tahun 2026. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program DESK CAPA sebagai sarana pendampingan bagi pelaku usaha dalam menyusun dan menyelesaikan Corrective and Preventive Action (CAPA), sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat efektivitas pengawasan terpadu.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi teknis maupun manajerial guna mendukung pelaksanaan pengawasan yang profesional, adaptif, dan berbasis risiko.
4. Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko melalui penetapan prioritas pengawasan pada komoditas, sarana, dan wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi, serta memanfaatkan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif

5. Mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, khususnya terhadap indikator kinerja yang bersifat tahunan, melalui penguatan perencanaan, monitoring, evaluasi berkala, dan pengendalian pelaksanaan agar target kinerja dapat dicapai sesuai rencana
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, pengelolaan data, pelaporan kinerja, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Melalui implementasi strategi dan arah kebijakan tersebut, Balai POM di Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memastikan pencapaian sasaran kinerja organisasi secara optimal pada akhir Tahun 2026.

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target triwulanan yang ditetapkan, mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif serta didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang optimal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut karena karakteristik pengukurannya bersifat tahunan maupun memerlukan penguatan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan.

Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan, komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan UMKM, serta penegakan hukum telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis Balai POM di Batam. Di sisi lain, pengendalian terhadap pelaksanaan program yang masih berlangsung hingga akhir tahun perlu terus diperkuat agar seluruh indikator kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Dari aspek pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II mencapai 64,80% dari pagu netto, sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai 55,05% dari target tahunan. Capaian

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan berjalan sesuai rencana serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Ke depan, Balai POM di Batam akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan, mengoptimalkan pembinaan kepada pelaku usaha, serta memperkuat tata kelola organisasi melalui monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Dengan upaya tersebut diharapkan seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan perlindungan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang efektif, profesional, dan akuntabel.

Pengukuran kinerja Balai POM di Batam pada Laporan Kinerja ini dilakukan terhadap 5 sasaran kegiatan yang memiliki target pada triwulan II tahun 2026. Dari 6 sasaran kegiatan tersebut sebanyak 2 sasaran kegiatan mendapatkan kategori sangat baik, 3 sasaran kegiatan mendapatkan kategori baik dan 1 sasaran kegiatan mendapatkan kategori tidak dapat disimpulkan. Dari pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan dimana pencapaian memperoleh kriteria *Sangat Baik* dengan rentang capaian pada 100% sampai dengan 110%. Pada rentang capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan tersebut berjalan efektif. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:
    - Sasaran kegiatan 1, **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** dengan capaian 106.08%. Hal ini menunjukkan pengawasan baik sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan serta pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar dijalankan oleh Balai POM di Batam berjalan efektif sesuai target yang diberikan sehingga akan berdampak kepada peningkatan keamanan masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berbahaya bagi kesehatan.
    - Sasaran Kegiatan 3, yaitu **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** dengan capaian 100.20%, dengan capaian tersebut efektifitas KIE yang telah dilakukan Balai POM di Batam berjalan sangat baik. Efektifitas KIE ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk sediaan farmasi

dan pangan olahan yang aman. Melalui KIE, masyarakat dapat memahami cara memilih, menggunakan dan menyimpan sediaan farmasi dan pangan olahan secara benar sehingga dapat melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.

2. Terdapat dua sasaran kegiatan yang memperoleh kriteria baik dengan capaian 90% < x ≤ 100% yaitu
   - Sasaran Kegiatan 2, yaitu **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.** Pada triwulan II telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan target. Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi standar keamanan pangan dan konsistensi penambahan zat gizi sehingga dapat mencegah dan menanggulangi masalah gizi mikro masyarakat, serta memastikan produk yang beredar aman dan bermutu .
   - Sasaran Kegiatan 5, yaitu **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** dengan capaian sebesar 100%. Pada triwulan II Balai POM di Batam telah menyelesaikan tahapan proses penanganan perkara pidana carry over 1 perkara sampai dengan Tahap II. Selain itu Balai POM di Batam juga menangani 1 perkara tahun berjalan dan telah sampai Tahap I. Penindakan kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan oleh Balai POM di Batam untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar, melindungi masyarakat dari produk berbahaya atau ilegal, serta menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam peredaran produk. Penindakan yang efektif juga bertujuan mempersempit ruang gerak distribusi produk tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dengan capaian menunjukkan Balai POM terus berkinerja melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan sesegera mungkin menindak kejahatan yang terjadi.
   - Sasaran Kegiatan 6, yaitu **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di**

wilayah kerja UPT. Deteksi kejahatan yang dilakukan Balai POM di Batam bertujuan untuk mengetahui dan mencegah kejahatan terjadi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini dapat melindungi masyarakat dari potensi-potensi kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

3. Terdapat satu sasaran kegiatan yang memperoleh kriteria tidak dapat disimpulkan dengan capaian x > 110% yaitu
    - Sasaran Kegiatan 4, yaitu **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu,** dengan capaian sebesar 132.70%. Pada triwulan II 2026, Balai POM di Batam telah selesai melaksanakan tahapan kegiatan pendampingan UMKM melebihi yang ditargetkan. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pengumpulan Data Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan, Seleksi dan Penetapan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Target, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan sebagian Pendampingan CPPOB dalam hal Penyiapan Sarana Prasarana sesuai IP CPPOB. Sedangkan untuk pendampingan UMKM OBA tahapan yang telah dilaksanakan adalah Penetapan target UMKM obat tradisional, Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator dan sebagian Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator. Rangkaian kegiatan pendampingan UMKM yang akan berlanjut sepanjang tahun. Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam akan bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat. Bagi pelaku usaha akan terbantu dalam memenuhi persyaratan yang berlaku dan meningkatkan daya saing produk. Sedangkan untuk masyarakat secara umum akan memperoleh produk yang terjamin kualitasnya.

Pada triwulan II tahun 2026, Balai POM di Batam telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai yang ditargetkan. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2026 sebesar Rp10.859.987.154.- atau 64.80% dari pagu netto (setelah blokir anggaran) sebesar Rp16.758.220.000-. Sedangkan jika dibandingkan dengan

pagu total (termasuk blokir) sebesar Rp16.931.289.000,- persentase realisasi sebesar 64.14%.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Balai POM di Batam sebesar Rp1.645.330.000,-. Adapun realisasi PNBP sampai tahun 30 Juni 2026 sebesar Rp905.729.982,-, atau mencapai 55,05% dari target penerimaan, terdiri dari penerimaan jasa sertifikasi sebanyak Rp694.900.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp210.829.982,-.

4.4 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terarah untuk memastikan seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Upaya perbaikan tersebut diarahkan tidak hanya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi pada Triwulan II, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan serta memperkuat tata kelola organisasi secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait guna mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya terhadap indikator kinerja yang bersifat tahunan, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala agar seluruh target kinerja dapat dicapai sesuai rencana.
3. Memperkuat penerapan manajemen risiko dan evaluasi kinerja internal sebagai dasar dalam mengidentifikasi potensi hambatan, menyusun langkah mitigasi, serta memastikan efektivitas pelaksanaan rencana tindak lanjut.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang profesional, adaptif, dan berbasis risiko.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data dalam mendukung proses pengawasan, pelaporan kinerja, serta pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti.

Dengan pelaksanaan berbagai langkah perbaikan tersebut, Balai POM di Batam diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan tercapainya seluruh sasaran strategis organisasi pada Tahun 2026.

L A M P I R A N

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ULLY MANDASARI
Jabatan	: Kepala Balai POM di Batam

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai POM di Batam	Pihak Kedua Kepala Badan POM RI
ULLY MANDASARI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BATAM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.63 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 Persentase
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	87 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.63 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.58 Persentase

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	92 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.04 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Jumlah
		05 - Jumlah desa pangan aman	3 Jumlah
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27.27 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	88.75 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91 Persentase

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.92 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86.69
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76.45 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.91 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 16,886,834,000 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,368,287,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,518,547,000

Batam, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Batam

ULLY MANDASARI

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2026 (Revisi Juni 2026)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	1,471,621,113

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	H - Pertemuan Manajerial Pengujian Mikrobiologi Dan Biomolekuler	10,910,000	8,728,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZB - BLOKIR - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	5,000,000	4,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	278,527,000	236,747,950
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZH - BLOKIR - Evaluasi Sampling Kosmetik (Surabaya)	2,820,000	2,820,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	528,838,000	423,070,400
6.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL	215,539,000	215,539,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZF - BLOKIR - BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PENGAWASAN DARING OBA, OK DAN SK BAGI PETUGAS BADAN POM	2,380,000	1,190,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZD - BLOKIR - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI/LOKA POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI DAN SUPLEMEN KESEHATAN (Jakarta)	2,626,000	2,626,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	45,000,000	36,000,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZE - BLOKIR - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika (Jakarta)	2,542,000	838,860

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
11.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA, SUPLEMEN KESEHATAN	299,262,000	299,262,000
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	45,000,000	36,000,000
13.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	D - Koordinasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau	11,800,000	11,800,000
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	195,983,000	156,786,400
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZA - BLOKIR - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	5,000,000	4,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	D - PERTEMUAN NASIONAL MONITORING DAN EVALUASI REGIONALISASI LABORATORIUM	3,272,000	2,766,803
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZH - BLOKIR - PENGADAAN GLASSWARE	5,023,000	4,018,400
18.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZF - BLOKIR - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	23,138,000	19,667,300
19.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZC - BLOKIR - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	7,200,000	5,760,000

		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	9,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	416,321,078

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE FARMAKOVIGILANS KEPADA TENAGA KESEHATAN/TENAGA MEDIS DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN	9,000,000	9,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	H - Pertemuan Manajerial Pengujian Mikrobiologi Dan Biomolekuler	10,910,000	1,854,700
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	I - Workshop AFRL (ASEAN Food Reference Laboratory)	10,910,000	5,019,691

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	45,000,000	6,300,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	45,000,000	6,300,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	195,983,000	27,437,620
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	E - PENGADAAN CONSUMABLE PART PENGUJIAN PCR	9,000,000	9,000,000
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZA - BLOKIR - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	5,000,000	700,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - PENGUJIAN MAKANAN TAMU NEGARA	45,960,000	45,960,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	ZB - BLOKIR - PENGUJIAN MAKANAN TAMU NEGARA	3,500,000	3,500,000
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	D - PERTEMUAN NASIONAL MONITORING DAN EVALUASI REGIONALISASI LABORATORIUM	3,272,000	505,197
11.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	152,065,000	132,296,550
12.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	53,064,000	46,165,680

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	528,838,000	74,037,320
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	278,527,000	38,993,780
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	G - PENGADAAN MEDIA /REAGENSIA PENGUJIAN DNA	12,600,000	12,600,000
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZB - BLOKIR - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	5,000,000	700,000
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZC - BLOKIR - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	7,200,000	1,008,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
18.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZF - BLOKIR - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	23,138,000	3,239,320
19.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZH - BLOKIR - PENGADAAN GLASSWARE	5,023,000	703,220

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	33,481,760

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZC - BLOKIR - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	7,200,000	288,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZB - BLOKIR - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	5,000,000	200,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	45,000,000	1,800,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Standar Kemampuan Laboratorium	pengujian			
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	195,983,000	7,839,320
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	528,838,000	21,153,520
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZA - BLOKIR - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	5,000,000	200,000
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZH - BLOKIR - PENGADAAN GLASSWARE	5,023,000	200,920
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	45,000,000	1,800,000

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	36,930,459

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	152,065,000	12,165,200
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZA - BLOKIR - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	5,000,000	100,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	528,838,000	10,576,760
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZC - BLOKIR - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	7,200,000	144,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	45,000,000	900,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	H - Pertemuan Manajerial Pengujian Mikrobiologi Dan Biomolekuler	10,910,000	327,300
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	195,983,000	3,919,660

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZB - BLOKIR - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	5,000,000	100,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZH - BLOKIR - PENGADAAN GLASSWARE	5,023,000	100,460
10.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	53,064,000	4,245,120
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	45,000,000	900,000
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	278,527,000	2,785,270
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	I - Workshop AFRL (ASEAN Food Reference Laboratory)	10,910,000	435,309
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	ZF - BLOKIR - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	23,138,000	231,380

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	5,343,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN	10,686,000	5,343,000

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	2,948,119

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZE - BLOKIR - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika (Jakarta)	2,542,000	838,860
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (LUAR KOTA)	15,140,000	825,130

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	42,592,741

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Pencetakan BA Pemeriksaan	3,150,000	171,675
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - Koordinasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau	6,912,000	376,704
5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (DALAM KOTA)	13,500,000	735,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (DALAM KOTA)	13,500,000	12,764,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - Bilateral Technic Workshop oleh Canadian Food Inspection Agency (CFIA) (Jakarta)	12,000,000	6,000,000
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - Koordinasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau	6,912,000	6,535,296
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Pencetakan BA Pemeriksaan	3,150,000	2,978,325
5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (LUAR KOTA)	15,140,000	14,314,870

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	186,643,620

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN	10,686,000	3,098,940
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROPINSI KEPRI	47,090,000	27,312,200
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENGAWASAN IKLAN OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROPINSI KEPRI	65,200,000	35,860,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	ZC - BLOKIR - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI	2,550,000	1,326,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZA - BLOKIR - FORUM KOORDINASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGAWASAN MUTU OBAT TERMASUK OBAT TUBERKULOSIS BEREDAR (Sumatera Selatan)	2,685,000	2,685,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZE - BLOKIR - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika (Jakarta)	2,542,000	864,280
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	ZB - BLOKIR - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROPINSI KEPRI	31,310,000	18,159,800
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI	35,020,000	18,210,400
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZF - BLOKIR - BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PENGAWASAN DARING OBA, OK DAN SK BAGI PETUGAS BADAN POM	2,380,000	1,190,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KEPRI	68,140,000	35,432,800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	172,202,460

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	ZD - BLOKIR - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KEPRI	33,250,000	17,290,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	N - Koordinasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau	37,740,000	21,889,200
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZJ - BLOKIR - Forum Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (Jakarta)	3,325,000	3,325,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEAGAMAAN	32,126,000	32,126,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN	10,686,000	2,244,060
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	ZD - BLOKIR - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KEPRI	33,250,000	13,632,500
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	ZC - BLOKIR - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI	2,550,000	1,045,500
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI	35,020,000	14,358,200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	N - Koordinasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau	37,740,000	15,850,800
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENGAWASAN IKLAN OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROPINSI KEPRI	65,200,000	26,080,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROPINSI KEPRI	47,090,000	19,777,800
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KEPRI	68,140,000	27,937,400
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - Bilateral Technic Workshop oleh Canadian Food Inspection Agency (CFIA) (Jakarta)	12,000,000	6,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	ZB - BLOKIR - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROPINSI KEPRI	31,310,000	13,150,200

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	93.58	3,620,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENGAWASAN IKLAN OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROPINSI KEPRI	65,200,000	3,260,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PENGAWASAN IKLAN OBAT DAN MAKANAN	360,000	360,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	12,873,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		elektronik yang diawasi sesuai Standar													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	D - Koordinasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau	6,458,000	6,458,000
2.	-	-	B - Pengawasan Penandaan Label Rokok	6,415,000	6,415,000

		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	15,467,200

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	ZD - BLOKIR - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KEPRI	33,250,000	2,327,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	ZC - BLOKIR - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI	2,550,000	178,500
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	35,020,000	2,451,400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	(SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI		
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Workshop AMR Warrior Campaign (Padang)	5,740,000	5,740,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KEPRI	68,140,000	4,769,800

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	68	3,409,083,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B - VERIFIKASI/KOLABORASI METODA ANALISA	23,400,000	23,400,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI	24,300,000	24,300,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	ZA - BLOKIR - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	38,250,000	38,250,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	154,630,000	154,630,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	I - Workshop AFRL (ASEAN Food Reference Laboratory)	10,910,000	5,455,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - Pengembangan Kemampuan Penguji Laboratorium Tingkat 3 dan 4 Terkait Pengujian Kimia Obat Dan NAPPZA	10,910,000	10,910,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	G - Pelatihan Verifikasi Dan Validasi Metode Mikrobiologi	10,910,000	10,910,000
8.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Laboratorium	3,004,648,000	3,004,648,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	C - SURVEILAN KAN	75,600,000	75,600,000
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - Pelatihan Internal Bidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler	9,790,000	9,790,000
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D - Pelatihan Internal Bidang Kimia OT-SK, Kosmetik, Dan Obat-NAPPZA	29,370,000	29,370,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - Pengembangan Kemampuan Penguji Laboratorium Tingkat 3 dan 4 Dalam Pengujian Kimia Obat Tradisional	10,910,000	10,910,000
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 Dan 4 Pengujian Pangan Olahan	10,910,000	10,910,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	10,256,450

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	152,065,000	7,603,250
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	53,064,000	2,653,200

2.	02 - Meningkatnya	01 - Persentase cakupan sarana			33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	66.67	66.67	66.67	100	960,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI (DALAM KOTA)	960,000	960,000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	87.04	63,234,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	20	45	70	70	95	100	100	100	100	7	56,651,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - KIE BPOM MELALUI MEDIA ONLINE (MEDIA SOSIAL, WHATSSAP DAN LIVE CHAT)	2,448,000	2,448,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - KIE BPOM MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	14,985,000	14,985,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - KIE KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	45,801,000	45,801,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	16,278,000	16,278,000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH, DESA, DAN PASAR (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	6,132,000	6,132,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	11,791,000	11,791,000
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	22,450,000	22,450,000

05 - Jumlah desa pangan aman	5	5	20	50	70	70	90	100	100	100	100	3	66,962,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - PERTEMUAN DENGAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA MONEV PROGRAM NASIONAL KEAMANAN PANGAN	13,350,000	13,350,000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA DAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PRE INTERVENSI)	35,930,000	35,930,000
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	D - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA DAN SURVEI PRE INTERVENSI	9,220,000	9,220,000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA (KPD)	4,500,000	4,500,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	1,652,000	1,652,000
6.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - PENGAWALAN DESA YANG SUDAH DI INTERVENSI KEAMANAN PANGAN	2,310,000	2,310,000

06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	20	25	50	70	100	100	100	100	100	1	20,620,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - BIMTEK DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	8,800,000	8,800,000
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH, DESA, DAN PASAR (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	1,200,000	1,200,000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - PENGAWALAN	340,000	340,000
4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN	10,280,000	10,280,000

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN					SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			Berbasis Komunitas							MONITORING EVALUASI					
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			15	47.73	47.73	47.73	47.73	47.73	47.73	49.17	61.67	27.27	7,560,000
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				C - BIMTEK CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK UMKM			900,000		900,000
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				A - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMETAAN UMKM OBAT DAN MAKANAN			2,720,000		2,720,000
		3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				B - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA FASILITASI SERTIFIKASI UMKM OBAT DAN MAKANAN			3,940,000		3,940,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	21.25	25	25	28.75	28.75	38.75	42.5	52.5	60	63.75	71.25	88.75	251,484,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	44,865,000	44,865,000
2.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	39,056,000	39,056,000
3.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	15,630,000	15,630,000
4.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	1,490,000	1,490,000
5.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	1,864,000	1,864,000
6.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	5,400,000	5,400,000
7.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	63,385,000	63,385,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		8.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			051 - Operasi Intelijen				D - Pelaksanaan Diklat Investigasi Siber			17,460,000		17,460,000
		9.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara			5,090,000		5,090,000
		10.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			055 - Pemberkasan				C - Gelar Perkara			1,765,000		1,765,000
		11.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			18,870,000		18,870,000
		12.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik			2,236,000		2,236,000
		13.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM			056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				B - Pelaksanaan Wasmatlitrik			34,373,000		34,373,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	15,162,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	diselesaikan sesuai standar													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	5,300,000	5,300,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	B - Pelaksanaan Diklat Investigasi Siber	2,072,000	2,072,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis, Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan	7,790,000	7,790,000

7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.92	24,617,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN, SERTA PENDAFTARAN PRODUK	13,429,000	13,429,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B - PENGADAAN REAGENSIA, MEDIA MIKROBIOLOGI SAMPEL PIHAK KETIGA	8,518,000	8,518,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZI - BLOKIR - Forum Evaluator Auditor Kosmetik (Bandung)	2,470,000	2,470,000
4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KONSUMEN	200,000	200,000

8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												86.69	6,417,488,060

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PETUGAS PENGAMANAN	517,752,000	129,438,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	267,876,000	66,969,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YC - PERINGATAN HUT BPOM KE 25	24,833,000	6,208,250
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	438,300,000	109,575,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	173,688,000	43,422,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YB - Pengadaan Fasilitas Perkantoran	3,240,000	810,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN DINAS / KONSULTASI PIMPINAN	20,804,000	6,865,320
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	113,230,000	28,307,500
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	R - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	169,900,000	42,475,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YA - TATA HUBUNGAN KERJA	9,457,000	3,120,810
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN dan PETUGAS REAGENSIA	114,000,000	28,500,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	T - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	45,900,000	11,475,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE	562,824,000	140,706,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	943,913,000	235,978,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	U - PELATIHAN PENGADAAN BARANG JASA dan PPK TIPE B	11,250,000	2,812,500
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	V - Pelatihan Kompetensi Teknis Kearsipan (PKTK) Pemeliharaan Arsip Inaktif dan Proses Digitisasi	12,348,000	12,348,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	W - PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM DI BATAM	8,520,000	8,520,000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - Pelatihan Petugas dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana K3	86,875,000	21,718,750
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	215,434,000	53,858,500
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - TATA HUBUNGAN KERJA	7,196,000	2,374,680
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	5,040,521,000	5,040,521,000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN DAYA DAN JASA	998,400,000	249,600,000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - SEWA RUMAH JABATAN DAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT ESELON III	207,000,000	51,750,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR	246,600,000	61,650,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI PERKANTORAN	29,460,000	7,365,000
26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	12,000,000	3,000,000
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	105,080,000	26,270,000
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	H - Rapat Koordinasi Nasional SDM (Jakarta)	6,570,000	6,570,000
29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - Pemeliharaan Sistem Informasi	61,118,000	15,279,500

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														76.45	1,408,605,060

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - TATA HUBUNGAN KERJA	7,196,000	2,374,680

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PETUGAS PENGAMANAN	517,752,000	129,438,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	943,913,000	235,978,250
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - SEWA RUMAH JABATAN DAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT ESELON III	207,000,000	51,750,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YB - Pengadaan Fasilitas Perkantoran	3,240,000	810,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	T - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	45,900,000	11,475,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR	246,600,000	61,650,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	267,876,000	66,969,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	R - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	169,900,000	42,475,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE	562,824,000	140,706,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI PERKANTORAN	29,460,000	7,365,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	215,434,000	53,858,500
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	438,300,000	109,575,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - Pelatihan Petugas dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana K3	86,875,000	21,718,750
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)	10,200,000	5,100,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	12,000,000	3,000,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YC - PERINGATAN HUT BPOM KE 25	24,833,000	6,208,250
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN DINAS / KONSULTASI PIMPINAN	20,804,000	6,865,320
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2027 (Bandung)	4,730,000	4,730,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	86,040,000	43,020,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	105,080,000	26,270,000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	173,688,000	43,422,000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN dan PETUGAS REAGENSIA	114,000,000	28,500,000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	U - PELATIHAN PENGADAAN BARANG JASA dan PPK TIPE B	11,250,000	2,812,500
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - Pemeliharaan Sistem Informasi	61,118,000	15,279,500
26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YA - TATA HUBUNGAN KERJA	9,457,000	3,120,810
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	113,230,000	28,307,500
28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN DAYA DAN JASA	998,400,000	249,600,000
29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2026 (Makassar)	6,226,000	6,226,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,400,811,630

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	438,300,000	109,575,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN DINAS / KONSULTASI PIMPINAN	20,804,000	7,073,360
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	943,913,000	235,978,250
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - TATA HUBUNGAN KERJA	7,196,000	2,446,640
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)	10,200,000	5,100,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	86,040,000	43,020,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN DAYA DAN JASA	998,400,000	249,600,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - SEWA RUMAH JABATAN DAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT ESELON III	207,000,000	51,750,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR	246,600,000	61,650,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI PERKANTORAN	29,460,000	7,365,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	12,000,000	3,000,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	105,080,000	26,270,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - Pemeliharaan Sistem Informasi	61,118,000	15,279,500
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PETUGAS PENGAMANAN	517,752,000	129,438,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	267,876,000	66,969,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	173,688,000	43,422,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	113,230,000	28,307,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	R - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	169,900,000	42,475,000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN dan PETUGAS REAGENSIA	114,000,000	28,500,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	T - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	45,900,000	11,475,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	U - PELATIHAN PENGADAAN BARANG JASA dan PPK TIPE B	11,250,000	2,812,500
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - Pelatihan Petugas dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana K3	86,875,000	21,718,750
23.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - FGD PENATAUSAHAAN BMN BPOM DI BATAM	2,788,000	2,788,000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	215,434,000	53,858,500
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE	562,824,000	140,706,000
26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YA - TATA HUBUNGAN KERJA	9,457,000	3,215,380
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YB - Pengadaan Fasilitas Perkantoran	3,240,000	810,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YC - PERINGATAN HUT BPOM KE 25	24,833,000	6,208,250

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														2.91	1,337,168,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	U - PELATIHAN PENGADAAN BARANG JASA dan PPK TIPE B	11,250,000	2,812,500
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - Pelatihan Petugas dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana K3	86,875,000	21,718,750
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE	562,824,000	140,706,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN DAYA DAN JASA	998,400,000	249,600,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	105,080,000	26,270,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - SEWA RUMAH JABATAN DAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT ESELON III	207,000,000	51,750,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - Pemeliharaan Sistem Informasi	61,118,000	15,279,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PETUGAS PENGAMANAN	517,752,000	129,438,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	267,876,000	66,969,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	438,300,000	109,575,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	173,688,000	43,422,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YC - PERINGATAN HUT BPOM KE 25	24,833,000	6,208,250
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	113,230,000	28,307,500
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	R - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	169,900,000	42,475,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR	246,600,000	61,650,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YB - Pengadaan Fasilitas Perkantoran	3,240,000	810,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN dan PETUGAS REAGENSIA	114,000,000	28,500,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	T - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	45,900,000	11,475,000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI PERKANTORAN	29,460,000	7,365,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	215,434,000	53,858,500
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	943,913,000	235,978,250
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	12,000,000	3,000,000
			Total		16,899,707,000

Batam, 10 Juni 2026

Kepala Balai POM di Batam



ULLY MANDASARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2026

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.63	93.5	91.63	99.93	99.92	109.05	Sangat Baik		109.05	Tercapai / Melampaui		106.87
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.00	30		24.44	26.67	-	-	-	98.77	Akan Tercapai		88.89

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	95	92.00	100.00	100.00	108.70	Sangat Baik		108.70	Tercapai / Melampaui		105.26
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	0	100	100.00	Baik		100.00	Tercapai / Melampaui		100.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	95	92.00		100.00	108.70	Sangat Baik		108.70	Tercapai / Melampaui		105.26

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	87.00	90	87.00	66.27	92.56	106.39	Sangat Baik		106.39	Tercapai / Melampaui		102.84
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.00	96.5	98.00	100.00	100.00	102.04	Sangat Baik		102.04	Tercapai / Melampaui		103.63

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.00	95	98.00	100.00	100.00	102.04	Sangat Baik		102.04	Tercapai / Melampaui		105.26
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.63	99.95	97.63	99.26	99.77	102.20	Sangat Baik		102.20	Tercapai / Melampaui		99.82

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
			2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.00	95	85.00	99.64	100.00	117.65	Tidak Dapat Disimpulkan		102.04	Tercapai / Melampaui		105.26
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.58	96.78	93.58	95.56	97.68	104.38	Sangat Baik		104.38	Tercapai / Melampaui		100.93
		12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	92.00	95	92.00	100	100.00	108.70	Sangat Baik		108.70	Tercapai / Melampaui		105.26

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
			elektronik yang diawasi sesuai standar												
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68.00	82.2	67.70	67.69	68.1	100.64	Sangat Baik		100.19	Tercapai / Melampaui		82.88

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.	100	33.33	-	33.33	100	Baik		33.33	Perlu Upaya Keras		33.33

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.04	89.62	87.04	93.07	87.75	100.82	Sangat Baik		100.82	Tercapai / Melampaui		97.91
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	14	70.00	25.00	70.00	100.00	Baik		-	-	-	-
		19	Jumlah desa pangan aman	3	6	70.00	25.00	70.00	100.00	Baik		-	-	-	-
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	70.00	25.00	70.00	100.00	Baik		-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27.27	84.85	47.73	15.91	63.33	132.70	Tidak Dapat Disimpulkan		-	-	-	74.64
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	88.75	98	38.75	25.00	38.75	100.00	Baik		43.66	Perlu Upaya Keras		39.54

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
			UPT												
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91.00	94	50.00	50.00	50.00	100.00	Baik		54.95	Perlu Upaya Keras		53.19
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.92	4.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86.69	89.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	76.45	82.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target			Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d Juni	%Capaian Target s.d Juni 2026			%Capaian Target 2026			% Capaian Target 2029
				2026	2029	Juni 2026			%	Kategori	Notifikasi	%	Kategori	Notifikasi	
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.91	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA.001)	**Input :** Dana	Rp	29,282,000	15,162,000	4,500,840	15.371	29.685
		Output : 14 Laporan	Laporan	14	14	6	42.857	42.857
2	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Batam (QCD.U69)	**Input :** Dana	Rp	434,754,000	289,836,000	125,205,436	28.799	43.199
		Output : 3 Perkara	Perkara	2	1	1	50.000	100.000
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (BAH.001)	**Input :** Dana	Rp	36,324,000	21,947,000	11,889,100	32.731	54.172
		Output : 242 Dokumen	Dokumen	242	157	244	100.826	155.414
4	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (QDG.001)	**Input :** Dana	Rp	15,120,000	7,560,000	6,200,000	41.005	82.011
		Output : 11 UMKM	UMKM	11	6	0	0.000	0.000

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
5	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)	**Input :** Dana	Rp	229,489,000	205,129,000	169,811,902	73.996	82.783
		Output : 138 sampel	Sampel	138	123	84	60.870	68.293
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.002)	**Input :** Dana	Rp	548,308,000	526,601,000	366,263,285	66.799	69.552
		Output : 756 Sampel	sampel	756	726	401	53.042	55.234
7	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (QIC.003)	**Input :** Dana	Rp	1,920,000	960,000	480,000	25.000	50.000
		Output : 3 Sarana	sampel	3	2	1	33.333	50.000
8	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)	**Input :** Dana	Rp	74,604,000	38,702,000	19,961,735	26.757	51.578
		Output : 55 Sarana	Sarana	55	29	18	32.727	62.069
9	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	**Input :** Dana	Rp	604,155,000	400,060,000	169,145,312	27.997	42.280
		Output :	Sarana	522	346	220	42.146	63.584

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)	522 Sarana						
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (BMB.001)	**Input :** Dana	Rp	32,648,000	17,633,000	5,230,000	16.019	29.660
		Output : 7 Kegiatan	layanan	7	5	1	14.286	20.000
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (QDB.001)	**Input :** Dana	Rp	99,468,000	56,651,000	27,053,300	27.198	47.754
		Output : 7 Sekolah	Sekolah	7	4	0	0.000	0.000
12	Desa Pangan Aman (QDB.002)	**Input :** Dana	Rp	111,114,000	66,962,000	36,975,300	33.277	55.218
		Output : 3 Desa	Paket	3	2	0	0.000	0.000
13	Pasar aman dari bahan berbahaya (QDB.003)	**Input :** Dana	Rp	32,502,000	20,620,000	18,969,950	58.365	91.998
		Output : 1 Pasar	Pasar	1	1	0	0.000	0.000
14	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (BDC.001)	**Input :** Dana	Rp	51,917,000	45,801,000	26,472,075	50.989	57.798
		Output : 1250 Orang	Orang	1250	992	617	49.360	62.198

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
15	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (BKB.001)	**Input :**	Rp	84,748,000	45,526,000	27,614,901	32.585	60.657
		Dana						
		Output :	laporan	1	1	0.00	0.000	0.000
		1 Laporan						
16	Layanan Perkantoran (6384.EBA.994)	**Input :**	Rp	11,141,952,000	10,509,889,000	5,349,601,059	48.013	50.901
		Dana						
		Output :	Layanan	1	1	0	0.000	0.000
		1 Layanan						
17	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (PDD.001)	**Input :**	Rp	1,799,570,000	1,633,841,000	916,750,251	50.943	56.110
		Dana						
		Output :	Laboratorium	1	1	0.00	0.000	0.000
		1 Laboratorium						
18	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (RAB.001)	**Input :**	Rp	3,755,810,000	3,004,648,000	3,004,646,311	80.000	100.000
		Dana						
		Output :	Paket	1	1	1	100.000	100.000
		1 Paket						
19	Layanan BMN (EBA.956)	**Input :**	Rp	5,000,000	1,888,000	1,855,000	37.100	98.252
		Dana						
		Output :	Unit	1	1	0	0.000	0.000
		1 Layanan						
20	Label produk tembakau dan/atau	**Input :**	Rp	20,044,000	12,873,000	1,777,500	8.868	13.808

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM (BIA.001)	Dana						
		Output :	Paket	144	144	72	50.000	50.000
		144 Produk						
21	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans (QDC.001)	**Input :**	Rp	10,000,000	9,000,000	8,150,000	81.500	90.556
		Dana						
		Output :	Paket	45	45	45	100.000	100.000
		45 Orang						

Lampiran 5 Pengukuran Tingkat Efisiensi per Program/Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		16,931,289,000	9,967,189,620	10,298,553,257	103.32										
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	6,419,512,000	4,751,893,542	4,947,097,198	104.11										
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,419,512,000	4,751,893,542	4,947,097,198	104.11										

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AEA	**Koordinasi**	**15,162,000**	**10,540,840**	**4,500,840**	**42.70**										
001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	15,162,000	10,540,840	4,500,840	42.70	14	Kegiatan	6	6	100.00	42.87	42.86	99.97	1.34	84% (tidak efisien)
BAH	**Pelayanan Publik Lainnya**	**21,947,000**	**12,309,500**	**11,889,100**	**96.58**										
001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang	21,947,000	12,309,500	11,889,100	96.58	157	Dokumen	134	244	182.09	85.33	155.41	182.13	0.89	88% (efisien)

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Diselesaikan oleh UPT														
BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**144,233,000**	**79,100,250**	**82,998,550**	**104.93**										
001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	56,651,000	27,093,300	27,053,300	99.85	4	Lembaga	0	0		70	70	100.00	0.00	100% (efisien)
002	Desa Pangan Aman	66,962,000	35,377,000	36,975,300	104.52	2	Lembaga	0	0		70	70	100.00	-0.04	Tidak efisien

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	20,620,000	16,629,950	18,969,950	114.07	1	Lembaga	0	0		70	70	100.00	-0.12	Tidak efisien
BDC	**Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**	**45,801,000**	**23,173,500**	**26,472,075**	**114.23**										
001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	45,801,000	23,173,500	26,472,075	114.23	992	Orang	532	617	115.98	53.63	62.20	115.98	0.02	100% (efisien)

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIA	**Pengawasan dan Pengendalian Produk**	**12,873,000**	**7,205,500**	**1,777,500**	**24.67**										
001	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	12,873,000	7,205,500	1,777,500	24.67	144	Produk	72	72	100.00	49.98	50	100.04	3.06	75% (tidak efisien)

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BKB	**Pemantauan produk**	**45,526,000**	**27,614,901**	**27,614,901**	**100.00**										
001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	45,526,000	27,614,901	27,614,901	100.00	1	Laporan	0	0		49.98	50	100.04	0.00	100% (efisien)
BMB	**Komunikasi Publik**	**17,633,000**	**5,177,000**	**5,230,000**	**101.02**										
001	Layanan Informasi Keamanan dan	17,633,000	5,177,000	5,230,000	101.02	5	Kegiatan	1	1	100.00	39.98	48.10	120.31	0.19	100% (efisien)

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Mutu Obat dan Makanan oleh UPT														
PDD	**Standarisasi Lembaga**	**1,633,841,000**	**852,003,204**	**916,750,251**	**107.60**										
001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,633,841,000	852,003,204	916,750,251	107.60	1	Lembaga	0	0		49.98	50	100.04	-0.07	Tidak efisien

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QCD	**Perkara Hukum Badan Usaha**	**289,836,000**	**92,411,876**	**125,205,436**	**135.49**										
U69	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Batam	289,836,000	92,411,876	125,205,436	135.49	2	Perkara	1	1	100.00	54.38	54.84	100.85	-0.26	Tidak efisien
QDC	**Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**	**9,000,000**	**8,320,000**	**8,150,000**	**97.96**										

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
002	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	9,000,000	8,320,000	8,150,000	97.96	45	Orang	45	45	100.00	100	100	100.00	0.02	100% (efisien)
QDG	**Fasilitasi dan Pembinaan UMKM**	**7,560,000**	**4,840,000**	**6,200,000**	**128**										
001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan	7,560,000	4,840,000	6,200,000	128.10	6	Umkm	0	0		42.5	63.33	149.01	0.16	100% (efisien)

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	standar oleh UPT														
QIA	**Pengawasan dan Pengendalian Produk**	**731,730,000**	**575,600,121**	**536,075,187**	**93.13**										
001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	205,129,000	159,552,247	169,811,902	106.43	123	Produk	77	84	109.09	62.60	68.29	109.09	0.03	100% (efisien)

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	526,601,000	416,047,874	366,263,285	88.03	726	Produk	398	401	100.75	54.82	55.23	100.76	0.14	100% (efisien)
QIC	**Pengawasan dan**	**439,722,000**	**170,596,850**	**189,587,047**	**111.13**										

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengendalian Lembaga														
001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	38,702,000	22,361,735	19,961,735	89.27	29	Lembaga	16	18	112.50	55.18	62.07	112.48	0.26	95% (efisien)
003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang	960,000	480,000	480,000	100.00	2	Lembaga	1	1	100.00	50	50.00	100.00	0.00	100% (efisien)

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	diperiksa oleh UPT														
004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	400,060,000	147,755,115	169,145,312	114.48	346	Lembaga	210	220	104.76	60.70	64.29	105.91	-0.07	Tidak efisien

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	3,004,648,000	2,883,000,000	3,004,646,311	104.22										
001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3,004,648,000	2,883,000,000	3,004,646,311	104.22	1	Paket	0	1		95.95	100	104.22	0.00	100% (efisien)

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WA	Program Dukungan Manajemen	10,511,777,000	5,215,296,078	5,351,456,059	102.61										
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,511,777,000	5,215,296,078	5,351,456,059	102.61										
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,511,777,000	5,215,296,078	5,351,456,059	102.61										
956	Layanan BMN	1,888,000	1,486,000	1,855,000	124.83	1	Layanan	0	0		49.98	98.64	197.36	0.58	92%

KRO/RO		BELANJA				KELUARAN								TE*	Capaian Efisiensi
		Pagu	RPD	Realisasi	% Realisasi thd RPD	Target Volume RO	Satuan	Target Volume RO TW II	Realisasi Volume RO TW II	%	Target Progress RO TW II	Realisasi Progress Capaian TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															(efisien)
994	Layanan Perkantoran	10,509,889,000	5,213,810,078	5,349,601,059	102.60	1	Layanan	0	0		49.98	51	102.04	-0.01	Tidak efisien

***Tingkat Efisiensi =((14/6)-1)/1**

BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Jl. Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa, Kota Batam

Balai POM di Batam 0823-9220-1231 @bpom.batam @bpom_batam batam.pom.go.id